

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG PADA SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA ERUPSI GUNUNG KELUD

(Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

SUCI MUFITASARI

125030100111152



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2019

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PADA SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA
ERUPSI GUNUNG KELUD**

(Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

SUCI MUFITASARI

125030100111152



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

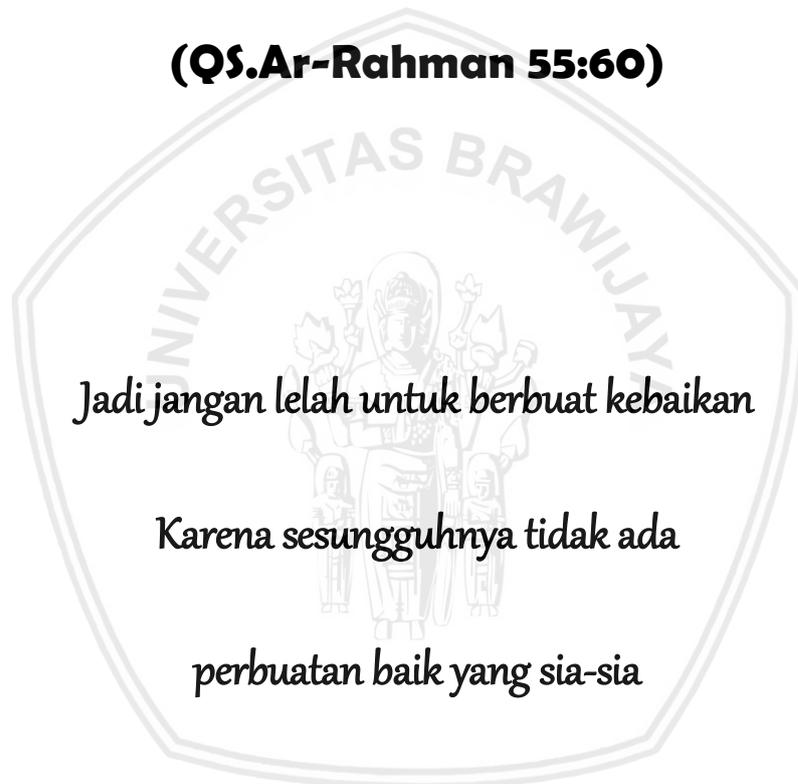
MALANG

2019

MOTTO

***“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain
kebaikan (pula)”***

(QS.Ar-Rahman 55:60)



Jadi jangan lelah untuk berbuat kebaikan

Karena sesungguhnya tidak ada

perbuatan baik yang sia-sia

(Suci Mufitasari)

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Upaya Pemerintah Kabupaten Malang pada Saat Tanggap
 Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud (Studi pada Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang)

Disusun oleh : Suci Mufitasari

NIM : 125030100111152

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

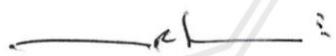
Malang, 27 Juni 2019

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP
 NIP. 19531113 198212 1 001


Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, MPA
 NIP. 19740614 200501 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Juli 2019
Jam : 12.00 – 13.00 WIB
Skripsi atas nama : Suci Mufitasari
Judul : Upaya Pemerintah Kabupaten Malang pada Saat Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan

LULUS

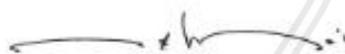
MAJELIS PENGUJI

Ketua



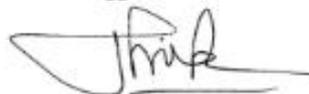
Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP
NIP. 19531113 198212 1 001

Anggota



Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, M.AP
NIP. 19740614 200501 1 001

Anggota



Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA
NIP. 19860716 201404 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karta atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur jiplak, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 27 Juni 2019



Nama : Suci Mufitasari
NIM : 125030100111152



RINGKASAN

Suci Mufitasari, 2019, **Upaya Pemerintah Kabupaten Malang Pada Saat Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang)** Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP., Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., M.AP., 172 hal. + xvii

Pada tanggal 13 Februari 2014 tepat pukul 22.50 WIB Gunung Kelud erupsi. Kejadian erupsi tersebut berhasil merusak bangunan rumah warga, perkantoran, tempat ibadah, maupun sekolah di dua wilayah kecamatan Kabupaten Malang, yakni Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Kasembon. Erupsi Gunung Kelud mengarah ke kedua kecamatan tersebut dan menjadi titik terparah terdampak bencana bagi wilayah Kabupaten Malang. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang selaku pemerintah tingkat daerah dituntut untuk melakukan upaya penanganan erupsi kelud secara cepat, responsif, dan terpadu dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat (pengungsi) yang terdampak erupsi Gunung Kelud. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yakni lembaga kebencanaan tingkat daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang pada saat tanggap darurat erupsi Gunung Kelud, (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat terhadap upaya tanggap darurat erupsi Gunung Kelud. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa dokumen pendukung terkait tanggap darurat erupsi Gunung Kelud. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi dari hasil dokumen atau riwayat-riwayat erupsi kelud tahun 2014. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ada tiga upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada saat tanggap darurat erupsi gunung Kelud yang sesuai dengan rencana kontijensi erupsi gunung api milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, yaitu a) penanganan tanggap darurat sektor posko pengendali, b) pelaksanaan sektor evakuasi korban, dan c) penghimpunan dan penyaluran bantuan logistik (2) faktor pendukung upaya tanggap darurat erupsi Gunung Kelud, yaitu sinergitas antar aktor penanggulangan bencana erupsi Gunung Kelud dan koordinasi komunitas Jangkar Kelud, sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber dana yang kurang mencukupi, kurangnya jumlah anggota BPBD, dan faktor dari pengungsi itu sendiri.

Kata kunci: upaya, pemerintah daerah, tanggap darurat, manajemen bencana, erupsi

SUMMARY

Suci Mufitasari, 2019, **Effort of Malang Regency Government During Disaster Emergency Response of Mount Kelud Eruption (Study at *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang*)** Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP., Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., M.AP., 172 pages + xvii

On February 13, 2014 at exactly 10:50 a.m. WIB the eruption of Mount Kelud. This eruption succeeded in destroying residents' buildings, offices, places of worship, and schools in two sub-districts of Malang Regency, namely Ngantang and Kasembon. Mount Kelud eruption headed for this second sub-district and became the worst affected point of disaster for Malang Regency. Therefore, the Malang Regency Government as the regional level government is required to carry out kelud eruption assistance quickly, responsively, and integrated in providing protection and fulfillment of the rights of the community (refugees) affected by the eruption of Mount Kelud. This was realized through emergency response activities carried out by the Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, namely regional level disaster agencies.

This study aims to find out, (1) the efforts made by the Malang Regency Government during the Mount Kelud eruption emergency response, (2) the factors that became supporters and inhibitors of the Mount Kelud eruption emergency response efforts. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Research location in *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang's* office. Primary data in this study are interviews with resource persons and secondary data in the form of supporting documents related to Mount Kelud's eruption emergency response. Data collection methods used in this study are interviews and documentations history of Kelud eruptions in 2014. Data analysis in this research used an interactive model analysis of Miles, Huberman, and Saldana.

The results of this study indicate that (1) there were three emergency response efforts carried out by Malang Regency Government during the emergency response of Mount Kelud eruption in accordance with the volcanic eruption contingency plan of the *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang*, such as a) emergency response handling sector control post, b) implementation of the victim evacuation sector, and c) collection and distribution of logistical assistance (2) supporting factors for the Mount Kelud eruption emergency response, namely the synergy between Mount Kelud eruption disaster relief actors and 'Jangkar Kelud Community' coordination, while the inhibiting factors are sources insufficient funds, a lack of BPBD members, and factors from the refugees themselves.

Keywords: efforts, regency government, emergency response, disaster management, eruption



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Pemerintah Kabupaten Malang pada Saat Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir kolektif yang menjadi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi
4. Bapak Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP selaku Ketua komisi Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia mengarahkan, mendukung dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, M.AP selaku Anggota komisi Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia mengarahkan, mendukung dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ibu Vivi Lokasari, S.Sos, M.AP, Bapak Leonard Agus Supardhy, S.Sos, Bapak Suhartanto, ST, Mas Oldi, serta seluruh staff BPBD Kabupaten Malang yang membantu penulis dalam proses pengambilan data.
8. Ibu Muslikah dan Bapak Sujono selaku kedua orang tua saya yang tidak henti-hentinya memberikan doa, nasehat, motivasi serta dorongan kepada saya untuk tidak menyerah dan terus berjuang mengerjakan laporan skripsi ini.
9. Mbak Fitri dan Mas Arif selaku kakak kandung dan kakak ipar saya yang selalu memberikan dukungan & semangat agar cepat menyelesaikan studi.
10. Dedi, Rafi, dan Desi, saudara kandung dari penulis yang terus bertanya kapan lulus.
11. Sahabat-sahabat saya, Ike Darmayanti yang sudah setia mendengarkan keluh kesah dan terus memotivasi dengan mengajak ikut kajian. Sahabat SMAN 9 geng hahahihi-ruang nafas Cesti, Nia, Shadiar, dan anggota ruang nafas lainnya yang memberikan semangat selama menyusun skripsi ini.
12. Teman saya M. Rojib Bissalam yang sudah meluangkan waktunya membantu proses pengambilan data, dan juga terus sabar memberikan dukungan semangat untuk tidak takut dan tidak menyerah.

13. Kepada semua teman-teman SMPN 4 Malang dan kuliah saya yang tidak bisa saya sebutkan disini yang selalu memotivasi dan memberikan dorongan agar cepat terselesainya skripsi ini.

14. Serta seluruh pihak yang turut membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balas atas bantuan yang diberikan kepada penulis. Tanpa menutup diri dari kesalahan dan ketidakteelitian, penulis mengakui masih banyak kesalahan serta kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu Saya selaku penulis mengharapkan kritik serta saran untuk proses belajar menjadi lebih baik. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 25 Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kontribusi Penelitian	16
E. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pemerintah Daerah	20
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	20
2. Pemerintah Daerah dalam Manajemen Bencana	21
B. Bencana	23
1. Pengertian dan Jenis Bencana.....	23
2. Dampak Bencana	32
C. Manajemen Bencana	35
1. Pengertian dan Tahapan Manajemen Bencana (<i>Disaster Management</i>)	35
2. Faktor Penentu Pelaksanaan Manajemen Bencana.....	40
D. Tanggap Darurat (Kedaruratan)	45
1. Manajemen Kedaruratan.....	45



2. Periode Tanggap Darurat	47
E. Rencana Kontijensi Erupsi Gunung Api BPBD Kabupaten Malang	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	53
B. Fokus Penelitian	56
C. Lokasi dan Situs Penelitian	58
D. Jenis dan Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Instrumen Penelitian	68
G. Teknik Analisis Data	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	75
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang	75
a) Sejarah Kabupaten Malang	75
b) Kondisi Geografi dan Topografi Kabupaten Malang ...	77
c) Potensi Ancaman Bencana Kabupaten Malang	78
2. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang	80
a) Profile Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang	80
b) Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang	82
c) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.....	84
3. Erupsi Gunung Kelud 2014	88
a) Kronologi Erupsi Gunung Kelud Tahun 2014.....	88
b) Kawasan Rawan Bencana (KRB) Erupsi Gunung Kelud.....	92
B. Penyajian Data Penelitian.....	95
1. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pada saat Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud	95
a) Penanganan Tanggap Darurat Sektor Posko Pengendali	97
b) Pelaksanaan Sektor Evakuasi Korban.....	108
c) Penghimpunan dan Penyaluran Bantuan Logistik	121



2. Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud	133
a) Faktor Pendukung	133
1) Kerjasama Antar Aktor	134
2) Dukungan LSM Lokal.....	136
3) Dukungan Masyarakat.....	137
b) Faktor Penghambat	138
1) Faktor Alam.....	138
2) Kurangnya Sumber Daya Manusia.....	139
3) Kurangnya Sumber Dana	140
4) Kurangnya Sarana dan Prasarana	141
5) Kondisi Pengungsi.....	142
C. Analisis Data	143
1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud.....	143
a) Penanganan Tanggap Darurat Sektor Posko Pengsendali	149
b) Pelaksanaan Sektor Evakuasi Korban.....	151
c) Penghimpunan dan Penyaluran Bantuan Logistik	153
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud.....	157
a) Faktor Pendukung	157
1) Kerjasama Antar Aktor	157
2) Dukungan LSM Lokal.....	158
3) Dukungan Masyarakat.....	159
b) Faktor Penghambat	160
1) Faktor Alam.....	161
2) Kurangnya Sumber Daya Manusia.....	162
3) Kurangnya Sumber Dana	163
4) Kurangnya Sarana dan Prasarana	163
5) Kondisi Pengungsi.....	164



BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	166
B. Saran	170
DAFTAR PUSTAKA	173



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Aktivitas Gunung Kelud	10
2.	Klasifikasi Bencana Berdasarkan Faktor Penyebab Terjadinya	28
3.	Kebijakan dan Fokus Kegiatan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Kelud	51
4.	Potensi Bencana di Kabupaten Malang	78
5.	Sebaran Potensi Ancaman Wilayah Kabupaten Malang	79
6.	Daftar Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.....	86
7.	Daftar Kegiatan Pelaksanaan Tanggap Darurat Sektor Posko Pengendali	100
8.	Rekapitulasi Kerusakan Bangunan Rumah Warga Akibat Erupsi Gunung Kelud Tahun 2014	104
9.	Rekapitulasi Kerusakan Tempat Ibadah Akibat Erupsi Gunung Kelud Tahun 2014.....	106
10.	Rekapitulasi Relawan Bencana Gunung Kelud	107
11.	Daftar Kegiatan Pelaksanaan Tanggap Darurat Sektor Evakuasi	110
12.	Rekapitulasi Pengungsi di seluruh wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu	119
13.	Daftar Kegiatan Pelaksanaan Penghimpunan dan Penyaluran Bantuan Logistik.....	123
14.	Daftar Barang masuk Posko Induk Selorejo.....	127
15.	Kapasitas Dapur Umum Bencana Erupsi Gunung Kelud 2014.....	130

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Kejadian bencana Kabupaten Malang 5 tahun terakhir	8
2.	Tahapan Manajemen Bencana	36
3.	Siklus Tahapan Manajemen Bencana	37
4.	<i>Component of Data Analysis (Interactive Model)</i>	70
5.	Peta Wilayah Kabupaten Malang.....	77
6.	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Malang Tahun 2019	85
7.	Aktivitas Peningkatan Status Gunung Kelud Tahun 2014	89
8.	Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Kelud	92
9.	Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Kelud	93
10.	Kerusakan Atap Genting Akibat Erupsi	95
11.	Kondisi Kawasan Wisata Selorejo Desa Pandansari	96
12.	SOP Sektor Posko Pengendali	99
13.	Koordinasi Bersama Pemerintah Kabupaten Malang	100
14.	Struktur Organisasi Relawan Penanggulangan Erupsi Gunung Kelud Tahun 2014.....	103
15.	Rumah warga Dusun Munjung, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang	105
16.	Rumah warga Dusun Pait, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang	105
17.	SOP Sektor Evakuasi dan Penyelamatan Korban	110
18.	Evakuasi Korban Erupsi	112
19.	Evakuasi oleh Petugas BPBD Kabupaten Malang bersama relawan.....	112
20.	Evakuasi oleh Petugas BPBD Kabupaten Malang bersama relawan.....	114
21.	Suasana Evakuasi dibantu oleh Anggota TNI	114
22.	Suasana di Tenda Pengungsian Darurat.....	115
23.	Suasana Pengungsi di Balai Desa Banturejo	116
24.	Daftar Sasaran Desa Kegiatan Evakuasi Pengungsi Di Kecamatan Kasembon dan Ngantang	117
25.	Peta Titik Pengungsian di Kecamatan Ngantang dan Kasembon ...	118
26.	Daftar Tempat Pengungsian Kecamatan Kasembon dan Ngantang	118
27.	Peta Titik Pengungsian di Kecamatan Bumiaji, Junrejo, dan Karangploso	119



28.	SOP Penghimpunan dan Pendistribusian Bantuan Logistik dan Dapur Umum	122
29.	Pendataan Barang Bantuan Logistik	128
30.	Distribusi Bantuan Logistik Menggunakan <i>Flying fox</i>	128
31.	Distribusi Bantuan Logistik Menggunakan <i>Flying fox</i>	129
32.	Kegiatan Operasional Dapur Umum	131
33.	Kegiatan Operasional Dapur Umum.....	131
34.	Kegiatan Pengungsi Membungkus Nasi	132



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara yang mana berbatasan langsung dengan kawasan benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudera, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini menyebabkan wilayah Indonesia terletak pada jalur subduksi (perbenturan) tiga lempeng tektonik aktif, seperti Lempeng Tektonik Eurasia yang membentang di kawasan utara, Lempeng Hindia-Australia yang terbentang di sebelah selatan, dan Lempeng Pasifik di sebelah timur. Perbenturan antara Lempeng Hindia-Australia dengan Lempeng Pasifik menyebabkan terbentuknya lengkungan vulkanik jalur lingkaran cincin api (*ring of fire*) atau yang disebut dengan deretan pegunungan muda yang masih terus aktif (Sirkum). Sirkum tersebut adalah Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik yang membentang dari barat sampai ke timur Indonesia.

Kedua sirkum tersebut, menyebabkan terbentuknya 129 gunung api aktif yang terhampar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Sebanyak 99 buah gunung api terletak di jalur deretan pegunungan Sirkum Mediterania yang memanjang sepanjang 7.000 km dari wilayah Aceh sampai dengan Nusa Tenggara. Kesemua gunung tersebut terbagi di beberapa wilayah, seperti di Bukit Barisan (Pulau Sumatera) terdapat 32 buah gunung, di Pulau Jawa terdapat 37 buah, di Pulau Bali dan Nusa Tenggara terdapat 30 buah gunung. Sedangkan, di

deretan pegunungan Sirkum Pasifik yang membentang di wilayah timur Indonesia memiliki 32 buah gunung aktif. Sebanyak 18 buah gunung terletak di kawasan Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Serta sisanya sebanyak 14 buah gunung di wilayah Papua (Suyami, 2015:3). Dengan kondisi yang demikian, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai gunung api aktif terbanyak di dunia. Sebanyak 129 buah gunung api

Sedangkan dari segi astronomis, Indonesia terletak pada garis koordinat 95 derajat Bujur Timur hingga 141 derajat Bujur Timur dan 11 derajat Lintang Utara hingga 11 derajat Lintang Selatan. Atau penulisan astronomisnya dapat disingkat menjadi 95° BT - 141° BT dan 6° LU - 11° LS. Wilayah Indonesia yang berada diantara garis lintang utara dengan lintang selatan menyebabkan beberapa pulau dan kota di Indonesia berada pada garis lintang 0° (*Equator/Zero Latitude/garis Khatulistiwa*). Kondisi ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis atau hanya memiliki dua musim, yakni musim hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Serta musim kemarau dengan suhu yang tinggi karena Indonesia mendapatkan pancaran sinar matahari yang merata sepanjang tahun sehingga terjadi penguapan dan kelembaban udara yang tinggi pula. Intensitas curah hujan yang tinggi inilah yang kemudian menyebabkan beberapa wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan angin topan, kekeringan dan kebakaran hutan ketika musim, serta terjadi pemanasan global yang disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrim pada bulan-bulan tertentu.

Fenomena bencana alam sangat erat sekali dengan negara Indonesia. Dari segi geografis dan astronomisnya, Indonesia akan sangat sulit untuk lepas dari

peristiwa bencana. Bencana sendiri merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam termasuk manusia itu sendiri (karena konflik maupun teror) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Peristiwa bencana di Indonesia pun meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada kurun waktu lima tahun terakhir menyebutkan telah terjadi 10.595 kejadian bencana. Sebagian besar bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologis, seperti 3.413 kasus banjir, 2.716 tanah longsor, 105 gempa bumi, 3.179 angin puting beliung, 2 peristiwa tsunami besar, dan 40 letusan gunung api. Kemudian disusul dengan adanya 99 bencana kekeringan, 476 kebakaran hutan dan lahan, 22 kebakran, 202 kecelakaan transportasi, 1 aksi teror, dan 10 kasus konflik dan kerusuhan sosial (www.bnpb.go.id).

Kejadian bencana seperti pada paparan diatas tidak mungkin bisa diperkirakan dengan pasti kapan terjadi dan seberapa besar dampaknya. Kejadian bencana pun selalu memberikan dampak kejutan dan menimbulkan banyak kerugian baik jiwa maupun materi. Kejutan tersebut terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi ancaman bahaya. Oleh karena itu yang bisa dilakukan adalah untuk mengurangi dampaknya serta meminimalisir jumlah korban jiwa beserta kerugian materilnya. Hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana yang baik dan efektif. Mulai dari tahap pra bencana, saat terjadi bencana, hingga tahap pemulihan pasca bencana.

Mekanisme penanggulangan bencana yang diterapkan di Indonesia sendiri telah tertuang dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam pelaksanaannya pun telah diatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab. Ditingkat pusat penyelenggaraan penanggulangan bencana berada dibawah komando Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) yang berpayung hukum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.23 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sedangkan, ditingkat daerah terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki kewenangan menangani bencana pada masing-masing daerah.

Sesuai dengan UU No.24 Tahun 2007 tersebut, penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri 3 tahap, yaitu pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Penanggulangan bencana sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, dan menghadapi budaya lokal. Namun, pada kenyataannya bencana

yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun masih membawa dampak yang besar, masih terdapat korban jiwa, dan kelambanan dalam merespons bencana. Sehingga tujuan penanggulangan bencana tersebut belum tercapai secara optimal. Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mulai dari lemahnya persiapan pada tahap prabencana dan lambannya proses penyelamatan korban bencana yang dikarenakan semua koordinasi masih sangat bergantung pada kesigapan dan instruksi pusat.

Salah satu tahap penanggulangan bencana yang sangat penting adalah tahap tanggap darurat (*emergency response*) saat terjadi bencana. karena pada saat terjadi bencana diperlukan penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel, agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana menjelaskan bahwa tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Pada saat tanggap darurat harus dikoordinasikan dalam sistem satu komando, hal ini dimaksudkan sebagai upaya memudahkan akses untuk memerintahkan sektor dalam hal permintaan dan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai, dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggung jawaban atas uang dan atau barang, serta penyelamatan korban bencana.

Menurut Nurjanah (2011:99), kegiatan saat terjadi bencana mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti *search and rescue* (SAR) atau evakuasi penyelamatan dan pencarian korban, penyaluran bantuan darurat, dan menangani pengungsian. Serta mencakup rencana, struktur dan pengaturan yang dilakukan untuk melibatkan usaha/kinerja pemerintah pusat dan daerah, relawan dan badan swasta dalam cara yang terkoordinasi dan menyeluruh untuk merespon semua spektrum kebutuhan kedaruratan. Aksi tanggap darurat yang efektif dapat menghindarkan memburuknya satu peristiwa yang menyebabkannya menjadi satu bencana. Oleh karena itu, ada beberapa aspek penentu keberhasilan dalam tanggap darurat menurut Zaini (1998:89), yaitu:

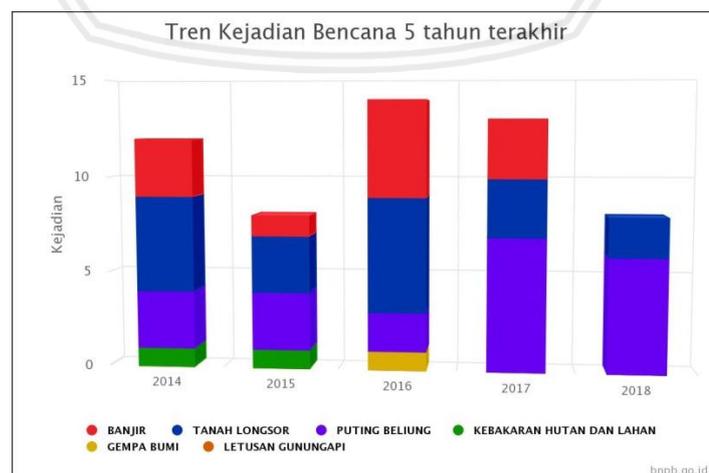
1. Kinerja organisasi dalam keadaan darurat
2. Sarana dan prasarana (alat penanggulangan, kendaraan, dan pos komando)
3. Komunikasi yang baik antar petugas melalui telepon, radio, tanda bahaya
4. Kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta
5. Pertolongan korban bencana secepatnya
6. Kesejahteraan saat bertugas
7. Latihan rutin untuk melatih keahlian dan keterampilan dalam tanggap darurat

Untuk mengetahui efektifnya pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh organisasi/instansi pemerintah daerah, maka dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah

daerah pada pelaksanaan penanganan saat terjadinya bencana. Karena segala bentuk upaya yang diambil dan dilakukan saat terjadi bencana dapat berdampak pada tingkat keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat. Dan salah satu bentuk upaya kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana di Indonesia adalah di wilayah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang rawan bencana di Indonesia karena keadaan geologis dan geografisnya sangat memungkinkan untuk terjadinya bencana alam. Wilayahnya terletak diantara $112^{\circ}17'10,90''$ - $122^{\circ}57'00,00''$ BT dan $7^{\circ}44'55,11''$ - $8^{\circ}26'35,45''$ LS. Dengan luas wilayah 351.456,99 hektar, kabupaten Malang menempati urutan kedua terluas setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Timur. Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung baik yang masih aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasinya. Serta dikelilingi gunung berapi dan garis Lempeng Indo Australia membuat Kabupaten Malang berpotensi mengalami bencana geologi. Bencana geologi tersebut antara lain, erupsi gunung berapi, banjir, tsunami, angin puting beliung, gempa bumi, tanah longsor, dan tanah gerak. Disamping itu dengan jumlah penduduk yang tinggi dan terdiri dari berbagai macam karakteristik penduduknya, memungkinkan terjadinya bencana konflik sosial di Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang memiliki 33 kecamatan yang terdiri 390 desa. Menurut Bambang Istiawan selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang menyebutkan bahwa ada sedikitnya 100 desa dari 390 desa tersebut yang rawan terjadi bencana (www.jawapos.com). Ada beberapa desa yang ada di kecamatan

wilayah Kabupaten Malang berpotensi terjadinya longsor dan tanah gerak, seperti Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Tumpang, Wajak, Pakis, Wonosari, Sumberpucung, Bantur, Donomulyo, Tirtoyudo, Ampelgading, Gedangan, dan Sumbermanjing Wetan dikarenakan kondisi wilayahnya yang berada diperbukitan. Kemudian Desa Sitarjo yang berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Pujiarjo yang ada di Kecamatan Tirtoyudo, dan Desa Mangliawan Kecamatan Pakis, merupakan daerah yang rawan terjadi banjir bandang. Malang bagian selatan yang berbatasan langsung dengan pesisir pantai selatan dan berada dijalur subduksi lempeng Eurasia dan Indo-Australia, seperti Kecamatan Ampelgading, Sumbermanjing Wetan, Turen, Bantur, Gondanglegi hingga Donomulyo merupakan daerah yang rawan terjadi gempa bumi tektonik. Tidak hanya gempa tektonik, Kabupaten Malang juga rawan terjadi gempa vulkanik dan erupsi dari 3 gunung api yang aktif, yaitu Gunung Semeru dan Gunung Bromo yang berada di wilayah Malang bagian timur. Serta Gunung Kelud yang merupakan batas wilayah barat Kabupaten Malang.



Gambar 1. Kejadian Bencana Kab. Malang 5 tahun terakhir
Sumber : BNPB, 2019

Kondisi geologis Kabupaten Malang yang luas, bercurah hujan tinggi, dikelilingi pegunungan, dan berada dipesisir pantai selatan menyebabkan Kabupaten Malang sering dilanda bencana. Berdasarkan gambar diagram diatas tampak bahwa kejadian bencana di wilayah Kabupaten Malang masih cukup tinggi terjadi. Bencana hidrometeorologis yang paling sering terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Mulai dari peristiwa puting beliung yang setiap tahunnya masih tinggi terjadi wilayah Kabupaten Malang, diikuti dengan bencana tanah longsor, dan banjir. Menurut data BNPB pada tahun 2014 hingga tahun 2018 terhitung ada 57 kejadian bencana yang mengakibatkan 22 orang meninggal dan hilang, 1.435 orang luka-luka, 25.792 orang menderita dan mengungsi, 3.857 rumah rusak, serta ratusan fasilitas umum rusak (www.bnpb.go.id).

Dari sekian banyak kejadian bencana dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, pada tahun 2014 merupakan salah satu titik terparah terdampak bencana bagi wilayah Kabupaten Malang. Karena ditahun 2014 Gunung Kelud yang sebelumnya meletus pada tahun 2007, kembali menunjukkan aktivitasnya kembali dengan menggugurkan lava yang cukup dahsyat. Gunung Kelud sendiri merupakan salah satu gunung api aktif yang mengancam keselamatan penduduk di Pulau Jawa terutama di Provinsi Jawa Timur. Lokasi Gunung Kelud berada di antara tiga kabupaten, yaitu Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang. Gunung tersebut memiliki ketinggian puncak 1.113,9 meter diatas permukaan laut. Secara morfologis Gunung Kelud ditandai dengan adanya keberadaan bekas kawah yang tumpang tindih berbentuk tapal kuda dibagian tertentu. Hal tersebut merupakan ciri dari akibat terjadinya erupsi secara berulang dan bersifat

eksplosif (Kadarsetia, 2006). Periode ulang aktivitas erupsi Gunung Kelud sendiri berkisar antara 10-15 tahun. Aktivitas erupsi Gunung Kelud dengan ciri khas mengeluarkan lava pijar, hujan batu, hujan pasir, dan hujan debu.

Menurut data dokumen dari BPBD Kabupaten Malang mencatat bahwa Gunung Kelud sudah meletus sebanyak 7 kali. Pertama pada tahun 1901 Gunung Kelud erupsi, kemudian selang kurun waktu 18 tahun berikutnya Gunung Kelud menunjukkan aktifitas erupsinya kembali ditahun 1919. Pada tahun tersebut menjadi salah satu kejadian erupsi gunung api yang paling banyak menelan korban jiwa hingga sebanyak 5.160 jiwa. Serta erupsi tersebut merusak 15.000 hektar lahan produktif milik masyarakat. Selanjutnya ditahun 1951, 1966, 1990, dan tahun 2007 Gunung Kelud erupsi kembali. Bahkan selang waktu 7 tahun berikutnya, ditahun 2014 Gunung Kelud kembali hidup dan memuntahkan butiran lava panas yang cukup dahsyat dalam sejarah erupsi Kelud selain di tahun 1919. Dan dibawah ini merupakan rangkuman data aktivitas erupsi Gunung Kelud dari tahun 1901 hingga terakhir ditahun 2014:

Tabel 1. Aktivitas Gunung Kelud

No.	Tahun	Volume (106 m ³)	Luncuran Awan Panas (km)	Korban (jiwa)
1.	1901	40	?	?
2.	1919	40	37,5	5110
3.	1951	1,8	6,5	7
4.	1966	21,6	31	210
5.	1990	2,4	5	34
6.	2007	2,5	-	-
7.	2014	1,5	3	6*

*Korban dikarenakan tertimpa atap yang roboh bukan karena bencana

Sumber: Data BPBD Kabupaten Malang

Menurut catatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang diterima oleh BPBD Kabupaten Malang, pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 21.15 WIB status Gunung Kelud meningkat dari siaga ke awas. Kemudian tepat pukul 22.50 WIB Gunung Kelud meletus. Kejadian erupsi tersebut berhasil memporandakan bangunan-bangunan yang ada disekitarnya, baik rumah warga, perkantoran, mushola, maupun sekolah. Peningkatan status Gunung Kelud yang dalam jeda waktu yang cukup singkat tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten melaksanakan proses evakuasi korban disekitar lokasi Kelud hanya dalam waktu kurang dari 2 jam dan dengan kondisi ditengah malam. Data dari Kodim 0818 Kabupaten Malang – Batu ada 2.598 rumah di 13 Desa Kecamatan Ngantang dan dua desa di Kecamatan Kasembon, 15 sekolah di Kecamatan Ngantang, Puskesmas di Ngantang, Kantor Kecamatan Ngantang, 13 masjid serta 27 mushola, mengalami kerusakan, serta mengungkapkan kerugian akibat kerusakan rumah ditaksir mencapai Rp 41,9 miliar (www.regional.kompas.com). Sebagian besar bangunan rusak disebabkan oleh atap jebol karena tertimpa bebatuan, pasir dan abu vulkanik. Bangunan yang mengalami kerusakan paling parah terdapat di Dusun Konto, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Kawasan Ngantang merupakan kawasan terdampak pada ring II karena berjarak lebih dari 5 kilometer dari kawah Gunung Kelud. Sedangkan Pujon berada pada area terdampak III. Karena Gunung Kelud sendiri berada di perbatasan Kabupaten Malang.

Dampak erupsi Gunung Kelud yang cukup besar dan menyebar ke wilayah Kabupaten Malang, menjadikan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai

penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat daerah. Hal ini sesuai pada pasal 8 UU RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab dalam pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum serta perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab tersebut, Pemerintah Kabupaten pada tahun 2011 telah mengukuhkan bahwa terdapat Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dengan demikian, BPBD Kabupaten Malang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana erupsi Gunung Kelud.

Pelaksanaan penanggulangan bencana erupsi Gunung Kelud oleh BPBD Kabupaten Malang terbagi pada tiga situasi/kondisi yakni pra bencana, saat bencana, dan pasca terjadinya bencana. Namun, salah satu hal yang terpenting dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Kelud tahun 2014 adalah pada tahap saat bencana atau tanggap darurat. Pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud, BPBD Kabupaten Malang bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya-upaya penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, dan responsif pada saat kejadian meletusnya Gunung Kelud tersebut. Agar dapat dengan segera mengurangi dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Peran BPBD Kabupaten Malang dalam tanggap darurat erupsi Gunung Kelud, yaitu meliputi penyelamatan dan pencarian korban, evakuasi, dan pengelolaan pengungsi, serta logistik cepat di wilayah Kabupaten Malang yang terdampak

erupsi. BPBD Kabupaten Malang dituntut untuk cepat tanggap dalam merespons saat Gunung Kelud mulai meletus atau saat mengeluarkan tanda-tanda erupsi. Serta diperlukan segala upaya koordinasi dan kerjasama agar terwujudnya kesejahteraan sosial bagi korban bencana.

Respons tanggap darurat bencana saat erupsi Gunung Kelud tahun 2014 merupakan upaya yang diutamakan untuk keselamatan manusia, tetapi juga bertujuan untuk mengurangi dampak akibat bencana yang memiliki keterkaitan secara langsung bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu pada tahap tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihak manapun, namun melibatkan kerjasama berbagai sumber daya yang terlibat. BPBD Kabupaten Malang berkoordinasi dan berkolaborasi secara bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Malang yang terkait, bersama pihak swasta, dan masyarakat. Bahkan dibantu oleh POLRI, TNI, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, hingga PMI dan Tim Satuan Respon Cepat (SRC) atau Taruna Siaga Bencana (TAGANA). Sehingga dibutuhkan upaya sinergitas yang efektif dan tepat dalam mencapai tujuan tersebut bersama bantuan dengan pihak lain.

Selain itu, upaya penanganan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud pada tahun 2014 mendapatkan apresiasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa penghargaan khusus dalam kategori pelayanan penanggulangan bencana erupsi gunung api terbaik. Karena berhasil membangun kemandirian dalam penanganan darurat yang cepat tanggap, terpadu, dan sigap melalui pengerahan sumberdaya penanggulangan bencana daerah yang meliputi

Pemerintah Kabupaten Malang, Blitar, dan Kediri, beserta SKPD Provinsi, TNI/POLRI, dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana. Keberhasilan lainnya dari kejadian erupsi Gunung Kelud adalah tidak adanya korban jiwa akibat bencana erupsi melainkan karena tertimpa atap roboh. Penghargaan tersebut diterima oleh Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur pada acara ramah tamah Rakonas BNPB di Jakarta, Selasa malam tanggal 11 Maret 2014.

Pemerintah Kabupaten Malang berupaya untuk menyelenggarakan penanganan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud seoptimal mungkin dan secara cepat dan responsif. Namun, dalam pelaksanaannya menurut Mbah Darmo selaku Koordinator LSM Jangkar Kelud menyebutkan bahwa tidak hal yang sempurna dan pasti ada sedikit permasalahan yang muncul dilapangan, yakni dengan pendeknya jarak waktu dari status awas ke erupsi dan kurangnya sarana transportasi untuk evakuasi, sehingga di Desa Pondokagung, Kecamatan Kasembon masih terdapat masyarakat yang belum terevakuasi pada saat terjadi erupsi. Kemudian, di Kecamatan Kasembon terjadi keterlambatan pasokan bantuan logistik dihari pertama karena jarak dan lokasi yang cukup jauh sehingga yang didahulukan adalah wilayah Kecamatan Pujon dan Ngantang. Tetapi menurut Mbah Darmo hal tersebut bisa segera teratasi dengan adanya komunikasi yang intensif sehingga permasalahan tidak semakin melebar.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka peneliti ingin mengetahui segala bentuk upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten pada saat terjadinya bencana (tanggap darurat) erupsi Gunung Kelud dalam rangka agar cepat tertanganinya korban bencana dan menanggulangi dampak bencana erupsi

Gunung Kelud tersebut. Sehingga peneliti mewujudkannya kedalam sebuah penelitian yang berjudul “Upaya Pemerintah Kabupaten Malang Pada Saat Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada dilatar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diangkat sebagai berikut:

1. Apasajakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud ?
2. Apasajakah faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari laporan penelitian yang berjudul Upaya Pemerintah Kabupaten Malang Pada Saat Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang) adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud

2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Bagi mahasiswa adalah untuk melatih agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama studinya berlangsung guna mengembangkan berbagai teori ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian sehingga diharapkan mampu menemukan, menyimpulkan, dan menganalisis masalah - masalah yang terjadi di lapangan.
 - b. Bagi Perguruan Tinggi adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan administrasi publik dengan memberikan sumbangan pemikiran bagi calon peneliti baru.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat di daerah bencana pada khususnya dalam mengenal dan mengetahui segala upaya yang disusun dan dilakukan pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud oleh Pemerintah Daerah melalui sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar masyarakat dapat berpartisipasi maupun berperan aktif dalam

- penanganan bencana bersama-sama dengan instansi pemerintah yang bersangkutan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih atau kontribusi pemikiran bagi pemerintah bahwa betapa pentingnya memberikan sosialisasi penanganan tanggap darurat bencana terutama pada saat bencana erupsi Gunung Kelud terjadi kepada masyarakat, agar masyarakat turut serta berperan aktif dalam penyusunan strateginya maupun pelaksanaan dari upaya tanggap darurat tersebut.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang hendak melaksanakan penelitian dengan tema atau masalah yang serupa.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang teori - teori dari buku, jurnal, hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang

disajikan pada Bab I. Teori - teori yang peneliti gunakan dalam bab ini antara lain adalah teori - teori mengenai pemerintah daerah, tentang bencana, manajemen bencana, kedaruratan, yang kemudian teori-teori tersebut dianalisis bersama dengan dokumen prosedur tetap – rencana kontijensi Erupsi Gunung Kelud untuk mendukung hasil temuan di lapangan dalam bab IV.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, kemudian penetapan sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, instrumen penelitian, serta tahap terakhir analisis data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan secara nyata hasil temuan peneliti yang ada di lapangan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam empat ini berisi tentang semua uraian-uraian data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Kemudian diakhiri dengan analisis permasalahannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang sekiranya memberi manfaat dalam pelaksanaan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Dianutnya sistem desentralisasi oleh suatu negara, maka lahir pemerintahan di daerah atau menurut beberapa ahli disebut dengan *local government*. Menurut Emil J. Sady (dalam Arenawati 2014:9), *Local government is a political subdivision of a nation or state which is constituted by law and have substantial control over local affairs which has governing body elected or otherwise locally selected*” definisi tersebut menjelaskan bahwa pemerintah lokal adalah bagian politis dari sebuah negara, dimana diatur secara hukum dan memiliki kewenangan mengawasi masalah-masalah lokal dimana penguasa pemerintahan dipilih atau diseleksi oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu pemerintah lokal diadakan untuk menyelesaikan masalah-masalah lokal wilayah yang bersangkutan walaupun diatur oleh pemerintah pusat.

Di Indonesia pemerintah lokal disebut dengan pemerintah daerah. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.32 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa pemerintah daerah merupakan unsur eksekutif yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sedangkan pada pasal 1

ayat 2 pemerintahan daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut yang termasuk dalam pemerintahan daerah adalah lembaga eksekutif yaitu pemerintah daerah dan lembaga legislatif yaitu DPRD.

2. Pemerintah Daerah dalam Manajemen Bencana

Terdapatnya mandat yang melekat dalam undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan daerah memiliki kebijakannya sendiri untuk memulai dan melaksanakan kebijakan daerah serta membawa unit administrasi dan pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat setempat. Dalam hal manajemen bencana, undang-undang tersebut telah mendukung lahirnya regulasi tentang penanganan bencana, yaitu Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menempatkan pemerintahan daerah dan masyarakat dalam posisi yang memainkan peran penting dalam menangani bencana. Banyaknya perhatian baru terhadap manajemen bencana di tingkat pemerintah daerah disebabkan oleh alasan-alasan berikut ini, yaitu Pertama, manajemen bencana diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Kedua, adanya pemahaman yang berkembang bahwa pemerintah daerah memainkan peran yang paling aktif dalam operasi darurat bencana. Ketiga, adanya pergeseran pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dalam hal kegiatan bencana. Keempat,

adanya kebutuhan yang berkembang untuk mengadopsi dan mengembangkan rasa lokalitas dalam perencanaan darurat bencana karena pemerintah daerah memegang tanggung jawab yang sangat penting dalam manajemen darurat bencana serta lebih cepat dan lebih efektif menanggapi bencana.

Kusumasari (2014:61) menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan pemerintah daerah dalam melaksanakan penanganan bencana, yaitu:

- a. Mengidentifikasi orang dan wilayah yang rentan bencana dalam lingkup kabupaten
- b. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat menyadari potensi dampak bencana alam
- c. Membagikan saran dan panduan praktik yang baik kepada masyarakat untuk mitigasi bencana
- d. Menjaga hubungan dengan para pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan, kesehatan, dan kesejahteraan dengan mengeluarkan peringatan atau sistem pengendalian massa dan kebakaran
- e. Memastikan bahwa anggota masyarakat menerima pelatihan first aid atau pertolongan pertama yang sesuai
- f. Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui kegiatan yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat
- g. Mengidentifikasi rute evakuasi dan lokasi tempat yang aman serta lokasi pengungsi

Keterlibatan pemerintah tingkat daerah dalam manajemen bencana merupakan isu penting untuk menanggulangi bencana. Agar menjadi lebih efektif dalam mengelola bencana, maka pemerintah pusat dan provinsi harus mendesentralisasikan kekuasaan pembuatan keputusan kepada pemerintah daerah. Selain itu, program manajemen bencana dapat ditentukan oleh pemerintah pusat, namun program tersebut harus dirancang sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Kusumasari (2014:71)

menambahkan bahwa keberadaan pemerintah daerah dalam manajemen bencana dimaksudkan untuk menyiapkan sebuah rencana siap siaga bencana dan mengadakan pelatihan terhadap kondisi darurat yang dirancang sesuai dengan kondisi lokal, terlepas dari adanya keseragaman rencana pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Serta untuk menyukseskan upaya mitigasi dan perencanaan manajemen bencana, pemerintah daerah memiliki tugas untuk menyertakan partisipasi masyarakat lokal agar mereka mampu membangun kembali kehidupan mereka sendiri dan merespons bencana dengan cara yang tepat.

Pemerintah daerah wajib mengelola bencana pada jam atau hari-hari pertama saat bencana tersebut terjadi atau sampai bantuan datang. Oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai yang bersumber dari APBD. Dana siap pakai merupakan dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk kegiatan pra bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.

B. Bencana

1. Pengertian Bencana dan Jenis Bencana

Definisi umum tentang bencana yang banyak digunakan para ilmuwan adalah definisi bencana menurut *International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR-2004)* yang dikutip oleh Nurjanah (2011:10-11), yaitu “*A serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic, or environmental losses which*

exceed the ability of the affected community/society to cope using its own resources” yang memiliki makna bahwa bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan. Sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, dan kerusakan lingkungan. Kejadian tersebut terjadi diluar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya. Disamping itu, ada beberapa pendapat tentang bencana yang dikutip dari buku yang berjudul “Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal” yang ditulis oleh Kusumasari (2014: 3-5), yaitu sebagai berikut:

- a. Parker (1992) menggambarkan bencana sebagai sebuah kejadian alam atau kejadian hasil tangan manusia yang tidak biasa, termasuk kejadian yang disebabkan oleh kegagalan sistem teknologi yang melemahkan kapasitas respon dari komunitas manusia, kelompok individu, atau lingkungan alam dan yang menyebabkan kerusakan besar, kerugian ekonomi, kehancuran, cedera, dan/atau kematian.
- b. *Centre for Research on the Epidemiology of Disasters* (CRED) di Belgia, mendefinisikan bencana sebagai situasi atau kejadian yang melemahkan kapasitas lokal sehingga membutuhkan bantuan eksternal dari level nasional atau internasional. Bencana merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksikan dan terjadi secara tiba-tiba yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang besar serta penderitaan bagi umat manusia.

c. Ensiklopedia Manajemen Bencana (*Indian Institute of Disaster Management*, 2007) mengartikan bencana sebagai kejadian yang muncul dengan sedikit atau tanpa peringatan sebelumnya, yang menyebabkan gangguan atau ancaman serius bagi kehidupandan mungkin kematian atau cedera bagi sejumlah besar manusia. untuk itu diperlukan mobilisasi usaha dalam mengakses pelayanan darurat secara normal menurut hukum.

Menurut Nurjanah (2011:11) terdapat beberapa kriteria pada kondisi/kejadian tertentu yang dapat disebut sebagai bencana, yaitu:

- a. Adanya suatu peristiwa,
- b. Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia,
- c. Terjadi secara tiba-tiba (*sudden*) akan tetapi dapat juga terjadi secara perahalan-lahan atau bertahap (*slowly*),
- d. Mengakibatkan hilangnya korban jiwa, harta benda, kerugian sosial-ekonomi, kerusakan lingkungan, dan lain-lain,
- e. Berada di luar kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya.

Nurjanah (2011:21) menjelaskan bahwa secara umum penyebab terjadinya peristiwa bencana adalah karena adanya interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Pada Undang-Undang No.24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa definisi ancaman merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan bencana. Sedangkan, kerentanan terhadap dampak atau resiko bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak dari suatu bahaya tertentu.

Menurut Badan Koordinasi Nasional atau Bakornas (2007:2) secara umum, “Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan/atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana, prasarana, dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat”. Sejalan dengan pengertian tersebut, definisi bencana juga terdapat pada pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang menjelaskan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Menurut Simatupang (1989: 10) berdasarkan atas besarnya peristiwa bencana dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Bencana Lokal atau Bencana Regional
Merupakan suatu rangkaian peristiwa bencana yang tidak begitu besar, yang pada umumnya tidak berpengaruh pada areal yang lebih luas dan dapat dikendalikan dan ditanggulangi secara local oleh petugas-petugas di tingkat kabupaten atau provinsi
- b. Bencana Nasional
Merupakan suatu peristiwa bencana yang cukup besar serta pada umumnya berpengaruh pada areal yang lebih luas, dan sulit untuk dikendalikan dan ditanggulangi secara local maupun regional dan perlu mendapat bantuan dari pusat, misalnya meletusnya Gunung Galunggung dan Tsunami Aceh.

Sebuah bencana lokal tidak dapat disebut sebagai bencana nasional jika satuan unit respon bencana pemerintah provinsi dan lokal/daerah mampu

mengatasi semua konsekuensinya. Namun jika pemerintah daerah tidak mampu mengatasi masalah dan membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat, maka bencana tersebut menjadi tanggung jawab pusat. Di dalam situasi ketika pemerintah pusat tidak mampu mengelola semua konsekuensi dari kejadian yang merugikan itu, maka kejadian tersebut menjadi bencana internasional yang membutuhkan intervensi secara internasional dan bantuan-bantuan lainnya.

Nurjanah (2011:22-23) juga mengelompokkan jenis sumber ancaman bencana menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Sumber ancaman klimatologis, merupakan sumber ancaman yang disebabkan oleh pengaruh iklim. Sumber ancaman ini dapat berupa tinggi dan rendahnya curah hujan, tinggi dan derasnya ombak pantai, arah angin, serta peristiwa alam lainnya yang sangat berkaitan erat dengan iklim dan cuaca. Misalnya, banjir rob, kekeringan, angin topan, petir, abrasi pantai, dan badai.
- b. Sumber ancaman geologis, merupakan sumber ancaman yang terjadi karena pengaruh dinamika bumi, seperti jenis dan materi penyusun bumi, serta pergerakan lempeng bumi. Contoh dari ancaman ini misalnya, letusan gunung berapi, tsunami, gempa bumi, tanah gerak, dan tanah longsor.
- c. Sumber ancaman industri dan kegagalan teknologi, merupakan ancaman akibat adanya kegagalan teknologi maupun kesalahan saat proses industri, mulai dari proses persiapan produksi, proses pembuangan

limbah, maupun polusi yang ditimbulkan oleh proses industri. Contohnya, kebocoran gas, pencemaran limbah industri, serta kebakaran karena ledakan proses pengolahan industri.

- d. Sumber ancaman ulah manusia, berasal dari perilaku atau ulah manusia baik dalam pengelolaan lingkungan, pengelolaan sumber daya, permasalahan ras, perebutan wilayah, dan kepentingan lainnya, serta dapat diakibatkan oleh adanya suatu kebijakan yang berdampak pada suatu komunitas tertentu. Misalnya, seperti konflik antar suku, konflik pelepasan wilayah perbatasan, dan penggusuran rumah.

Sedangkan menurut Bakornas (2007:7), terdapat 3 jenis ancaman bencana seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Klasifikasi Bencana Berdasarkan Faktor Penyebab Terjadinya

Bencana dari Alam	Bencana Sosial Karena Ulah Manusia	Bencana Campuran Faktor Alam dan Ulah Manusia
Gempa Bumi Tsunami Gunung Api Angin Topan dan Badai Longsor Kekeringan	Konflik Perang Serangan Teroris Kegagalan Teknologi Hama Penyakit	Banjir Longsor Kebakaran Hutan Kekurangan Pangan

Sumber: Bakornas, 2007

Klasifikasi ancaman bencana menurut diatas memiliki kesamaan dengan jenis bencana yang terdapat pada UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ada jenis bencana Alam, bencana campuran, dan bencana sosial. Ketiga jenis bencana tersebut diklasifikasikan berdasarkan faktor penyebab terjadinya. Bencana Alam disebabkan oleh kejadian-kejadian

alami. Bencana Sosial disebabkan karena perbuatan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan bencana campuran terjadi karena faktor manusia dan sekaligus faktor alam. Dibawah ini merupakan uraian secara umum tiga jenis bencana tersebut, yaitu:

a. Bencana Alam

Menurut Kusumasari (2014:11), bencana alam merupakan kejadian bencana akibat dari bahaya alam yang mungkin merupakan hasil dari dalam (dibawah permukaan bumi), dari luar atau eksternal (topografi), cuaca (meteorologi/hidrometeorologi), dan fenomena biologis. Bencana alam terjadi diluar kontrol manusia dan sering dianggap sebagai “tindakan Tuhan (*act if God*)”. Dengan demikian bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

b. Bencana Sosial

Bencana sosial adalah suatu kejadian bencana yang merupakan hasil dari keputusan atau perbuatan manusia. Menurut *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (2003) yang dikutip oleh Kusumasari (2014:11) bencana sebagai akibat perbuatan manusia ditujukan pada kejadian yang bukan merupakan bencana alam. Dan secara konseptual, bencana sosial yang terjadi merupakan hasil dari ancaman sosial dan kerentanan sosial (baik fisik maupun psikologis) dalam komunitas masyarakat. Ancaman sosial itu sendiri merupakan

suatu fenomena, bahaya, maupun resiko yang dapat menimbulkan bencana, sehingga disebut sebagai bencana non alam atau sosial. Bencana sosial bisa bersifat mendadak maupun terjadi secara berangsur, yang menyebabkan kekacauan dan kerugian secara meluas terhadap kehidupan, materi, serta lingkungan. Berikut ini adalah beberapa peristiwa yang termasuk kedalam bencana sosial menurut Bakornas (2007:31) konflik sosial atau peperangan, serangan teroris dalam bentuk serangan bom dan sabotase-sabotase, dan kelaparan/kerawanan pangan yang disebabkan oleh tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang mengakibatkan keterbatasan daya beli masyarakat, terjadinya perang, hambatan perdagangan, pembangunan pertanian yang tidak memadai, dan sebagainya.

c. **Bencana Campuran atau Hibrida**

Bencana campuran merupakan bencana yang muncul karena adanya keterkaitan antara hubungan antropogenik (manusia) dan kejadian alam. Contoh dari bencana campuran adalah menyebarnya suatu wabah penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata dan jauh melebihi keadaan biasanya, kebakaran hutan dan lahan dalam skala luas maupun kecil yang disebabkan oleh manusia untuk membuka lahan perkebunan baru, kekeringan lahan dan kelaparan akibat perubahan cuaca ekstrem kemarau panjang dan kurangnya distribusi air bersih maupun bahan pangan, serta terjadinya banjir dan longsor akibat pengalihfungsian lahan terbuka dan lingkungan

perkotaan yang terlalu padat sehingga tidak adanya lahan serapan air. Beberapa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah bencana karena dapat menimbulkan dampak kerusakan infrastruktur bahkan menimbulkan korban jiwa.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa bencana merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena bertemunya ancaman dari luar terhadap kehidupan manusia dengan kerentanan, yaitu kondisi yang melemahkan masyarakat untuk menangani bencana. Singkatnya ketika ancaman berdampak merugikan manusia dan lingkungan, dan tidak adanya kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya maka peristiwa itu disebut dengan bencana. Secara umum bencana dapat terjadi karena adanya 2 (dua) faktor, yaitu bencana karena faktor alam dan bencana karena perbuatan manusia. Bencana karena faktor alam (bencana alam) merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi karena kondisi alam yang dapat menimbulkan kerusakan secara alami. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan lain-lain. Sedangkan, bencana karena manusia (bencana sosial) merupakan rangkaian peristiwa atau kerusakan yang terjadi akibat dari perbuatan manusia, seperti peperangan karena konflik sosial dan teror masyarakat. Kedua bencana tersebut membawa dampak pada penderitaan masyarakat serta dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana.

2. Dampak Bencana

Menurut Nurjanah (2011:33-35), dampak bencana merupakan akibat yang timbul karena adanya peristiwa bencana. Dampak bencana dapat berupa korban jiwa, kerusakan sarana dan prasarana, kerusakan lingkungan dan ekosistem, kehilangan harta benda dan penghidupan, gangguan pada stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, serta dampak lainnya yang mengakibatkan turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, secara serius terjadinya peristiwa bencana dapat mengganggu inisiatif-inisiatif pembangunan dalam beberapa cara, seperti berikut ini:

- a. Hilangnya sumber-sumber daya, yaitu ketika terjadi bencana maka dapat memungkinkan hilangnya sumber-sumber daya pembangunan yang dapat menghapus produk-produk investasi negara. Hal ini dikarenakan bencana dapat menyebabkan kerugian produksi dan penyediaan pelayanan, mempengaruhi tingkat inflasi, menurunnya cadangan uang negara, dan menyebabkan kerugian-kerugian secara tidak langsung, misalnya posisi hutang negara meningkat saat badan pelayanan hutang meningkat, serta hilangnya pertumbuhan ekonomi.
- b. Gangguan terhadap program pemerintah, bencana dapat mengganggu program dan kebijakan pemerintah yang sedang berlangsung dan membelokkan sumber daya keuangan dari alokasi penggunaan-penggunaan yang telah direncanakan sebelumnya.
- c. Berpengaruh pada iklim investasi, jika bencana terjadi berulang-ulang dalam suatu periode, maka akan berpengaruh negatif pada insentif

investasi yang berkelanjutan. Para investor memerlukan iklim investasi yang stabil dan kepastian untuk mendorong menginvestasikan modalnya. Sehingga mengakibatkan turunnya minat investasi para investor di suatu negara yang sedang tertimpa bencana. Bencana itu sendiri juga dapat mengakibatkan tekanan pada tuntutan pasar dan berakibat pada ketidakstabilan pertumbuhan iklim investasi maupun pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

- d. Berpengaruh pada sektor non-formal, dalam hal ini bencana dapat menekan ekonomi non-formal melalui biaya-biaya langsung, yakni berupa korban materi atau hilangnya rumah dan harta benda. Serta biaya-biaya tidak langsung yang berupa hilangnya pendapatan dan mata pencaharian/pekerjaan. Dan seringkali perkiraan anggaran untuk bencana sangat sedikit, sehingga saat terjadi bencana besar langsung menekan sektor non-formal.
- e. Destabilisasi politik, suatu bencana besar atau bahkan bencana yang terjadi secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan terpusatnya perhatian pemerintahan terhadap proses penanggulangan bencana yang memakan waktu tidak sedikit mulai dari proses evakuasi korban, pengelolaan, dan penyaluran dana bantuan. Serta proses pemulihan pasca bencana yang secara utuh seperti sediakala juga membutuhkan perhatian, waktu dan biaya dari pemerintah yang tidak sedikit.

Sedangkan menurut Sudibyakto (2005:80), secara umum ada 4 pengelompokkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, yaitu:

- a. Perubahan lingkungan biofisik, seperti perubahan sistem akifer air tanah dengan ditemukan air tanah dipermukaan dan atau mengeringnya secara drastis keberadaan sumur penduduk, perubahan pola penggunaan lahan terutama pada kawasan permukiman di daerah bencana.
- b. Perubahan lingkungan sosial-ekonomi dan politik serta keamanan, seperti meningkatnya jumlah korban meninggal maupun korban yang selama ini masih hidup ditenda-tenda pengungsian, penurunan status gizi, traumatik, kegelisahan, kemiskinan, dan hilangnya rasa kepercayaan pada pemerintah karena pemerintah dianggap tidak mampu mengelola bencana dengan baik, ketidakmampuan mengelola jumlah korban sakit, pengungsi, maupun distribusi logistik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kekurangtanggapan mengelola kerusakan lingkungan akibat bencana
- c. Aspek kesehatan masyarakat, yang sangat membutuhkan fasilitas kesehatan (dokter, obat-obatan, sarana dan prasarana kesehatan lainnya)
- d. Perubahan ketersediaan keuangan daerah dalam mengelola situasi krisis tahap tanggap darurat pasca bencana.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa bencana alam maupun bencana sosial dapat membawa pengaruh besar bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Seperti, pada sektor perekonomian, bencana dapat menekan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan menurunnya tingkat investasi serta menyebabkan hilangnya mata pencaharian yang berdampak pada ketersediaan barang pada pasar. Sedangkan pada sektor sosial, yakni bertambahnya jumlah korban jiwa baik yang meninggal maupun yang luka-luka, serta menambah banyaknya penduduk miskin dan pengangguran akibat dari hilangnya harta benda dan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, terjadinya bencana berdampak pada penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan

lingkungan, sarana dan prasarana umum yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat (*welfare crisis*).

C. Manajemen Bencana (*Disaster Management*)

1. Pengertian dan Tahapan Manajemen Bencana (*Disaster Management*)

Manajemen bencana didefinisikan sebagai istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk merespons bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana yang merujuk pada manajemen resiko dan konsekuensi bencana. Manajemen bencana meliputi rencana, struktur, serta pengaturan yang dibuat dengan melibatkan usaha dari pemerintah, sukarelawan, dan pihak-pihak swasta dengan cara yang terkoordinasi dan komprehensif untuk merespon seluruh kebutuhan darurat. Oleh karena itu, manajemen bencana terdiri dari semua perencanaan, pengorganisasian, dan mobilisasi sumberdaya yang dibutuhkan untuk menangani semua fase bencana sebagai peristiwa alam. Wolensky dalam Purnomo dan Sugiantoro (2010:87), menunjukkan upaya bantuan manajemen bencana melalui empat tahap, yaitu tahap sebelum bencana (*mitigation and preparedness planning*), tahap tanggap darurat (*immediate pre and post impact*), tahap pemulihan jangka dekat (2 tahun), dan tahap pemulihan jangka panjang (10 tahun). Waught dalam Purnomo dan Sugiantoro (2010:87) juga membagi tahapan manajemen menjadi empat tahap, yaitu tahapan peringatan (*prevention*), perencanaan dan persiapan (*planning and preparedness*), tanggapan (*response*), dan tahap pemulihan (*recovery*).

Menurut Moe dan Pathranarakul (2006) yang dikutip oleh Ulum (2014:13), Manajemen bencana meliputi lima tahap umum, yakni prediksi, peringatan, bantuan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Disaster Management Phases	Time	Activities	Approach
Prediction	Before	Mitigation	Pro-active
		Preparedness	
Warning	During	Response	Reactive
Emergency Relief			
Rehabilitation (short-term)	After	Recovery	
Reconstruction (long-term)			

Gambar 2. Tahapan Manajemen Bencana

Sumber : Moe dan Pathranarakul (dalam Ulum, 2014:13)

Sedangkan, pada siklus manajemen bencana modern (saat ini), memiliki 4 tahapan aktivitas manajemen bencana dan terdapat adanya standar global serta upaya yang lebih terorganisir untuk mengatasi penanggulangan bencana. Siklus manajemen bencana modern tersebut diterapkan di Indonesia dan tercantum dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berikut merupakan gambar sederhana dari siklus manajemen bencana tersebut, yaitu



Gambar 3. Siklus Tahapan Manajemen Bencana

Sumber : Bakornas, 2007

a. Mitigasi (*Mitigation*)

Mitigasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. Mitigasi sering juga disebut sebagai pencegahan atau pengurangan resiko, dan dianggap sebagai landasan manajemen bencana. Menurut *Federal Emergency Management Agency* (FEMA) (dalam Kusumasari, 2014: 22), mitigasi sebagai sebuah langkah yang diambil secara independen dari situasi darurat atau bencana yang sebenarnya harus berfokus pada langkah-langkah pencegahan karena efisiensi langkah-langkah darurat sangat terbatas untuk menghindari banyaknya kehilangan manusia dan ekonomi. Tujuan dari mitigasi ini adalah untuk mengurangi kemungkinan resiko, mengurangi konsekuensi resiko, menghindari resiko, penerimaan resiko, serta transfer, pembagian, atau penyebaran resiko bencana.

b. Kesiapsiagaan (*Preparedness*)

Kusumasari (2014:24) mendefinisikan “Kesiapsiagaan sebagai perencanaan, identifikasi sumber daya, sistem peringatan, pelatihan, simulasi, dan tindakan prabencana lainnya yang diambil untuk tujuan utama meningkatkan keamanan dan efektivitas respons masyarakat selama bencana”. Kesiapsiagaan berkaitan dengan kegiatan dan langkah-langkah yang diambil sebelum terjadinya bencana untuk memastikan adanya respons yang efektif terhadap dampak bahaya, termasuk dikeluarkannya peringatan dini secara tepat waktu dan efektif. Kesiapsiagaan dan mitigasi berada pada fase yang sama, yakni fase prabencana, namun keduanya memiliki perbedaan yang utama. Mitigasi menganggap bencana dapat dicegah atau dampaknya dapat dikurangi. Disisi lain, kesiapsiagaan menganggap bahwa bencana akan terjadi dan masyarakat harus siap untuk menghadapinya.

c. Tanggap Darurat (*Emergency Response*)

Tanggap darurat merupakan kegiatan yang dilakukan dengan segera selama bencana terjadi. Tujuan pada tahap ini adalah untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi kerusakan harta benda, dan meningkatkan pemulihan awal dari insiden bencana. Kusumasari (2014:28) menyatakan bahwa “Fungsi respons dalam manajemen bencana adalah tindakan yang diambil untuk membatasi cedera, hilangnya nyawa, serta kerusakan harta benda dan lingkungan”. Kegiatan

ini dilakukan melalui peringatan, evakuasi, dan penyediaan tempat penampungan (*shelter*).

d. Pemulihan (*Recovery*)

Recovery merupakan kegiatan mengembalikan sistem infrastruktur kepada standar operasi minimal dan panduan upaya jangka panjang yang dirancang untuk mengembalikan kehidupan ke keadaan dan kondisi normal atau keadaan yang lebih baik setelah bencana. Pemulihan dimulai sesaat setelah bencana terjadi. Menurut Coppola (dalam Kusumasari, 2014: 30) tahap pemulihan bencana adalah saat ketika negara, masyarakat, keluarga, dan individu memperbaiki atau merekonstruksi kembali apa yang telah hilang akibat bencana dan mengurangi resiko bencana yang serupa di masa depan. Kegiatan pemulihan ini meliputi keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana, dengan maksud untuk memulihkan atau meningkatkan kondisi kehidupan seperti saat prabencana dari masyarakat yang terkena dampak. Pada saat yang sama kegiatan ini mendorong dan memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan untuk mengurangi resiko bencana. Dalam tahap ini dapat dilakukan kegiatan, seperti penilaian kerusakan, pemindahan puing-puing reruntuhan, dan pendirian pusat-pusat bantuan bencana.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan beberapa tokoh diatas menjelaskan bahwa siklus penanganan bencana (*disaster management*) merupakan tindakan yang terdiri dalam tiga tahapan, yaitu tindakan sebelum terjadi bencana (pra bencana), waktu terjadi bencana (saat sedang terjadi),

serta sesudah bencana terjadi (pasca bencana). Siklus ini dimulai dari waktu sebelum terjadinya bencana berupa kegiatan mitigasi (pengurangan resiko bencana) dan kesiapsiagaan. Pada saat terjadi bencana berupa kegiatan tanggap darurat, dan selanjutnya pada saat setelah terjadinya bencana berupa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan). Serta peristiwa bencana memiliki karakteristik yang berbeda, namun pada hakikatnya mempunyai konsep siklus penanganan bencana yang sama dalam manajemen bencana.

2. Faktor Penentu Pelaksanaan Manajemen Bencana

Pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 mengamanatkan untuk membangun Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang dibangun berdasarkan 6 (enam) sub-sistem, yaitu legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, penyelenggaraan, dan peningkatan kapasitas. Dari semua komponen tersebut harus dikoordinasikan untuk menghasilkan upaya-upaya terbaik. Tumpang tindih tugas dan tanggung jawab harus dihindari, sebaliknya tidak boleh ada kegiatan penting yang tertinggal agar korban bencana dapat dilayani atau diberikan perlindungan dan hak-hak dasarnya yang mengacu pada standar pelayanan umum.

Nurjanah (2011:95-98) menjelaskan secara lebih rinci tentang enam sub-sistem diatas, yaitu sebagai berikut:

a. Legislasi

Legislasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dari tingkat nasional sampai dengan daerah, bahkan hingga tingkat masyarakat atau komunitas.

b. Kelembagaan

Lembaga kebencanaan dibentuk secara permanen/definitif ditingkat pusat dan daerah yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan kerja baik secara horizontal maupun secara vertikal. Hubungan kerja secara horizontal berkaitan tentang hubungan dengan lembaga lain yang bersifat koordinasi. Sedangkan secara vertikal bersifat komando (*board system*) ditingkat pusat, termasuk penerapan *Incident Command System* (ICS) di lokasi bencana yang dilaksanakan pada situasi darurat bencana.

c. Perencanaan

Perencanaan berkaitan dengan pemanduan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan (nasional dan daerah) dan rencana kerja pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, serta penyusunan rencana aksi (nasional/daerah) dalam penanggulangan resiko bencana.

d. Pendanaan

Pendanaan penanggulangan bencana berkaitan dengan penyediaan dan pengaturan dana untuk penanggulangan bencana berupa, Dana Anggaran yang berasal dari APBN/APBD untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga terutama untuk kegiatan pengurangan resiko bencana, Dana Kontinjensi untuk penanganan kesiapsiagaan, Dana *On-Call* (siap pakai) untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana, Dana Pemulihan pasca-bencana yang dialokasikan untuk rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana, serta Dana Bantuan Masyarakat yang bisa berasal dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri.

e. Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*)

Peningkatan kapasitas berkaitan dengan program/kegiatan untuk meningkatkan dan membangun kapasitas bangsa/masyarakat untuk tangguh menghadapi ancaman bencana. Sasaran akhirnya adalah agar masyarakat mampu mengantisipasi - siap siaga menghadapi bencana, mampu menangani kedaruratan (minimal mampu menolong diri sendiri/keluarga), dan mampu bangkit kembali atau memulihkan diri dari dampak bencana.

f. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada fase pra bencana dan pasca bencana dititikberatkan pada fungsi koordinasi, sedangkan pada saat tanggap darurat kejadian bencana dilakukan melalui fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan. Pemerintah sendiri telah menetapkan berbagai kebijakan dalam merepons persoalan kebencanaan di Indonesia, termasuk untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing

Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kusumasari (2014:33-34) juga menyimpulkan bahwa ada 10 faktor penting dalam manajemen bencana, yaitu:

- a. Pengaturan Kelembagaan yang efektif merupakan salah satu faktor penentu yang sangat penting dalam keberhasilan manajemen bencana, terutama pada kondisi ketika pemerintah yang bertanggung jawab tidak memiliki otoritas atau dapat menyebabkan ketidakjelasan distribusi otoritas dan pembuatan keputusan, terutama dalam hal bantuan darurat dan rehabilitasi. Sehingga harus ada hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan dengan baik.
- b. Koordinasi dan kolaborasi, yaitu terjalinnya suatu hubungan kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi diantara pemangku kepentingan utama (pemerintah), LSM/organisasi, proyek swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan manajemen bencana.
- c. Undang-undang dan peraturan yang mendukung akan berdampak positif pada keberhasilan manajemen bencana. Oleh karena itu, undang-undang dan peraturan tersebut harus ditetapkan dan diberlakukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam manajemen bencana.
- d. Sistem manajemen informasi yang efektif. Dalam hal ini informasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan, peringatan dini, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Oleh

karena itu, sistem manajemen informasi yang efektif dan penyebaran informasi penting diantara para pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk pencapaian hasil yang maksimal dalam manajemen bencana.

- e. Kompetensi manajer dan anggota tim, berkaitan dengan tugas pemerintah dalam menyediakan tenaga ahli yang memiliki tingkat kompetensi yang tinggi untuk memberikan pelatihan pengembangan yang efektif kepada masyarakat yang rentan bencana atau sebagai sasaran yang dituju agar mereka mengatasi krisis dan situasi darurat pada saat proses kesiapsiagaan maupun saat tanggap darurat terjadi bencana.
- f. Konsultasi yang efektif diantara para pemangku kepentingan dengan masyarakat yang menjadi sasaran atau terdampak bencana, yang artinya bahwa diperlukan partisipasi dari semua pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi dan rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- g. Mekanisme komunikasi yang efektif, yaitu digambarkan sebagai hubungan kerja kolaboratif antar berbagai pemangku kepentingan yang merupakan faktor utama keberhasilan, selain/diluar staf pemerintahan.
- h. Tujuan dan komitmen harus didefinisikan secara jelas, serta pemangku kepentingan utama harus membuat kesepakatan dan komitmen kerja untuk melaksanakan tujuan tersebut.
- i. Manajemen logistik, yaitu berhubungan langsung dengan manusia, keahlian, dan teknologi yang sangat diperlukan pada semua fase bencana (sebelum, selama, dan sesudah bencana). Seringkali ditemukan masih

adanya permasalahan/hambatan dalam hal transportasi dan buruknya infrastruktur lokasi bencana, sehingga sangat diperlukan manajemen logistik yang benar-benar efektif dan tidak tumpang tindih.

- j. Mobilisasi dan penyaluran sumber daya yang memadai, yaitu suatu proses perencanaan dan penentuan sumber daya (manusia, peralatan, dan material) apa saja yang dibutuhkan dan dalam jumlah yang seberapa besar untuk dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan manajemen bencana.

D. Tanggap Darurat (Kedaruratan)

1. Manajemen Kedaruratan

Manajemen Kedaruratan merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanganan kedaruratan pada saat pada saat terjadi bencana. Pada tahap ini, kunci utama sebuah respons/tanggap darurat terhadap bencana alam dapat meliputi kegiatan kesiapsiagaan di daerah rawan, keterlibatan masyarakat lokal, koordinasi penilaian kebutuhan, serta berbagi informasi antara para pemangku kepentingan dan ahli-ahli logistik.

Proses tanggap darurat terhadap bencana dimulai segera setelah tampak jelas bahwa bencana akan segera terjadi dan berlanjut sampai keadaan darurat dinyatakan berakhir. Menurut Nurjannah dkk (2011:55), Tanggap darurat merupakan tahapan yang paling kompleks dari keempat tahapan manajemen bencana, karena tanggap darurat dilakukan pada saat periode *stress* yang sangat tinggi, lingkungan yang sangat terbatas, serta waktu dan informasi yang terbatas pula. Tanggap darurat tidak hanya meliputi kegiatan pembatasan pada hal-hal seperti, cedera, hilangnya nyawa, serta kerusakan

harta benda, tempat tinggal, dan lingkungan. Tetapi, juga mencakup sistem yang dikembangkan untuk mengkoordinasikan dan mendukung upaya-upaya tersebut. Kegiatan tanggap darurat juga termasuk untuk menghidupkan kembali infrastruktur-infrastruktur penting dengan sangat cepat. Misalnya, membuka kembali jalur transportasi, pemulihan jaringan komunikasi dan listrik, serta juga memastikan pendistribusian makanan dan air bersih. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi cedera lebih lanjut dan hilangnya nyawa, serta mempercepat proses kembalinya masyarakat untuk berfungsi secara normal.

Adapun beberapa tujuan utama manajemen kedaruratan menurut Nurjanah (2011-56), yaitu:

- a. Mencegah bertambah besarnya jumlah korban dan kerusakan/kerugian.
- b. Meringankan penderitaan dengan kegiatan tanggap darurat dan bantuan darurat, masyarakat/korban bencana mendapatkan perlindungan dan hak-hak dasarnya yang mengacu pada standar pelayanan minimum. Melalui kegiatan ini para korban bencana/masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya untuk dapat mempertahankan hidup meskipun dalam kondisi minim, antara lain berupa bantuan pangan dan non-pangan, pelayanan kesehatan dan hunian sementara, air bersih dan sanitasi.
- c. Stabilisasi kondisi korban/pengungsi, yaitu kondisi korban/pengungsi diupayakan menjadi stabil melalui bantuan darurat yang diberikan secara berkesinambungan secara memadai.
- d. Mengamankan asset vital atau fasilitas kunci. Pengamanan *asset*/fasilitas kunci di prioritaskan untuk *asset-asset* yang terkait dengan hajat hidup banyak orang, misalnya instalasi air minum, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi.
- e. Menyediakan pelayanan dasar dalam penanganan pasca-darurat. Pelayanan dasar diberikan selama darurat dan penanganan pasca-darurat mencakup perbaikan prasarana/sarana dan fasilitas umum/sosial serta rehabilitasi psiko-sosial.
- f. Meringankan beban masyarakat setempat. Hal ini dimaksud sebagai upaya atau kegiatan untuk menghindari agar masyarakat

(yang tidak terkena bencana) tidak terbebani dengan melampaui kemampuan sumberdaya mereka. Adakalanya masyarakat yang tidak terkena bencana bisa jadi menerima beban ketika mereka menerima kehadiran korban bencana/pengungsi dari daerah lain yang terkena bencana.

- g. Pada saat memenuhi kebutuhan dasar selama darurat, perlu di perhatikan hak-hak kelompok rentan (orang jompo, ibu hamil, balita, orang sakit, orang cacat, orang lanjut usia, dan juga kelompok termarjinalkan). Penanganan darurat tidak boleh membuat masalah baru dengan membedakan perlakuan. Demikian juga pemenuhan kebutuhan khusus bagi wanita (misalnya pembalut wanita, kamar kecil, WC dan lain-lain) harus disesuaikan dengan kebutuhan. Terdapat survei yang menyebutkan bahwa MCK bagi pria dan wanita adalah 1:3 (1 untuk pria dan 3 untuk wanita).

2. Periode Tanggap Darurat

Selama proses pelaksanaan tanggap darurat, menurut Nurjanah (2011) kondisi kedaruratan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga periode, yaitu:

a. Periode Panik

Pada periode ini terjadi suasana panik, kacau balau, bingung, saling menyalahkan, dan situasinya sangat mencekam. Informasi sulit diperoleh atau bisa memperoleh informasi sumbernya tidak jelas, sarana komunikasi untuk memperoleh sumber yang dapat dipercaya pun rusak serta prasarana dan sarana vital hancur. Kegiatan pada periode ini berupa evakuasi korban meninggal (peserta pemakamannya) dan luka-luka, pelayanan medis/ kesehatan, tindakan operasi, rawat inap, rawat jalan dan rujukan di rumah sakit pemerintah/swasta/lapangan dan Pos Kesehatan. Penanganan kedaruratan pada periode ini merupakan tahap awal sesaat setelah kejadian bencana.

b. Periode Darurat Terkendali

Pada periode ini situasi panik sudah mulai reda. Masyarakat sudah bisa berbuat sesuatu minimal untuk menolong dirinya sendiri. Pada periode ini hasil pendataan cakupan luas dampak, jumlah korban bencana, kerusakan fisik dan pendataan pada aspek lain sudah dapat dijadikan acuan untuk melakukan tanggap darurat secara baik dan terarah. Kegiatan pada periode ini meliputi penyaluran/distribusi bantuan pangan dan non-pangan, jaminan hidup berupa beras/bahan makanan pokok dan uang lauk pauk, distribusi logistik (darat, laut, udara), pasokan dan penyediaan bahan bakar minyak, penyediaan kebutuhan listrik, pengamanan daerah, perbaikan sementara jalan dan jembatan yang rusak, melanjutkan penanganan atau layanan medis dan penyembuhan, hunian sementara (tenda-tenda) atau lokasi lain yang layak huni, santunan duka baik korban meninggal dunia yang diterima kepada ahli waris bantuan biaya penggantian perawat rumah sakit, dan kegiatan lainnya.

c. Periode Darurat Lanjutan/Penuntasan

Pada periode darurat lanjutan ini kondisi darurat sudah berakhir menuju ke kondisi normal. Masyarakat secara perlahan sudah dapat melaksanakan kegiatan sosial-ekonomi meskipun dalam batas minimal. Pada periode ini kegiatannya mencakup percepatan dan penuntasan penanganan darurat serta pengakhiran pemulihan darurat, sekaligus mempersiapkan pemulihan pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) yang berada pada periode transisi. Pada masa transisi ini dapat dilaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi koordinasi penyusunan

kebijakan umum dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi, koordinasi perumusan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi rencana kerja, dan menetapkan langkah-langkah strategi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaannya.

E. Rencana Kontinjensi Erupsi Gunung Api BPBD Kabupaten Malang

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa adanya dua fungsi utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai lembaga yang menangani kebencanaan tingkat pusat, yaitu a) merumuskan dan menerbitkan kebijakan tentang penanganan penanggulangan bencana, serta penanganan populasi yang mengungsi dengan cara yang efektif, dan b) mengoordinasi implementasi kegiatan penanggulangan bencana dengan cara yang terencana, terpadu, dan menyeluruh. Sehingga BNPB menyusun suatu bentuk perencanaan penanganan kedaruratan yang disebut dengan rencana kontinjensi. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.

Rencana Kontinjensi menurut UNISDR-*United Nations Secretariat for International Strategy for Disaster Reduction* (Strategi Internasional untuk Pengurangan Resiko Bencana PBB) dalam Vidiarina (2010:7) adalah Proses manajemen yang menganalisis kejadian potensial tertentu atau situasi yang timbul yang mungkin mengancam masyarakat dan lingkungan dan menyusun pengaturan di muka untuk memungkinkan tanggapan yang tepat

waktu, efisien, dan patut terhadap kejadian atau situasi seperti itu. perencanaan kontinjensi harus mencakup proses pengaturan awal sehingga bisa membuat perencanaan atau menyusun strategi dan prosedur dalam menanggapi potensi krisis atau kedaruratan yang akan terjadi. Ini termasuk mengembangkan skenario (untuk mengantisipasi krisis), menentukan tanggung jawab semua pelaku yang akan terlibat mengidentifikasi peran dan sumber daya, proses pendataan dan penyebaran informasi, dan pengaturan setiap pelaku sehingga siap pada saat dibutuhkan, dan menentukan kebutuhan agar tujuan tercapai.

BNPB dalam Vidiarina (2010:7) juga menjelaskan bahwa rencana kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu. Rencana kontinjensi tersebut menjadi dasar bagi rencana operasi dan tanggap darurat. Penyusunan rencana kontinjensi ini bertujuan sebagai pedoman penanganan bencana letusan gunung api pada saat tanggap darurat bencana yang cepat dan efektif. Serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (*stake holder*) yang mengambil peran dalam penyusunan kontinjensi plan.

Pada rencana kontinjensi bencana erupsi gunung api, Pemerintah Kabupaten Malang mengambil beberapa kebijakan secara umum yang digunakan sebagai landasan kegiatan untuk mencapai penanggulangan bencana yang efektif dan strategi untuk dikoordinasikan ke segenap jajaran yang terkait, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. Kebijakan, Program dan Fokus Kegiatan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Api

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
Perlindungan Masyarakat dari Bencana Erupsi Gunung Kelud		
1. Pencegahan dan Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Kelud	1. Pencegahan dan mitigasi non struktural	1. Pengawasan atas pelaksanaan tata guna lahan daerah konservasi
	2. Pencegahan dan mitigasi struktural	2. Pelaksanaan pembangunan saluran pengalihan aliran lahar di daerah pemukiman
2. Kesiapsiagaan Bencana Erupsi Gunung Kelud	3. Pembangunan Sistem Peringatan Dini	3. Pembangunan Sistem Peringatan Dini
	4. Peningkatan kapasitas evakuasi masyarakat	4. Penyusunan dan Penetapan Rencana Evakuasi di kawasan rawan bencana letusan gunung api
	5. Pembangunan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana kesiapsiagaan bencana	5. Penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan di kawasan rawan bencana gunung api
		6. Peningkatan kapasitas sarana prasarana evakuasi masyarakat di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur
Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud		
Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud	Penyelenggaraan Operasi Tanggap Darurat	1. Penanganan Tanggap Darurat Sektor Posko Pengendali
		2. Pelaksanaan Sektor Evakuasi Korban
		3. Penghimpunan dan Penyaluran Bantuan Logistik
Pemulihan Pasca Bencana Erupsi Kelud		
Pemulihan Bencana	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1. Pengkajian kerusakan dan kerugian
		2. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
		rekonstruksi
		3. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana
		4. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

Sumber: Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

Perencanaan kontinjensi sendiri merupakan pra-syarat bagi tanggap darurat yang cepat dan efektif. Tanpa perencanaan kontinjensi sebelumnya, banyak waktu akan terbuang dalam beberapa hari pertama untuk menanggapi keadaan darurat tersebut. Perencanaan kontinjensi ini nantinya akan membangun kapasitas sebuah organisasi dan digunakan sebagai dasar bagi rencana operasi dan tanggap darurat. Proses perencanaan kontinjensi sendiri melibatkan sekelompok orang atau organisasi yang bekerjasama secara berkelanjutan untuk merumuskan dan menepakati tujuan-tujuan bersama, mendefinisikan tanggung jawab dan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan dengan fokus masalah dan tujuan penelitian yang telah dijabarkan, maka pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Melalui metode kualitatif dan dengan pendekatan deskriptif ini, nantinya peneliti akan menyajikan bentuk data dan informasi yang menyeluruh dalam mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud. Serta untuk menganalisis faktor yang dapat mendukung maupun menghambat upaya tersebut. Informasi data yang dikumpulkan dalam jenis metode penelitian kualitatif ini bukan berupa angka-angka, melainkan data yang berasal dari hasil observasi lapangan, wawancara, catatan kasus dan berita, memo, serta dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menggambarkan realita secara empirik dibalik sebuah fenomena yang secara mendalam, rinci dan tuntas melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Oleh karena itu penggunaan jenis metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Secara umum, penelitian yang menggunakan jenis metode kualitatif mempunyai ciri-ciri (Sugiyono, 2010:21), sebagai berikut :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawan dari eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti sebagai instrumen kunci
2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik obyek yang diamati)

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, metode penelitian kualitatif ini dilakukan secara intensif, peneliti berpartisipasi dengan terjun langsung ke lapangan, mencatat apa yang telah diteliti, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Oleh karena itu, peneliti atau periset dalam penelitian kualitatif ini merupakan bagian integral dari data yang diperoleh. Hal ini dimaksudkan karena peneliti menjadi instrumen utama/kunci yang ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Akibatnya, penelitian kualitatif ini dapat bersifat subjektif dan desain penelitian dapat dibuat bersamaan atau sesudah penelitian. Sehingga desain penelitian yang dikembangkan bersifat terbuka karena dapat berubah atau disesuaikan dengan perkembangan hasil peneliti di lapangan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti melakukan penelitian dengan *setting* yang alamiah dan membiarkan peristiwa yang diteliti mengalir secara normal tanpa mengontrol variabel yang diteliti.

Perhatian pada penelitian kualitatif lebih banyak ditujukan pada pengembangan teori substansif yang dibangun melalui data empiris yang diperoleh di lapangan. Teori yang demikian dibangun melalui *grounded research*. Dengan metode ini, pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan

hipotesis yang berupa hubungan antar gejala. Hipotesis tersebut nantinya diverifikasi dan bila hipotesis tersebut terbukti maka akan menjadi sebuah teori atau tesis. Selain itu, prosedur penelitian kualitatif ini juga ditujukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati. Sehingga pada penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yang bersifat deskriptif.

Pendekatan deskriptif merupakan metode pencarian fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat dengan interpretasi yang tepat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian dengan pendekatan deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Hal ini berkaitan dengan data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku yang tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Kemudian peneliti segera melakukan analisis data yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Pemaparan hasil analisis tersebut ditelaah satu demi satu dengan menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi dalam konteks lingkungannya. Serta objektivitas pemaparan selalu dijaga agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi yang secara sistematis dapat dihindari.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, rumusan masalah biasanya dikemukakan dalam bentuk fokus penelitian yang relatif masih abstrak dan tentatif (dapat berubah sesuai dengan realitas yang ada). Akan tetapi, fokus penelitian bukan merupakan masalah itu sendiri, melainkan sebagai pokok acuan permasalahan yang dipilih peneliti untuk diteliti hingga menemukan masalah yang sebenarnya. Sehingga menurut Moleong (2006), kemampuan peneliti menentukan fokus penelitian dengan baik akan berguna untuk membatasi studi, memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan dan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan. Dengan fokus yang jelas, seorang peneliti dapat memilih dan memilah data yang benar-benar fungsional. Artinya, data yang tidak berkaitan dengan fokus masalah (walaupun menarik bagi peneliti) untuk sementara ditinggalkan dan begitupun sebaliknya, data yang relevan harus dikejar (walaupun mungkin peneliti kurang tertarik dan mengalami kesulitan).

Menurut Moleong (2006:97-98) fokus penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif memiliki landasan sebagai berikut :

1. Suatu penelitian tidak dimulai dari suatu yang vakum atau kosong
2. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah dan keputusan lainnya
3. Tujuan penelitian pada dasarnya adalah memecahkan masalah yang dirumuskan terlebih dahulu, barulah tujuan penelitian ditetapkan
4. Masalah yang bertumpu pada fokus penelitian yang ditetapkan bersifat tentatif atau dapat diubah sesuai dengan situasi latar penelitian. Implikasinya, peneliti tidak perlu kecewa jika masalah dan fokusnya berubah.

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini sangat penting keberadaannya, sebab fokus penelitian memiliki tiga tujuan, yakni pertama, untuk menentukan keterikatan penelitian dan ketentuan lokasi penelitian. Kedua, menentukan kriteria inklusi dan eksklusi bagi informasi baru. Ketiga, membantu peneliti membuat keputusan untuk membuang atau menyimpan informasi yang diperolehnya. Sehingga sebelum penelitian dimulai, peneliti terlebih dahulu menyiapkan dan menetapkan beberapa pokok acuan masalah yang spesifik untuk diteliti. Agar selama melakukan penelitian dilapangan memiliki arah yang jelas. Serta berguna untuk membantu peneliti dalam membatasi bidang sasaran dalam penelitian ini. Namun, nantinya fokus penelitian dilapangan masih kemungkinan dapat berubah. Karena fokus penelitian sesuai dengan kondisi dan situasi dilapangan.

Berdasarkan sedikit uraian diatas, maka pada jenis penelitian kualitatif ini juga, peneliti menghendaki adanya batasan dalam penelitian untuk mempertajam fokus dan menetapkan lokasi penelitian. Dan dengan penetapan fokus penelitian yang jelas dan rinci, dapat memudahkan peneliti untuk menentukan data yang diperlukan maupun data yang tidak diperlukan. Disamping itu dengan mengacu pada pemikiran-pemikiran yang terdapat pada uraian latar belakang penelitian serta berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud meliputi:

- a) Penanganan Tanggap Darurat Sektor Posko Pengendali
 - b) Pelaksanaan Sektor Evakuasi Korban
 - c) Penghimpunan dan Penyaluran Bantuan Logistik
2. Faktor pendukung dan penghambat upaya tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:
- a) Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan upaya tanggap darurat Erupsi Gunung Kelud. Adapun faktor pendukung tersebut yaitu:
 - 1) Kerjasama Antar Aktor
 - 2) Dukungan LSM Lokal
 - 3) Dukungan Masyarakat
 - b) Faktor penghambat adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan memiliki pengaruh terhadap upaya tanggap darurat Erupsi Gunung Kelud. Adapun faktor penghambat tersebut yaitu:
 - 1) Faktor Alam
 - 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia
 - 3) Kurangnya Sumber Dana
 - 4) Kurangnya Sarana dan Prasarana
 - 5) Kondisi Pengungsi

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana peneliti akan melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti. Berdasarkan tempat/lokasi penelitian ini, nantinya peneliti akan dapat memperoleh data dan informasi yang

berkaitan dengan tema, masalah, serta fokus yang telah ditetapkan. Sehingga data yang diperoleh valid, akurat, dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti memilih seputar wilayah Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian. Dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah luas yang terdiri dari 33 kecamatan yang memiliki potensi ancaman bencana yang tinggi dan seringkali terjadi bencana. Serta berada dibawah naungan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Malang yang secara langsung mendapatkan dampak dari kegiatan operasional BPBD itu sendiri.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap dan mengungkapkan tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh informasi data yang akurat dan valid. Sehingga pada penelitian ini, peneliti memilih Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang sebagai situs penelitian. Dengan pertimbangan bahwa penanganan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud pada tahun 2014 mendapat apresiasi penyelenggaraan penanggulangan erupsi gunung api terbaik oleh BNPB. Serta, BPBD Kabupaten Malang merupakan satuan pelaksana/satlak penanggulangan bencana yang berada dibawah komando Bupati Malang (Pemerintah Kabupaten Malang). Dan BPBD Kabupaten Malang pernah meraih penghargaan kinerja penanganan bencana bencana terbaik juara ke-2 setelah Kabupaten Sleman untuk wilayah III meliputi Jawa-Bali dari BNPB pada tahun 2016. Di tahun yang sama BPBD Kabupaten Malang juga dinobatkan sebagai BPBD terbaik di Jawa Timur, prestasi tersebut diperoleh berkat inovasi metode

sosialisasi desa rawan bencana yang dilakukan di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2006: 157) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Sedangkan menurut Spreadly (dalam Sugiyono, 2010: 297-298), menerangkan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Karena penelitian kualitatif ini berangkat dari kasus yang ada pada situasi sosial tertentu. Sehingga sumber data penelitian kualitatif dinamakan dengan istilah “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu pelaku (*actors*), tempat (*place*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin dipahami secara mendalam. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) dari orang-orang/pelaku (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu yang memiliki keterkaitan dengan masalah atau fokus yang diambil oleh peneliti. Namun, obyek penelitian pada situasi sosial tidak semata-mata terdiri dari tiga elemen tersebut. Masih ada elemen-elemen lainnya yang dapat digunakan sebagai obyek pendukung sumber data untuk peneliti amati, misalnya seperti sebuah peristiwa/kejadian, dokumen atau arsip, dan sebagainya.

Berdasarkan sedikit penjelasan tersebut, serta untuk mempermudah dalam mengidentifikasi sumber data, maka pada penelitian ini sumber data diambil dari 3 elemen yaitu:

1. Orang (*actor*)

Actor merupakan pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu. Pada penelitian kualitatif, sumber data ini disebut “narasumber atau informan”, yaitu orang atau sejumlah orang yang memberikan respon atau tanggapan terhadap yang diminta atau ditentukan oleh peneliti. Posisi narasumber dalam penelitian ini sangat penting, bukan sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Dengan demikian, narasumber utama yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian adalah perangkat dan staf Bidang Kedaruratan dan Logistik mulai dari Kepala Seksi (Kasi) Kedaruratan, dan staf kedaruratan. Serta dipilih beberapa narasumber pelengkap atau dengan kata lain informan yang dimintai keterangan pendukung terhadap informasi yang dibutuhkan, yakni Bapak Sudarmanto (Mbah Darmo) selaku Koordinator LSM Jangkar Kelud dan perwakilan masyarakat Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon yang turut serta membantu dalam pelaksanaan penanganan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud.

2. Tempat atau Lokasi (*place*)

Tempat/lokasi merupakan sumber data yang berkaitan dengan kondisi dari tempat maupun lingkungan berlangsungnya suatu kegiatan/peristiwa yang berhubungan dengan fokus masalah dan objek penelitian. Tempat yang

digunakan untuk menggali informasi sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. Dari pemahaman lokasi dan lingkungan tersebut, nantinya peneliti dapat secara cermat mencoba mengkaji dan menarik kesimpulan secara akurat.

3. Dokumen atau Arsip

Merupakan sumber data dari bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu kegiatan/peristiwa yang diteliti. Data dokumen atau arsip dapat berupa rekaman/dokumen tertulis, seperti arsip data base pada komputer, surat keputusan (SK), rekapitulasi riwayat bencana kelud 2014 secara tertulis, arsip rekaman gambar, rekaman video, dan sebagainya. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang dianggap dapat menunjang upaya kegiatan tanggap darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

Sedangkan menurut Sugiyono (2010) apabila dilihat dari sumber datanya, maka dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi data primer dan sekunder. Berdasarkan pendapat tersebut, maka pengumpulan data pada penelitian ini juga menggunakan dua jenis data tersebut, yaitu:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data/peneliti. Data primer ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara (*interview*) secara langsung ke lapangan kepada narasumber atau pihak-pihak yang terkait. Pada penelitian ini terdapat beberapa narasumber yang peneliti jadikan sebagai sumber data primer, yaitu:

- a. Bapak Leonard Agus Supardhy, S.Sos selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang
 - b. Bapak Suhartanto, SE selaku anggota staf Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang
 - c. Bapak Sudarmanto (Mbah Darmo) selaku Koordinator LSM Jangkar Kelud dan perwakilan masyarakat Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon
2. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui orang lain, melalui buku-buku yang relevan, majalah, media massa cetak dan/atau elektronik, internet, jurnal ilmiah, kumpulan regulasi, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, dokumentasi, serta sumber-sumber lain dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah:
- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - b. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - c. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana
 - d. Duplikat dokumen MoU antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kediri dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Kelud pada tahun 2014

- e. Buku Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
- f. Data Kronologi erupsi Gunung Kelud pada tahun 2014
- g. Data pengungsi, desa terdampak bantuan logistik, dan fasilitas sarana dan prasarana umum yang rusak akibat erupsi Gunung Kelud tahun 2014
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pedoman Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
- i. Rencana Kontijensi dan Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Kelud oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, atau bisa juga dengan gabungan dari keempatnya (triangulasi). Oleh karena itu, teknik yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara (*interview*)

Esteberg (dalam Sugiyono, 2010: 317) mendefinisikan wawancara sebagai *a meeting of two persons to exchange information and idea*

through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about particular topic (wawancara adalah sebuah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu). Dengan kata lain, wawancara merupakan percakapan antara peneliti atau seseorang yang berharap mendapatkan informasi dan informan/responden atau seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Wawancara merupakan metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Namun, saat ini beberapa riset kuantitatif banyak juga yang menjadikan wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data. Sehingga pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi data yang akurat dan mendalam dari para narasumber/informan. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber utama/kunci dan narasumber pendukung yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan topik permasalahan yang telah peneliti tetapkan sebelumnya.

Esterberg (dalam Sugiyono, 2010: 318) kemudian menambahkan bahwa ada beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Dan pada penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu teknik wawancara tersebut, yakni wawancara semiterstruktur (*semistructured interview*). Karena jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* dan merupakan

gabungan sifat dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pada wawancara semiterstruktur ini, peneliti lebih memiliki kebebasan atau keterbukaan bertanya daripada wawancara terstruktur yang harus benar-benar sesuai dengan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disusun. Wawancara ini dikenal pula dengan nama wawancara terarah atau wawancara bebas terpimpin. Artinya, wawancara dilakukan secara bebas, tapi terarah dengan tetap berada pada jalur pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan telah disiapkan terlebih dahulu. Sehingga pada penelitian ini, sebelum melakukan kegiatan wawancara peneliti menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan-pertanyaan secara tertulis atau pedoman wawancara yang sistematis.

Daftar pertanyaan atau pedoman tertulis yang telah disusun tersebut, nantinya akan digunakan oleh peneliti sebagai acuan wawancara yang diajukan kepada narasumber. Namun, pada saat wawancara berlangsung peneliti tidak terikat atau terus mengacu pada pedoman tersebut. Sehingga peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan diluar daftar pedoman untuk memperoleh data yang lengkap, tetapi pertanyaan yang diajukan tetap harus memiliki relevansi atau keterkaitan dengan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud. Serta untuk menganalisis faktor yang dapat mendukung maupun menghambat upaya tanggap darurat tersebut.

Disamping itu, peneliti juga melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara langsung dan lebih dari satu kali dengan para narasumber. Oleh karena itu, pelaksanaan proses wawancara membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan membutuhkan waktu yang berhari-hari. Serta peneliti juga membatasi hanya beberapa narasumber yang peneliti wawancarai. Jika peneliti merasa data yang dibutuhkan sudah mencukupi, maka tidak perlu mencari narasumber lain. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi secara lengkap, jelas, dan mendalam. Agar data yang diperoleh peneliti selama proses wawancara merupakan data yang benar-benar dibutuhkan oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, catatan sejarah, peraturan, kebijakan, dan perundang-undangan. Dokumentasi yang berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa, dan lain-lain. Serta dokumentasi yang berbentuk karya, misalnya karya seni yang dapat berupa gambar video, film, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dokumentasi ini merupakan pendukung kebenaran sumber data dari proses wawancara yang terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang berguna untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam proses penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian dengan metode kualitatif adalah peneliti itu sendiri yang berfungsi sebagai *human instrument* untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Selain itu, penelitian dengan metode kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan data realita yang sifatnya menyeluruh, dinamis, dan tidak dapat dipisah-pisahkan ke dalam variabel-variabel penelitian. Serta rancangan penelitiannya bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian Sehingga pada penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen kunci yang kemudian didukung oleh instrumen pendukung lainnya.

Pada penelitian kualitatif ini ada dua jenis instrumen yang digunakan, yaitu:

1. Instrumen utama (kunci), yaitu peneliti sendiri yang harus mampu dan siap untuk menyesuaikan keadaan, mengamati fenomena-fenomena yang ada dilapangan, dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait adalah anggota bidang kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Malang, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang yang terkait, serta Koordinator LSM Jangkar Kelud selaku perwakilan dari instansi non

pemerintah dan masyarakat sendiri yang turut bekerjasama bersama BPBD dalam melaksanakan operasi tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud di wilayah Kabupaten Malang.

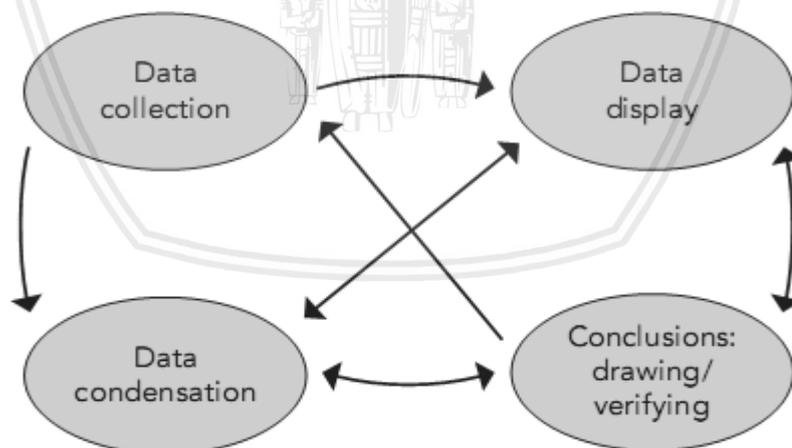
2. Instrumen Pendukung, yaitu peneliti menggunakan beberapa alat bantu sebagai penunjang dalam mengumpulkan data seperti, buku catatan, *voice recorder* (perekam suara), dan kamera. Buku catatan berfungsi untuk membantu peneliti dalam mencatat data hasil wawancara dengan narasumber. *Voice recorder* (perekam suara) digunakan untuk merekam semua suara percakapan atau pembicaraan saat proses wawancara. Penggunaan *voice recorder* ini, peneliti harus terlebih dahulu meminta izin agar diperbolehkan atau tidak oleh narasumber. Selanjutnya, kamera peneliti digunakan untuk memotret dan merekam video selama proses wawancara berlangsung. Karena dengan adanya hasil rekaman, suara, foto, maupun video maka tingkat keabsahan data penelitian dapat terjamin, sebab peneliti benar-benar telah melakukan pengumpulan data dan terjun ke lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Oleh karena itu analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah suatu penelitian. Analisis data itu sendiri menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2010) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian apapun merupakan cara berpikir untuk mencari pola yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap suatu temuan penelitian untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan hasil yang diteliti.

Pada rancangan penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman. Karena dalam teknik analisis data tersebut dilakukan secara interaktif dengan narasumber dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga data yang didapat sudah mencapai titik jenuh. Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook 3rd edition*, menjelaskan bahwa ada tiga alur yang diterapkan dalam analisis data kualitatif model interaktif yang seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 4. *Components of Data Analysis: Interactive Model*
Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33)

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data merujuk pada suatu proses analisis yang bertujuan untuk mempertajam, memilah, memfokuskan, membuang, dan

menyederhanakan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di lapangan. Data yang didapat berupa catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dan dokumen-dokumen empiris lain yang terkait dengan fokus penelitian. Selanjutnya data-data yang telah terkumpul tersebut dipilih, dipecah, dan ditarik kedalam rangkuman kategori-kategori pokok yang terbaik. Serta difokuskan pada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud. Setelah data dikondensasi atau dipilah-pilah, kemudian dicari polanya agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melangkah ke tahap penyajian data dan verifikasi data.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melalui proses pengumpulan dan pengkondensasian, data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud. Serta faktor yang dapat mendukung maupun menghambat upaya tersebut. kemudian disajikan dalam bentuk uraian paragraf kualitatif, tabel, maupun grafik singkat. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah untuk dipahami dan ditarik kesimpulan/verifikasi data yang telah disajikan tersebut benar-benar sesuai dengan temuan yang ada dilapangan.

3. *Conclusions Drawing/Verifications* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Tahap ketiga, penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan tahapan dimana rumusan dan kesimpulan awal yang telah didapat dari proses pengkondensasian dan penyajian data yang masih bersifat sementara tersebut akan diuji kelayakannya, kekokohnya, kepastiannya atau validitasnya. Selain itu, data yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud, serta semua faktor pendukung dan penghambat upaya tersebut juga diuji relevansinya dan validitasnya. Hal ini bertujuan untuk menjawab konsistensi rumusan masalah yang sebelumnya telah peneliti rumuskan dengan data bukti-bukti valid yang ada dilapangan. Kemudian data yang telah diverifikasi atau diuji tersebut ditarik kesimpulannya kedalam susunan paragraf naratif yang jelas, mudah dipahami, serta sesuai dengan fokus penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

a) Sejarah Kabupaten Malang

Dikutip dari Profil Kabupaten Malang yang ada di situs web milik Pemerintah Kabupaten Malang, sejarah terbentuknya wilayah Kabupaten Malang berawal ketika kerajaan Singhasari dibawah kepemimpinan Akuwu Tunggul Ametung yang beristrikan Ken Dedes, kerajaan itu dibawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Pusat pemerintahan Singhasari saat itu berada di Tumapel. Baru setelah muncul Ken Arok yang kemudian membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang, setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Kediri saat itu jatuh ke tangan Singhasari dan turun statusnya menjadi kadipaten. Sementara Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Dhandang Gendhis (1185 - 1222).

Kerajaan ini mengalami jatuh bangun. Semasa kejayaan Mataram, kerajaan-kerajaan di Malang jatuh ke tangan Mataram, seperti halnya Kerajaan Majapahit. Sementara pemerintahan pun berpindah ke Demak disertai masuknya agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Malang saat itu berada di bawah pemerintahan Adipati Ronggo Tohjiwo dan hanya

berstatus kadipaten. Pada masa-masa keruntuhan itu, menurut Folklore, muncul pahlawan legendaris Raden Panji Pulongjiwo. Ia tertangkap prajurit Mataram di Desa Panggungrejo yang kini disebut Kepanjen (Kepanji-an). Hancurnya kota Malang saat itu dikenal sebagai Malang Kutho Bedhah (www.malangkab.go.id).

Bukti-bukti lain yang hingga sekarang merupakan yang saksi bisu adalah nama-nama desa seperti Kanjeron, Balandit, Turen, Polowijen, Ketindan, Ngantang dan Mandaraka. Selain itu terdapat peninggalan sejarah berupa candi-candi yang merupakan bukti konkritnya (www.malangkab.go.id), yaitu :

- 1) Candi Kidal di Desa Kidal Kec. Tumpang yang dikenal sebagai tempat penyimpanan jenazah Anusapati.
- 2) Candi Singhasari yang berada di Kecamatan Singosari sebagai penyimpan abu jenazah Raja Kertanegara
- 3) Candi Jago (*jajaghu*) yang terletak di Kecamatan Tumpang merupakan tempat menyimpan abu jenazah dari Wisnuwardhana

Pada zaman VOC, Malang merupakan tempat strategis sebagai basis perlawanan seperti halnya perlawanan Trunojoyo (1674 - 1680) terhadap Mataram yang dibantu VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkap di Ngantang. Awal abad XIX ketika pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Jenderal, Malang seperti halnya daerah-daerah di nusantara lainnya, dipimpin oleh Bupati. Bupati Malang I adalah Raden

Tumenggung Notodiningrat I yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16. Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan kerajaan- kerajaan. Bukti-bukti yang lain, seperti beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada sejak abad VIII dalam bentuk Kerajaan Singhasari dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Kerajaan Kanjuruhan seperti yang tertulis dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada hari Jum`at Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisat jatuh pada tanggal 28 Nopember 760. Tanggal inilah yang dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang. Sejak tahun 1984 di Pendopo Kabupaten Malang ditampilkan upacara Kerajaan Kanjuruhan, lengkap berpakaian adat zaman itu, sedangkan para hadirin dianjurkan berpakaian khas daerah Malang sebagaimana ditetapkan (www.malangkab.go.id).

b) Kondisi Geografi dan Topografi Kabupaten Malang

Dari segi geografis, Kabupaten Malang merupakan kawasan yang terletak pada bagian tengah-selatan dari Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang berbatasan dengan enam kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Lumajang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kediri. Posisi Kabupaten Malang

berada diantara 1120 17', 10,90" BT dan 122057',00,00" BT serta antara 70 44', 55,11" LS dan 8026',35,45" LS. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Malang sebesar 3.530,65 km².

Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi sejumlah desa dan keurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kepanjen. Pusat pemerintahan sebelumnya berada di Kota Malang. Ibukota kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang antara lain Lawang, Singosari, Turen dan Kepanjen. Berikut ini merupakan daftar dari wilayah kecamatan yang ada di kabupaten Malang (www.malangkab.go.id), yaitu :

- | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1. Ampelgading | 12. Kasembon | 23. Pujon |
| 2. Bantur | 13. Kepanjen | 24. Sumbermanjing Wetan |
| 3. Bululawang | 14. Kromengan | 25. Singosari |
| 4. Dampit | 15. Lawing | 26. Sumberpucung |
| 5. Dau | 16. Ngajum | 27. Tajinan |
| 6. Donomulyo | 17. Ngantang | 28. Tirtoyudo |
| 7. Gedangan | 18. Pagak | 29. Tumpang |
| 8. Gondanglegi | 19. Pagelaran | 30. Wagir |
| 9. Jabung | 20. Pakis | 31. Turen |
| 10. Kalipare | 21. Pakisaji | 32. Wajak |
| 11. Karangploso | 22. Poncokusumo | 33. Wonosari |



Gambar 5. Peta Wilayah Kabupaten Malang
 Sumber: Pemerintah Kabupaten Malang, 2018
 (www.malangkab.go.id)

Dilihat dari segi topografinya, sebagian besar wilayah Kabupaten Malang berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Pada bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit. Kondisi lahan di Kabupaten Malang bagian utara relatif subur, sementara di sebelah selatan relatif kurang subur. Masyarakat Kabupaten Malang umumnya bertani, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan. Sebagian lainnya telah berkembang sebagai masyarakat industri hidrologi. Kabupaten ini memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk.

c) Potensi Ancaman Bencana Kabupaten Malang

Cakupan wilayah Kabupaten Malang yang sangat luas berdampak pada tingginya tingkat potensi ancaman bencananya. Sehingga membuat wilayah Kabupaten Malang memerlukan penjagaan atau kesiapsiagaan yang sangat ekstra akan sewaktu-waktu terjadinya bencana alam maupun bencana sosial. Berikut ini merupakan daftar potensi bencana yang ada di Kabupaten Malang:

Tabel 4. Potensi Bencana di Kabupaten Malang

Potensi Bencana Kabupaten Malang			
1	Banjir	6	Kekeringan
2	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	7	Epidemi dan Wabah Penyakit
3	Gempa Bumi	8	Letusan Gunung Api
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	9	Cuaca Ekstrim
5	Kegagalan Teknologi	10	Tanah longsor

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

Dari tabel tersebut dapat diuraikan lebih jelas beberapa kelompok kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Malang adalah banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrim dan tanah longsor.

Sedangkan untuk sebaran potensi ancaman bencana yang terdapat di wilayah kecamatan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Sebaran Potensi Ancaman Wilayah Kabupaten Malang

No.	Jenis Bencana	Wilayah Kecamatan
1.	Bencana Alam	
	a. Banjir	Singosari, Tirtoyudo, Dampit, Sumbermanjing Wetan, Bantur, dan Ampelgading
	b. Kekeringan	Kalipare, Pagak, Sumbermanjing Wetan, Singosari, Poncokusumo, Donomulyo, Sumberpucung, Bantur, dan Gedangan
	c. Tsunami	Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, dan Ampelgading
	d. Puting Beliung	Semua wilayah Kabupaten Malang
	e. Tanah Longsor	Kasembon, Ngantang, Pujon, Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading, Donomulyo, Wajak, Pocokusumo, dan Jabung
	f. Erupsi Gunung Api	Gunung Semeru: Poncokusumo, Wajak, Dampit, Tirtoyudo, dan Ampelgading Gunung Bromo: Jabung dan Poncokusumo Gunung Arjuno: Karangploso, Singosari, dan Lawang Gunung Kelud: Kasembon dan Ngantang
	g. Gempa Bumi	Semua wilayah Kabupaten Malang
2.	Bencana Non Alam	
	a. Kebakaran Hutan	Poncokusumo, Jabung, Wajak, Tirtoyudo, Ngantang, Pujon, Kasembon, Wagir, Dau, Ngajum, Wonosari, Ampelgading, dan Lawang
	b. Kebakaran Rumah	Semua wilayah Kabupaten Malang
	c. Konflik Sosial	Dampit, Tirtoyudo, Bantur, Pagak, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung (konflik pilkada/pileg)
	d. Industri	Lawang, Turen, Karangploso

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

Data tabel diatas menunjukkan bahwa hampir diseluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Malang memiliki potensi ancaman bencana. Mulai dari bencana banjir, kekeringan, tsunami, puting beliung, tanah longsor, erupsi gunung api, gempa bumi, kebakaran hutan, kebakaran rumah, hingga ancaman bencana konflik sosial, dan industri. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang dituntut untuk selalu waspada dan cepat tanggap dalam merespon ancaman bencana-bencana tersebut. Karena kejadian bencana tidak bisa diprediksi dan bisa sewaktu-waktu terjadi.

2. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

a) Profile Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka Pemerintah Kabupaten Malang membentuk suatu badan khusus dalam penanganan penanggulangan bencana yang mengatasi seluruh wilayah Kabupaten Malang. Selanjutnya dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011, tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penaggulangan Bencana. Lembaga ini bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan

darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah pasal 4 menyebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan secara Ex.Officio yang dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, diantaranya sebagai berikut ini:

- a. Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang :
 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
 2. Menetapkan standarisasi serta penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang:
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

b) Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yaitu sebagai berikut:

- Visi

“Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Malang dalam Menghadapi Bencana”

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana serta terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

- **Misi**

Dalam mewujudkan pencapaian visi yang telah dirumuskan tersebut, maka implementasinya dijabarkan melalui misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan. Sebagai arah tindak organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Misi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang adalah:

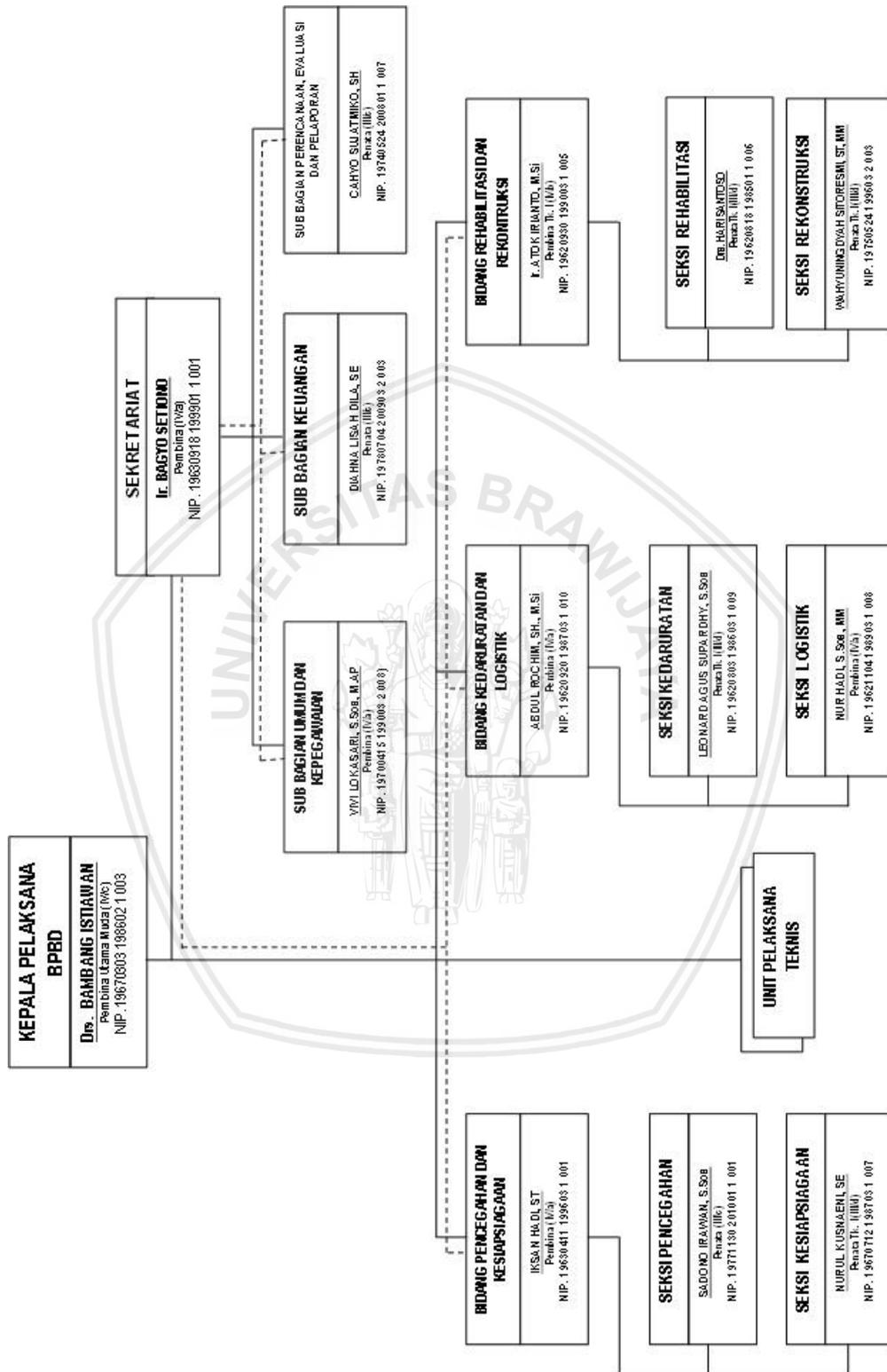
1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Upaya untuk mencapai misi tersebut diperlukan adanya suatu kerjasama yang sinergis antar instansi pemerintah dan dibantu oleh instansi non pemerintah, beserta masyarakat. Agar dapat melaksanakan

program kegiatan dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang telah direncanakan.

c) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

Pada sebuah organisasi, baik swasta maupun pemerintahan diperlukan adanya susunan struktur organisasi yang mana struktur organisasi tersebut dibentuk sebagai kerangka kerja formal sebuah organisasi. Struktur organisasi berfungsi untuk pembagian tugas masing-masing pegawai agar dapat berjalan teratur sesuai dengan tugas masing-masing. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 6. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Malang Tahun 2019

Sumber: Buku Profil BPBD Kabupaten Malang, 2019

Disamping itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang didukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari 33 orang yang terbagi ke dalam 3 bidang utama, yakni Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Serta dibantu oleh 2 Sub Bagian, yakni Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Tabel 6. Daftar Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019

No	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL/RUANG	JABATAN
1	Drs. Bambang Istiawan	196703031 986021003	Pembina Utama Muda	IV/c	Kepala Pelaksana BPBD
2	Ir. Bagyo Setiono	196309181 999011001	Pembina	IV/a	Sekretaris
3	Ir. Atok Irianto, M.SI	196209301 990031005	Pembina Tk. I	IV/b	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4	Abdul Rochim, SH., M.SI.	196209201 987031010	Pembina	IV/a	Kabid Kedaruratan dan Logistik
5	Iksan Hadi, ST	196304111 996031001	Pembina	IV/a	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6	Vivi Lokasari, S.Sos, M.AP	197004151 990032008	Pembina	IV/a	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	Nur Hadi, S.Sos, MM	196211041 989031008	Pembina	IV/a	Kasi Logistik
8	Drs. Hari Santoso	196208181 985011006	Penata Tk. I	III/d	Kasi Rehabilitasi
9	Leonard Agus Supardhy, S.Sos	196208031 986031009	Penata Tk. I	III/d	Kasi Kedaruratan

10	Wahyuningdyah Siteoresmi, ST, MM	197505241996032003	Penata Tk. I	III/d	Kasi Rekonstruksi
11	Nurul Kusnaeni, SE	196707121987031007	Penata Tk. I	III/d	Kasi Kesiapsiagaan
12	Diahna Lisah Dila, SE	197807042009032003	Penata	III/c	Kasubag Keuangan
13	Cahyo Sujatmiko, SH	197405242008011007	Penata	III/c	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
14	Sadono Irawan, S.Sos	197711302010011001	Penata	III/c	Kasi Pencegahan
15	Nanang Setiawan	197510102007011016	Penata Muda	III/a	Penyimpan Barang
16	Resti Dewi Rahmawati, A.MD.	199010202015042001	Pengatur	II/c	Pengadministrasi Keuangan
17	Saiful Arifin	197202112010011006	Pengatur	II/c	Bendahara
18	Isa Anshori	197412152006041016	Pengatur	II/c	Pengadministrasi Perencanaan dan Program
19	Yohan Wicaksono	-	-	-	Staf
20	Suhartanto, ST	-	-	-	Staf
21	Rizky Dwi Prastyawan	-	-	-	Staf
22	Dixie Agitas Suhud AW, SE	-	-	-	Staf
23	Saiful Antoni	-	-	-	Staf
24	Rusli Sukemi	-	-	-	Staf
25	Indra Ermawan, SE	-	-	-	Staf

26	Agung Candra F. S.Pd	-	-	-	Staf
27	Oldi Aditya Santoso	-	-	-	Staf
28	Sugeng Wiyono	-	-	-	Staf
29	Sariyanto	-	-	-	Staf
30	Aan Triwulandari	-	-	-	Staf
31	Bhekti Setiyawan, S.PD	-	-	-	Staf
32	Nur Ahmad Fauzi	-	-	-	Staf
33	Friska Taqwa Pratama, ST	-	-	-	Staf

Sumber: Profil BPBD Kabupaten Malang, 2019

3. Erupsi Gunung Kelud 2014

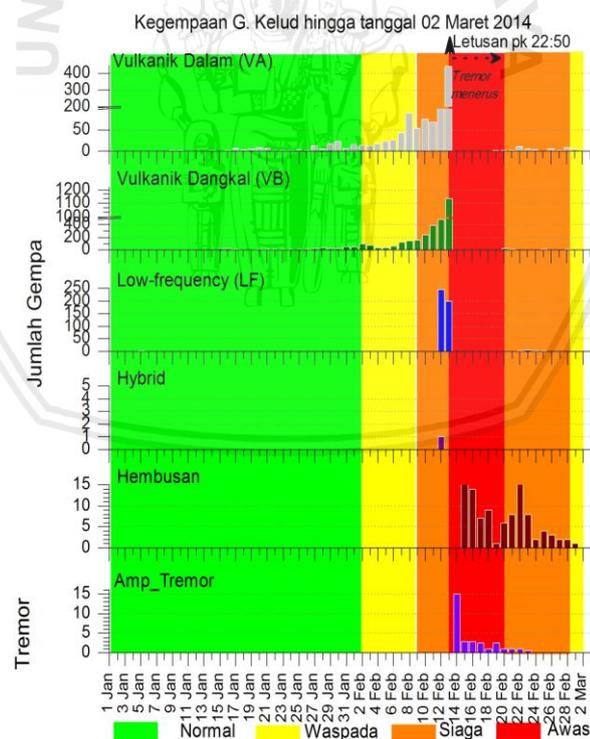
a) Kronologi Erupsi Gunung Kelud Tahun 2014

Gunung Kelud merupakan gunung berapi yang terletak di atas dataran tinggi wilayah Kediri dengan ketinggian 1724 meter DPL. Gunung kelud sendiri merupakan salah satu Gunung Api Strato Type A yang berada di wilayah padat penduduk yang di daerah puncaknya terdapat Danau Kawah pada ketinggian 1113,9 m DPL. Gunung Kelud dibagi menjadi 3 wilayah administratif yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang pada koordinat 07 56' 00" LS dan 112 18' 30" BT.

Menurut data dari BPBD Kabupaten Malang Letusan Gunung Kelud berlangsung beberapa jam namun sangat berbahaya karena hampir

selalu menghasilkan aliran PIROKLASIK (Awan Panas) Lahar letusan dan diikuti dengan bencana sekunder berupa lahar dingin yang meluncur melalui sungai–sungai besar yang berhulu di Gunung Kelud dan diawali dengan tanda–tanda seperti gunung api lainnya, seperti gempa tremor, gempa vulkanik, kenaikan suhu kawah, meningkatnya kandungan mineral, dan lain–lain.

Sumber data dokumen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menjelaskan bahwa pada kejadian bencana erupsi Gunung Kelud tahun 2014 ada beberapa tahapan kenaikan status keadan Gunung Kelud, yaitu sebagai berikut:



Gambar 7. Aktivitas Peningkatan Status Gunung Kelud Tahun 2014
Sumber: BPBD Kabupaten Malang

1) Aktif Normal

Pada awal tahun 2014 tercatat bahwa status kegiatan Gunung Kelud berjalan sesuai dengan kegiatan normal dan tidak memperlihatkan adanya peningkatan kegiatan berdasarkan hasil pengamatan secara visual maupun hasil penelitian secara instrumental, masyarakat dan pengunjung/wisatawan diperbolehkan mendekati kawah yang berada dipuncak Gunung Kelud.

2) Status Waspada

Pada tanggal 2 Februari 2014 hingga pukul 11:00 WIB status Gunung Kelud mulai naik dari status awal normal ke waspada. Karena terjadi peningkatan aktivitas berupa gempa vulkanik sebanyak 68 kali. Pada status ini terjadi 2X kegiatan Gunung Kelud yang melebihi batas kegiatan aktif normal. Oleh karena itu masyarakat dan pengunjung/wisatawan tidak boleh mendekati kawasan puncak Gunung Kelud pada radius 5 Km.

3) Status Siaga

Pada tanggal 10 Februari 2014 kegiatan Gunung Kelud berdasarkan hasil pengukuran analisa dan pengamatan PVMBG, telah terjadi peningkatan gempa vulkanik dalam dan dangkal mencapai 244 dan 75 kejadian yang melebihi batas-batas status waspada. Serta berdasarkan analisis perubahan tersebut, cenderung diikuti letusan erupsi. Sehingga status Gunung Kelud dari Waspada naik menjadi Siaga.

4) Status Awas (bahaya tertinggi)

Pada tanggal 13 Februari 2014 hingga pukul 18.00 WIB terjadi kegempaan mencapai 895 dan 312 kejadian. Kemudian sampai pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 21.15 WIB aktivitas gempa tremor terus menerus muncul disertai dengan adanya letusan abu dan asap. Sehingga status Gunung Kelud dinaikkan menjadi AWAS

5) Erupsi

Pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 22:50 terjadi gempa letusan besar yang direkam oleh seismograf. Rentang waktu dari status awas ke erupsi hanya sekitar 1 jam menit. Gunung Kelud langsung meletus pada malam itu juga ditanggal yang sama dan rentang waktu tersebut cukup singkat.

6) Pasca Erupsi

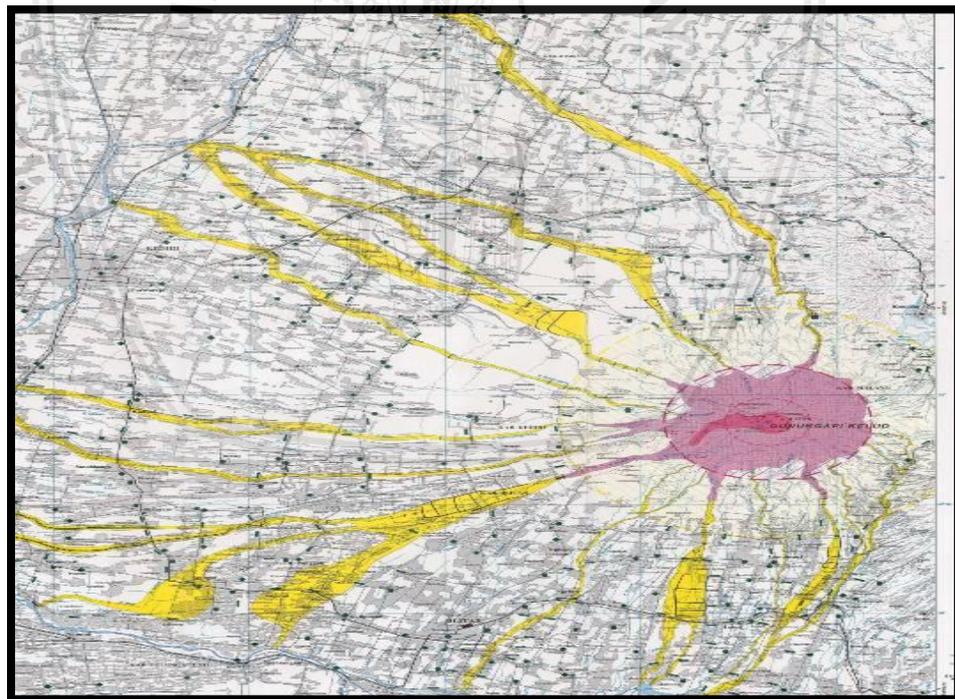
Menurut hasil Pos Pantau Gunung Kelud, pasca malam erupsi hingga pada tanggal 20 Februari 2014 aktivitas kegempaan Gunung Kelud menurun sehingga statusnya diturunkan menjadi Siaga. Kemudian dari tanggal 20 Februari 2014 hingga 28 Februari 2014 aktivitas kegempaan terus menurun dan status Gunung Kelud kembali diturunkan ke level Waspada.

Pernyataan Peralihan Status Gunung Kelud tersebut merupakan kewenangan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dibawah naungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Informasi pernyataan peralihan tersebut kemudian

dikirim ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dilanjutkan ke BPBD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah sekitar Gunung Kelud.

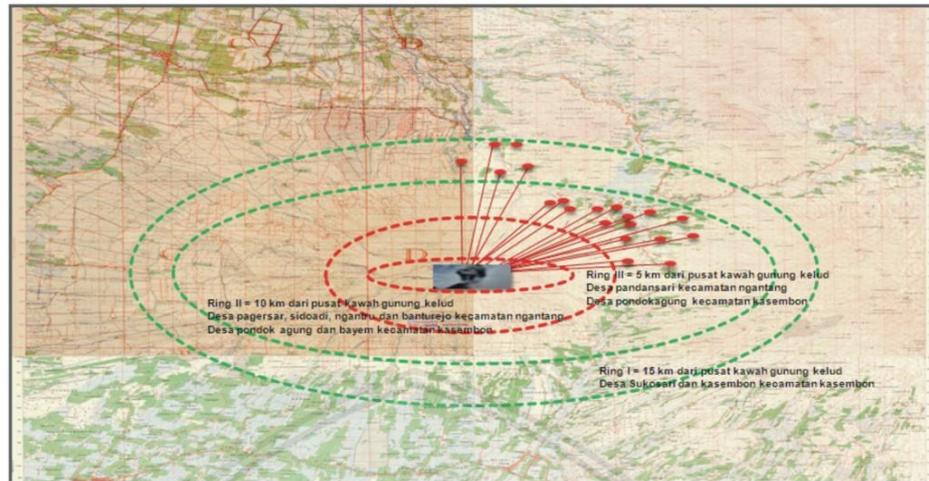
b) Kawasan Rawan Bencana (KRB) Erupsi Gunung Kelud

Berdasarkan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana (SIPBA) Kabupaten Malang yang telah disusun oleh Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengelompokkan Kawasan rawan bencana (KRB) erupsi Gunung Kelud menjadi KRB III, KRB II dan KRB I, sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 8. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Kelud
Sumber: BPBD Kabupaten Malang

PETA RAWAN BENCANA G. KELUD



Gambar 9. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Kelud
Sumber: BPBD Kabupaten Malang

1) Kawasan Rawan Bencana (KRB) - III

Kawasan rawan bencana III adalah kawasan yang sering terlanda aliran lava pijar (guguran/lontaran material pijar), hujan batu, hujan pasir, hujan debu meliputi daerah radius 0 – 5 Km dari Kawah Gunung Kelud. Meliputi Dusun Gombong Desa Pagersari. Dusun Ngramban Desa Banturejo, dan Dusun Sambirejo Desa Pandansari.

2) Kawasan Rawan Bencana (KRB)- II

Kawasan rawan bencana II yang berpotensi terlanda, guguran batu (pijar), aliran lahar, hujan batu, hujan pasir, hujan debu meliputi daerah radius 5 – 10 Km dari Kawah Gunung Kelud yang terdiri dari 2 (Dua) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Kasembon. Desa wilayah Kecamatan Ngantang yang termasuk KRB II yaitu Desa Pandansari, Desa Ngantru, Desa

Banturejo, Desa Sidodadi, dan Desa Pagersari sedangkan Kecamatan Kasembon meliputi Desa Pondokagung.

3) Kawasan Rawan Bencana (KRB) I

Kawasan rawan bencana I adalah kawasan yang rawan terhadap, aliran lahar, hujan batu, hujan pasir, hujan debu meliputi daerah radius 10 – 25 Km dari Kawah Gunung Kelud yang terdiri dari 2 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Kasembon.

Adapun desa-desa yang masuk kedalam KRB I yaitu

Kecamatan Ngantang :

1. Gombang
2. Simo
3. Sidodadi
4. Sekar
5. Ngantru
6. Banjarejo
7. Mulyorejo
8. Banu
9. Mujiang
10. Lumbang
11. Sedawun

Kecamatan Kesembon

1. Mangir
2. Pulosari
3. Kajang
4. Bulung
5. Druju
6. Pondok
7. Pondok Agung
8. Bojo
9. Gobet

B. Penyajian Data Penelitian

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pada Saat Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud

Gunung Kelud erupsi pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 22:50 dengan memuntahkan magma dan kubah lava Gunung Kelud setinggi lebih dari 17.000 meter di atas kawah. Jumlah material yang dimuntahkan sekitar 150 juta m³. Bongkahan batuan jatuh di sekitar kawah pada radius 3 km dan bahkan material yang berukuran pasir hingga kerikil jatuh hingga jarak 30 km dari Kawah Kelud. Abu vulkanik Gunung Kelud yang terbawa angin hingga ke segala arah terutama ke arah barat dan hingga menyebar ke wilayah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Barat. Bahkan untuk keselamatan penerbangan, sebagian aktivitas penerbangan bandar udara di 6 kota seperti Surabaya, Malang, Jogja, Solo, Semarang dan Bandung ditutup sementara.



Gambar 10. Kerusakan Atap Genting Akibat Erupsi
Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Malang

Gambar 10 menunjukkan atap genting milik warga Dusun Kutut, Desa Pandansari yang berjarak radius 5 km barat laut dari Kawasan Gunung Kelud mengalami kerusakan parah akibat tertimpa lontaran batu dan abu hasil erupsi. Desa ini berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB)

III



Gambar 11. Kondisi Kawasan Wisata Selorejo Desa Pandansari
Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Malang

Pada gambar 11 diatas menunjukkan kondisi pada pagi hari tanggal 14 Februari 2014 pasca erupsi malam harinya. Terlihat bahwa ketebalan endapan pasir mencapai 10 cm di Simpang Lima Kawasan Wisata Selorejo, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang yang memiliki jarak radius 8 km dari Kawah Gunung Kelud.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang saat masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud pada tahun 2014 ditujukan untuk mencapai penanganan bencana alam yang dapat

melindungi segenap masyarakat, meminimalisir dampak yang ditimbulkan, dan melakukan penyelamatan korban jiwa secara cepat. Pelaksanaan tanggap darurat ini merupakan upaya penyelenggaraan fungsi manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan saat Gunung Kelud mulai erupsi hingga masa masa darurat tersebut berakhir. Bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada saat tanggap darurat erupsi Gunung Kelud tahun 2014 meliputi 3 fokus prioritas kegiatan, yaitu :

a) Penanganan Tanggap Darurat Sektor Posko Pengendali

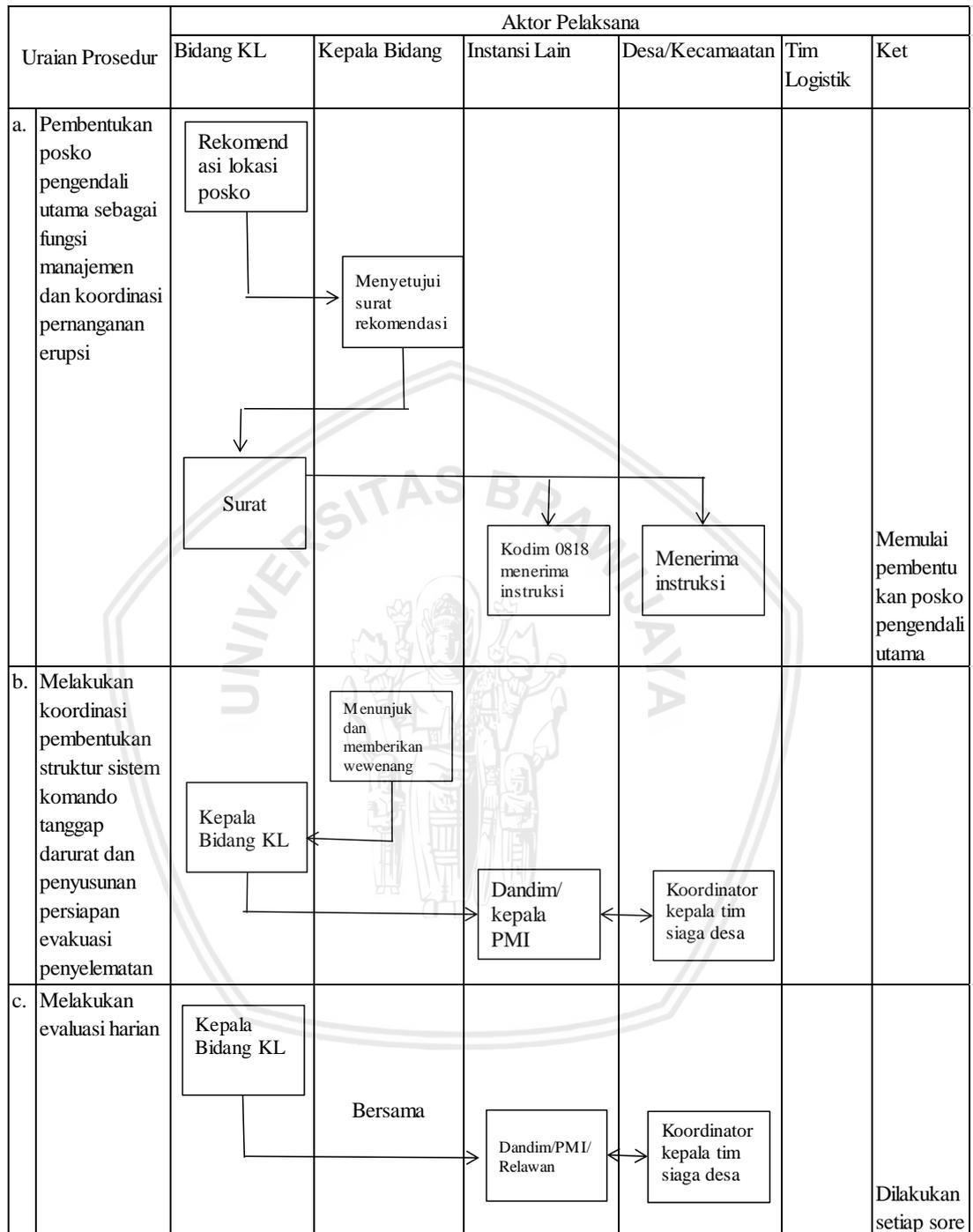
Bencana erupsi Gunung Kelud membuat keadaan dan situasi daerah sekitarnya tidak terkendali sehingga memerlukan penanganan bencana alam yang efisien dan terpadu. Selain itu membutuhkan upaya untuk mengendalikan, mengatur, mengkoordinasikan dan melaksanakan semua kegiatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Kelud mulai dari pembentukan posko pengendali, evakuasi korban, penyaluran logistik, dan pembangunan sementara sarana dan prasarana dapur umum.

Sektor posko pengendali sendiri merupakan wadah koordinasi pelaksana penanggulangan bencana erupsi Gunung Kelud di Kabupaten Malang dan sistem posko ini dilakukan dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa. Sektor posko pengendali melakukan tindakan berdasarkan prosedur tetap yang ada di rencana kontijensi erupsi Gunung Kelud. Pos pengendali utama didirikan di wilayah Resort Taman Wisata Selorejo, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Menurut penuturan dari Bapak Suhartanto, ST selaku Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD

Kabupaten Malang menyebutkan bahwa pemilihan lokasi ini dikarenakan wilayah Taman Wisata Selorejo berada di Kawasan Rawan Bencana Ring I atau jarak lokasinya tidak terlalu dekat dengan Gunung Kelud. Selain itu, akses lokasi pos pengendali utama ini mudah dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truck evakuasi dan mobil pembawa logistik.

Adapun sasaran pada penanganan tanggap darurat sektor posko pengendali, yaitu:

- 1) Mengadakan koordinasi dengan seluruh instansi terkait pada saat bencana
- 2) Terkendalinya rangkaian penanganan kedaruratan bencana erupsi Gunung Kelud secara cepat dan responsif
- 3) Terkoordinirnya upaya penanggulangan bencana dan bantuan yang mengalir saat erupsi Gunung Kelud terjadi
- 4) Terdatanya kerugian dan korban akibat bencana erupsi Gunung Kelud



Gambar 12. SOP Sektor Posko Pengendali

Sumber: Data Penulis

Berikut ini merupakan daftar kegiatan pelaksanaan tanggap darurat pada sektor posko pengendali saat terjadinya bencana erupsi Gunung Kelud tahun 2014:

Tabel 7. Daftar Kegiatan Pelaksanaan Tanggap Darurat Sektor Posko Pengendali

Kegiatan	Pelaku	Waktu
Pemantauan status Gunung Kelud	- Muspika	Setiap hari
Pendataan cepat / <i>Rapid Assesment</i>	- BPBD	Saat kejadian
Mendirikan dan menentukan jalur komunikasi	- PMI - Masyarakat - Relawan	Saat kejadian
Pengolahan data dan informasi	- RAPI	Setiap hari
Pencairan dana tanggap darurat APBD	- Orari - Rakom - Tim Siaga	Saat kejadian
Sistem pelaporan	Desa	Setiap hari
Mengkoordinasikan semua sektor		Setiap hari

Sumber: BPBD Kabupaten Malang



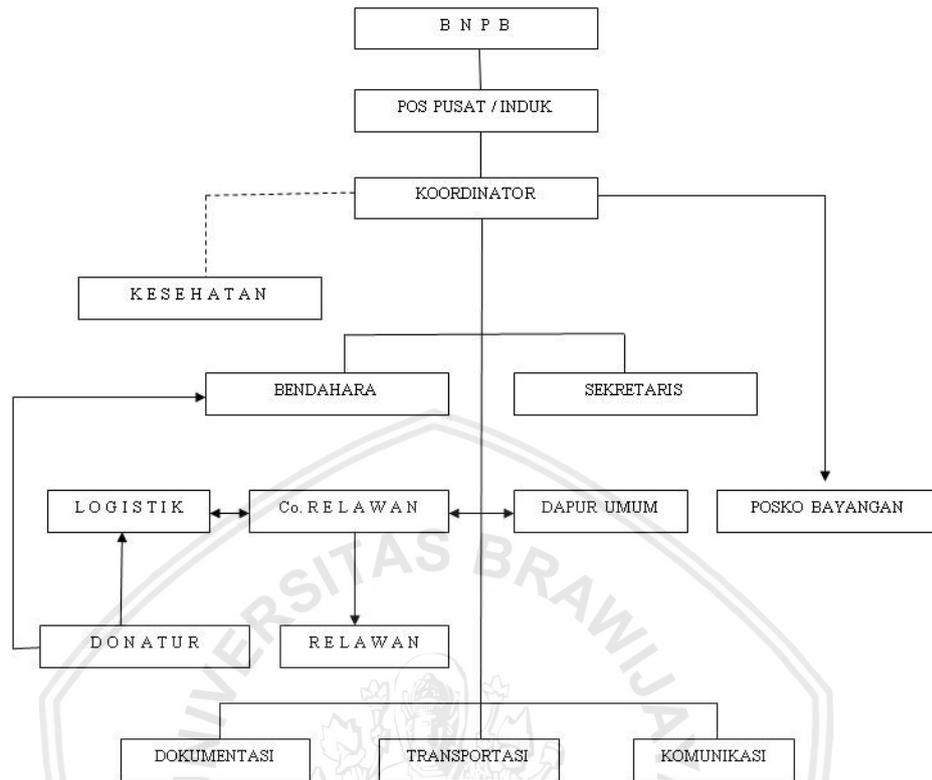
Gambar 13. Koordinasi Bersama Pemerintah Kabupaten Malang
Sumber: BPBD Kabupaten Malang

Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa sedang dilaksanakannya rapat koordinasi jajaran instansi Pemerintah Kabupaten Malang di Villa Taman Wisata Selorejo yang digunakan sebagai posko pengendali induk utama penanggulangan bencana erupsi Gunung Kelud. Pada rapat tersebut dipimpin oleh Dandim dari KODIM 0818 Kepanjen yang mengenakan seragam dinas TNI hijau bersama Kepala Pelaksana Tanggap Darurat Erupsi Gunung Kelud dari BPBD Kabupaten Malang yang mengenakan seragam oranye. Serta dihadiri oleh perwakilan anggota relawan PMI Kabupaten Malang. Rapat tersebut bertujuan untuk menyusun rencana penanggulangan bencana Gunung Kelud mulai dari penentuan lokasi pos pengungsian, alur evakuasi korban, tanggap darurat sarana dan prasarana umum sementara, hingga penanganan pasca erupsi. Kegiatan rapat koordinasi rutin dilakukan selama keadaan aktivitas Gunung Kelud menunjukkan tanda-tanda diluar aktivitas normal. Hal ini sejalan dengan penuturan Bapak Suhartanto, ST selaku Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang pada saat wawancara, sebagai berikut:

“Biasanya setiap sore ada rapat pimpinan di tempat lokasi cipta karya. Bencana Erupsi Gunung Kelud. Sekalian kroscek data atau *update* data kerusakan akibat bencana dari masing-masing SKPD, misal untuk kerusakan rumah dilaporkan oleh Dinas Cipta Karya. Kemudian, pasti ada struktur pada saat bencana (tanggap darurat) yang dikomando oleh Dandim, karena mereka memiliki anggota-anggota yang tangguh. Struktur itu sesuai dengan instruksi Bupati yang kemudian menunjuk Dandim (Kodim 0818) sebagai pemegang komando” (Wawancara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, pukul 12:44 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Susunan struktur posko pengendali dibentuk secara *insidental* atau secara langsung pada saat terjadi bencana. Penyusunan tersebut dilaksanakan pada saat proses rapat koordinasi semua jajaran instansi pemerintah yang terkait. Bapak Leonard Agus Supardhy, S.Sos selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang juga menambahkan bahwa:

“Setiap ada bencana besar, pasti ada susunan strukturnya. Tidak terkecuali pada bencana Erupsi Gunung Kelud tahun 2014 kemarin. Pada saat Gunung Kelud statusnya sudah waspada dan terus menunjukkan kenaikan sampai awas, kita (aktor penanggulangan bencana erupsi Kelud) langsung mengadakan rapat untuk membentuk struktur koordinasi penanganan kedaruratan dengan nama “Sistem Komando Tanggap Darurat”. Sehingga meskipun masing-masing organisasi berjalan sendiri-sendiri sesuai fungsinya, namun tetap dibawah satu komando BPBD dan dibawah *incident commander* (dandim)” (Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, pukul 10:52 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).



Gambar 14. Struktur Organisasi Relawan Penanggulangan Erupsi Gunung Kelud Tahun 2014
Sumber: BPBD Kabupaten Malang

Pada saat erupsi terjadi, tim posko pengendali segera langsung terjun ke lapangan untuk melakukan kegiatan pendataan kerusakan (*rapid assessment*) bangunan rumah warga, bangunan tempat ibadah, sekolah, maupun kerugian materi yang dialami oleh masyarakat wilayah yang terdampak erupsi. Dibawah ini merupakan rekapitulasi data kerusakan rumah warga di wilayah Kabupaten Malang:

Tabel 8. Rekapitulasi Kerusakan Bangunan Rumah Warga akibat erupsi Gunung Kelud Tahun 2014

Kecamatan	Kerusakan			Total (Rp)
	Berat	Sedang	Ringan	
Pujon	0	2	0	105.000.000
Ngantang	1.237	1.014	1.162	246.750.000.000
Kasembon	9	52	216	6.142.500.000
Total Rumah	1.246	1.068	1.378	252.997.500.000

Sumber: BPBD Kabupaten Malang

Dari hasil pengkajian tim posko pengendali yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Malang dan para anggota *rapid assessment* dari Kodim 0818 hingga tanggal 20 Februari 2014 menunjukkan bahwa kerusakan rumah warga terbanyak berada di wilayah Kecamatan Ngantang, yakni ada 1.237 rumah warga yang rusak berat, 1.014 rumah rusak sedang, 1.162 rumah rusak ringan dengan total kerugian materi sebesar 246 Milyar rupiah.



Gambar 15. Rumah warga Dusun Munjung, Desa Pandansari,
Kecamatan Ngantang
Sumber: BPBD Kabupaten Malang



Gambar 16. Rumah warga Dusun Pait, Desa Pandansari,
Kecamatan Ngantang
Sumber: BPBD Kabupaten Malang

Selain merusak banyak rumah warga masyarakat, erupsi Gunung Kelud juga merusak rumah ibadah yang ada di Kecamatan Ngantang dan

Kasembon. Dari tabel rekapitulasi dibawah ini, dapat dilihat bahwa tempat ibadah yang banyak mengalami kerusakan adalah di Kecamatan Ngantang dengan total sebanyak 36 tempat ibadah mengalami kerusakan. Hal tersebut dikarenakan arah material hasil erupsi Gunung Kelud mengarah ke wilayah Kecamatan Ngantang. Padahal menurut keterangan BPBD Kabupaten Malang, dari riwayat erupsi Gunung Kelud sebelumnya sebagian besar lontaran material erupsi mengarah ke Barat (ke arah Blitar dan Kediri).

Tabel 9. Rekapitulasi Kerusakan Tempat Ibadah akibat erupsi Gunung Kelud Tahun 2014

Kecamatan	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Total (Rp)
Pujon	0	0	0	0
Ngantang	2	13	21	867.500.000
Kasembon	0	0	1	14.000.000
Total	2	13	22	881.500.000

Sumber: BPBD Kabupaten Malang

Akibat dari adanya bencana erupsi Gunung Kelud di tahun 2014 menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian warga di Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Tanpa adanya sistem koordinasi dan kerjasama lintas sektoral antar instansi pemerintahan maupun non pemerintah, pelaksanaan penanggulangan bencana erupsi Gunung Kelud tahun 2014 tidak akan dapat berhasil. Karena dengan waktu yang sangat singkat para aktor yang terkait dalam

penanganan kedaruratan erupsi berupaya secara cepat, sigap, dan responsif menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan upaya tanggap darurat erupsi Gunung Kelud dibantu oleh para relawan baik dari sektor pemerintahan maupun non pemerintahan yang terpusat dibawah satu pos kendali dengan sistem komando tanggap darurat yang di komando oleh Dandim 08018. Berikut ini merupakan data para relawan yang berkontribusi dalam penanganan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud, yaitu:

Tabel 10. Rekapitulasi Relawan Bencana Gunung Kelud

NO	ASAL	JUMLAH (ORANG)
1	BPBD KABUPATEN MALANG	19
2	PMI KABUPATEN MALANG	150
2	FAK. KEDOKTERAN UB	24
3	SENKOM	8
4	SMAN 2 BATU	4
5	CAKRA HUSADA	5
6	PMI KOTA MALANG	82
7	TFC KOTA MALANG/ BAKESBANGPOL	13
8	SAR MAPALA UII JOGJA	27
9	HORISON UTAMA HOTEL	22
10	NASADUKA (NUSANTARA BERDUKA)	10
11	GAFATAR MALANG	10
12	SAR SURABAYA	26
13	FKPAP PONOROGO	10
14	TAGANA	45

15	SATGANA	45
16	UNMER	8
17	UNMUH	8
18	ORARI	2
19	BERANTAS	4
20	RAPI	4
21	JANGKAR KELUD	40
22	LINMAS	55
23	KARANG TARUNA	20
24	ICOPRO TEAM (BALI)	7
	TOTAL	648

Sumber: BPBD Kabupaten Malang

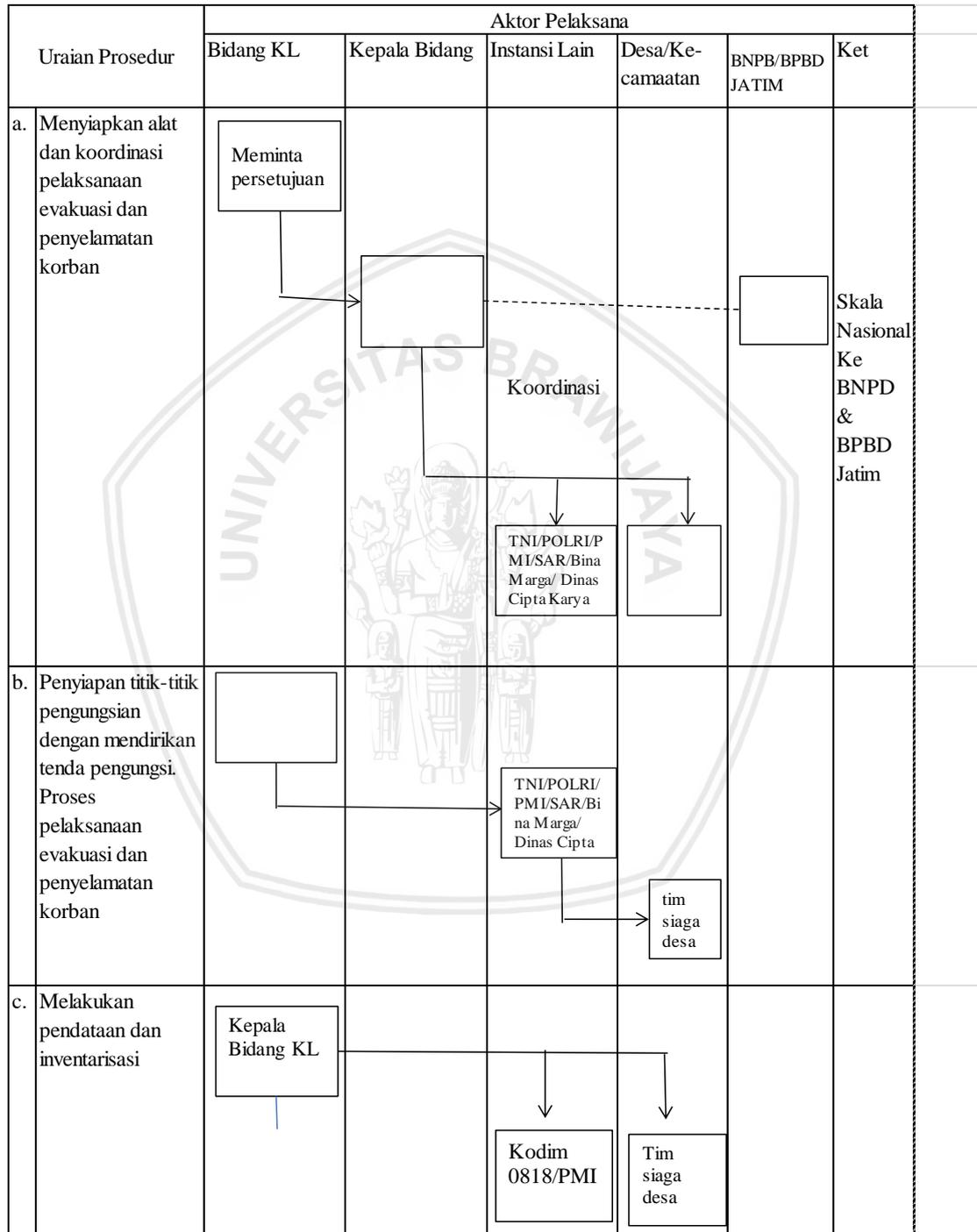
b) Pelaksanaan Sektor Evakuasi Korban

Kondisi letusan Gunung Kelud berdampak pada masyarakat sekitar wilayah Gunung Kelud yang terdampak erupsi seperti di Kecamatan Ngantang dan Kasembon. Banyak warga yang perlu diselamatkan dan dievakuasi ketempat yang lebih aman. Sehingga Pemerintah Kabupaten Malang berada dibawah komando Kodim 0818 Kepanjen dan BPBD Kabupaten Malang, dibantu oleh SKPD yang terkait beserta anggota tim relawan bekerjasama melakukan penanganan evakuasi korban erupsi beserta evakuasi ternak-ternak warga.

Evakuasi korban pada keadaan darurat ini memiliki sasaran sebagai berikut:

- 1) Teridentifikasinya jumlah korban baik yang meninggal, selamat, maupun luka-luka.

- 2) Terselamatkannya jiwa yang masih dapat diselamatkan
- 3) Terselamatkannya harta benda pengungsi



Gambar 17. SOP Sektor Evakuasi dan Penyelamatan Korban
Sumber: Data Penulis

Adapun fokus kegiatan pada pelaksanaan sektor evakuasi korban erupsi Gunung Kelud tahun 2014 yaitu:

Tabel 11. Daftar Kegiatan Pelaksanaan Tanggap Darurat Sektor Evakuasi

NO	KEGIATAN	PELAKU	WAKTU
1	Menyediakan dan mengumpulkan alat untuk evakuasi baik untuk evakuasi orang maupun harta benda/ternak	<ul style="list-style-type: none"> - TNI, - POLRI, - LINMAS, - POL PP, - Relawan - Komunitas - Ormas - SAR - PMI - Tim Siaga Desa 	Sebelum kejadian
2	Membuat sarana transportasi yang efisien dan efektif		Sebelum kejadian
	Melakukan evakuasi (manusia, aset dan dokumen penting)		Saat kejadian
3	Menyediakan lahan untuk evakuasi orang maupun harta benda		Sebelum kejadian
4	Pendataan dan Inventarisasi evakuasi		Setelah kejadian

Sumber: BPBD Kabupaten Malang

Pada saat Gunung Kelud mengeluarkan letusan kecil dan status aktivitas dinaikkan menjadi Awas (bahaya tertinggi) pada pukul 21:15 WIB, Pemerintah Kabupaten Malang mulai melakukan proses evakuasi penyelamatan warga menuju desa-desa yang ada di Kecamatan Ngantang dan Kasembon. Proses evakuasi tersebut membutuhkan kerja keras karena dengan rentang waktu kenaikan status Gunung Kelud dari Awas ke Erupsi sangatlah singkat. Hanya tersedia waktu sekitar 1 jam, sehingga proses evakuasi korban tersebut harus dilakukan dengan cepat. Hal tersebut sejalan dengan penuturan dari Bapak Leonard Agus Supardhy, S.Sos

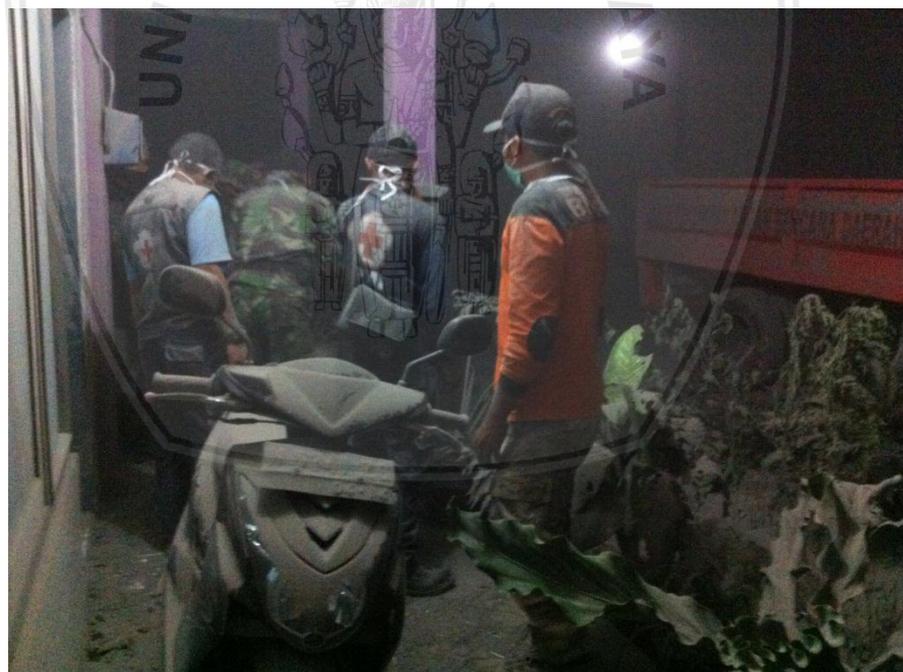
selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang pada saat proses wawancara, yaitu:

“Pada tanggal 13 Februari 2014 sore hingga maghrib aktivitas gempa Gunung Kelud mulai naik dan intensitasnya sering. Kita (anggota BPBD) langsung mendirikan posko pusat di Resort Taman Wisata Selorejo, kemudian setelah rapat koordinasi dengan para pimpinan dari semua instansi yang terkait kita mulai terjun mendirikan tenda-tenda pengungsian sekaligus melakukan evakuasi warga Ngantang dan Kasembon dengan segera. Lha...kita mengevakuasi warga segini banyaknya itu dengan mengerahkan segala mobilitas yang kita miliki, baik dengan bantuan dari PMI, TNI/Polri, dan relawan. Kekuatan siapapun yang bisa menerjang badai abu itu kita siagakan. *Whipper* mobil yang bagian gosok abu itu manusia karena alat *whipper* kaca mobil sudah tidak kuat. Dengan begitu kita bisa mengevakuasi para warga yang terdampak” (Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, pukul 10:52 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Pelaksanaan tanggap darurat evakuasi korban erupsi berlangsung ditengah kondisi badai abu dan lontaran material kerikil dari letusan Gunung Kelud. Ditambah dengan kondisi waktu dimalam hari membuat upaya penyelamatan menjadi sangat ekstra kerja keras. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang dituntut secara cepat dan responsif untuk mengevakuasi seluruh warga yang ada di Kecamatan Ngantang dan Kasembon ke tempat yang lebih aman.



Gambar 18. Evakuasi Korban Erupsi
 Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Malang



Gambar 19. Evakuasi oleh Petugas BPBD Kabupaten Malang
 bersama relawan
 Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Malang

Kedua gambar diatas merupakan hasil dokumentasi dari BPBD Kabupaten Malang pada saat melakukan upaya evakuasi penyelamatan

korban bersama para anggota relawan. Gambar tersebut diambil pada saat Gunung Kelud erupsi sekitar pukul 10 malam. Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Malang mengenakan seragam berwarna oranye sedang melakukan penjemputan ke salah satu rumah warga bersama dengan tim relawan PMI yang dibantu oleh para anggota TNI. Mereka menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut para korban ke pos-pos pengungsian yang telah disediakan.

Sedangkan pada gambar dibawah ini merupakan proses evakuasi korban pada dini hari tanggal 14 Februari 2014. Proses evakuasi terus berjalan terus menerus hingga seluruh masyarakat yang ada di dua kecamatan tersebut terangkut semua ke pos pengungsian. Seluruh armada transportasi dari instansi yang terkait dikerahkan, agar tujuan penyelamatan warga yang terdampak dapat berhasil dilaksanakan. Para anggota TNI/Polri yang terlatih sudah siap siaga berada dilokasi evakuasi.



Gambar 20. Evakuasi Korban oleh Petugas BPBD Kabupaten bersama relawan

Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Malang



Gambar 21. Suasana Evakuasi dibantu oleh Anggota TNI

Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Malang

Kedua gambar diatas diambil pada hari Jumat pagi tanggal 14 Februari 2014 dan masih terjadi proses gelombang evakuasi warga. Bapak Leonard Agus Supardhy, S.Sos selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang mengatakan bahwa:

“Dalam waktu 1x24 jam, pelaksanaan evakuasi warga di Ngantang dan Kasembon berhasil dilakukan. Sudah hampir semua warga dapat di evakuasi. Yang sebelumnya planning pengungsian di Selorejo kita pindahkan ke Batu. Karena prediksi kita sempat salah prediksi, sebelumnya kita mmemprediksi bahwa Selorejo aman dari dampak abu Kelud dan tenda sudah kita dirikan disana. Tapi pas *der...*kejadian, abu malah mengarah ke Selorejo dan bahkan sampai ke Pujon. Padahal dari riwayat erupsi Kelud sebelumnya, wilayah Pujon dan Ngantang yang berada di wilayah Ring I yang jaraknya cukup aman untuk mendirikan tenda pengungsian” (Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, pukul 10:52 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

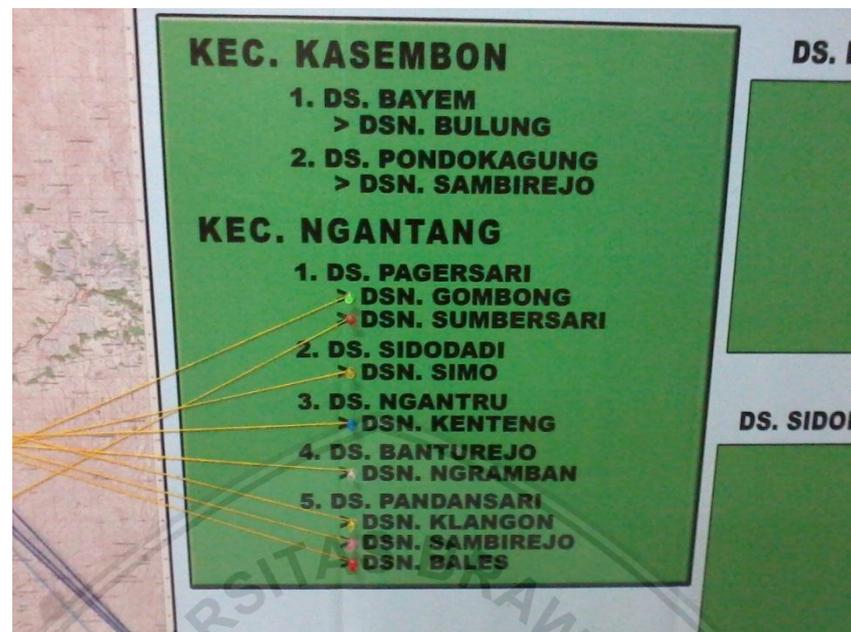


Gambar 22. Suasana di Tenda Pengungsian Darurat
Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Malang



Gambar 23. Suasana Pengungsi di Balai Desa Banturejo
Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Malang

Erupsi Gunung Kelud tahun 2014 membuat sebagian besar wilayah Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan gunung tersebut menjadi wilayah terparah terdampak erupsi. Mulai dari wilayah Kecamatan Kasembon, Ngantang, dan Pujon terkena badai abu. Bahkan sebagian wilayah Kota Batu juga terkena dampak letusan. Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya melakukan kegiatan tanggap darurat evakuasi pengungsi. Seluruh anggota BPBD Kabupaten Malang, bersama para relawan PMI, TNI/Polri, LSM Jangkar Kelud, dan masyarakat sendiri, dikerahkan untuk menyisir titik-titik tempat tinggal para pengungsi.

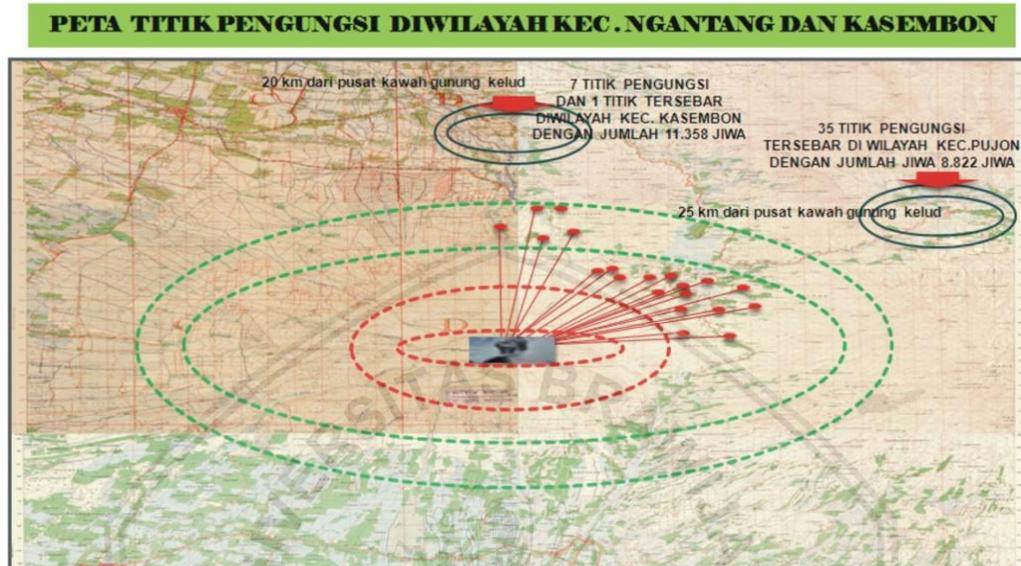


Gambar 24. Daftar Sasaran Desa Kegiatan Evakuasi Pengungsi
Di Kecamatan Kasembon dan Ngantang
Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Malang

Di Kecamatan Kasembon terdapat 2 dusun di dalam dua desa yang menjadi titik sasaran evakuasi pengungsi dan menjadi desa yang terdampak erupsi, masing-masing dusun tersebut yaitu Dusun Bulung, Desa Bayem dan Dusun Sambirejo Desa Pondokagung. Kemudian di Kecamatan Ngantang terdapat 5 desa terdampak yang menjadi sasaran evakuasi pengungsi, yaitu Dusun Gombang dan Dusun Sumbersari yang berada di wilayah Desa Pagersari, Dusun Simo Desa Sidodadi, Dusun Kenteng Desa Ngantru, Dusun Ngramban Desa Banturejo, serta tiga dusun di Desa Pandansari yakni Dusun Klagon, Sambirejo, dan Bales.

Sedangkan pos-pos pengungsian tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan hingga menyebar ke Kota

Batu. Dibawah ini merupakan peta penyebaran titik tempat pengungsi erupsi Gunung Kelud:

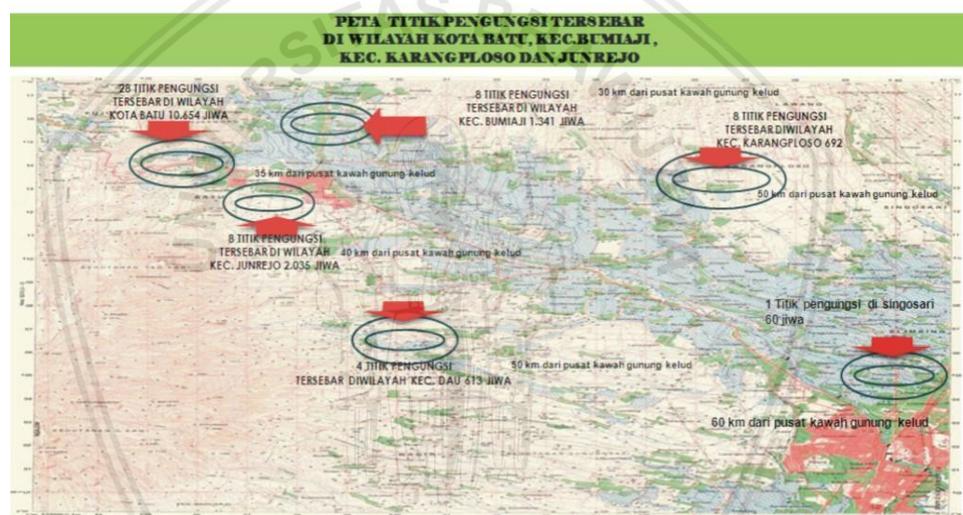


Gambar 25. Peta Titik Pengungsian di Kecamatan Ngantang dan Kasembon
Sumber: BPBD Kabupaten Malang



Gambar 26. Daftar Tempat Pengungsian Kecamatan Kasembon dan Ngantang
Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Malang

Ada 1 titik pos pengungsian di Kecamatan Kasembon, yakni di SMPN 1 Kasembon yang digunakan sebagai lokasi pengungsian. Selanjutnya ada 7 titik tempat pengungsian yang tersebar di Kecamatan Ngantang, yakni berada di Lapangan Bola Selorejo, Lapangan Golf Selorejo, Gedung Mawar, Gedung Tirtaloka, Gedung Widyatirta, Gedung Jasatirta, dan di Kantor Desa Banturejo. Serta terdapat 35 titik pengungsian yang tersebar di wilayah Kecamatan Pujon.



Gambar 27. Peta Titik Pengungsian di Kecamatan Bumiaji, Junrejo, dan Karangploso
Sumber: BPBD Kabupaten Malang

Tabel 12. Rekapitulasi Pengungsi di seluruh wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu

No	Lokasi Pengungsian	Jumlah Pengungsi
1	Kecamatan Pujon	8.822
2	Kecamatan Kasembon	11.358
3	Kecamatan Karangploso	692
4	Kecamatan Dau	613
5	Kecamatan Batu	10.654
6	Kecamatan Bumiaji	1.341
7	Kecamatan Junrejo	2.035

8	Kecamatan Singosari	60
Jumlah Total		35.575

Sumber: BPBD Kabupaten Malang

Selain itu, titik lokasi pengungsian juga tersebar hingga ke wilayah Batu dan Kecamatan Karangploso, bahkan hingga ke Kecamatan Singosari. Di wilayah Kota Batu tersebar 44 titik pengungsian dengan jumlah pengungsi sebanyak 14.030 jiwa. Di wilayah Kecamatan Karangploso terdapat 8 titik pengungsian dengan jumlah pengungsi sebanyak 692 jiwa. Di wilayah Kecamatan Dau ada 4 titik pos pengungsian dengan jumlah 613 jiwa pengungsi, dan di wilayah Kecamatan Singosari terdapat 1 titik pengungsian dengan jumlah pengungsi sebanyak 60 jiwa. Dengan demikian titik pengungsian terbanyak berada di Kota Batu, karena Pemerintah Kota Batu turut berkontribusi membantu penanganan kedaruratan dalam sektor evakuasi pengungsi. Hal tersebut sesuai dengan penuturan dari Bapak Suhartanto, ST selaku Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang saat proses wawancara yang menyatakan bahwa:

“Sebelumnya, Ngantang sempat diprediksi oleh BPBD merupakan wilayah kecamatan yang tidak akan terdampak oleh karena itu BPBD membuat skenario pengungsian dengan menyewa resort tempat wisata Selorejo, kec. Ngantang. Ternyata diluar prediksi diluar peta rawan bencana erupsi terdampak erupsi Gunung Kelud, yang biasanya letusan mengarah ke Blitar & Kediri, malah dampaknya lebih besar mengarah ke Kab. Malang. Jadi wilayah Kabupaten Malang menjadi wilayah terparah terdampak erupsi. Lalu pihak Pemerintah Kota Batu membantu menyediakan tempat pengungsian di wilayahnya. Akhirnya dibuatlah kerjasama dengan Pemerintah Kota Batu terkait masalah pengungsian secara

mendadak” (Wawancara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, pukul 12:44 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Setelah para pengungsi di evakuasi ke tempat-tempat pengungsian, mereka kemudian di data oleh para tim-tim Reaksi Cepat. Selanjutnya dilakukan pengelompokkan pengungsi berdasarkan tempat asal, jenis kelamin, usia. Bahkan disana ada pos-pos khusus kesehatan bagi para pengungsi ibu hamil, balita, dan lansia. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Leonard Agus Supardhy, S.Sos selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang sebagai berikut:

“Setelah dievakuasi ketempat pengungsian, disana ada tim bagian mendata karena harus didata alamatnya asli mana, dapat jatah makan dan kebutuhan apa saja. Ada tim-tim khusus yang mengkaji cepat bagian kebutuhan barang apa saja dan fasilitas kesehatan apa saja yang urgent diperlukan. Karena pada saat awal kejadian kita tidak punya list /baeang yang dibutuhkan. Didata semua, yang sakit ada yang merawat (tim khusus kesehatan) dan tempat khusus kesehatan (pos kesehatan). Yang namanya bencana itu tidak hanya ditangani oleh BPBD saja, semua instansi yang terkait turut terlibat, ada dari dinas kesehatan, tentara kesehatan. Semua kendali dipegang BPBD, namun instansi terkait menjalankan fungsinya masing-masing” (Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, pukul 10:52 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

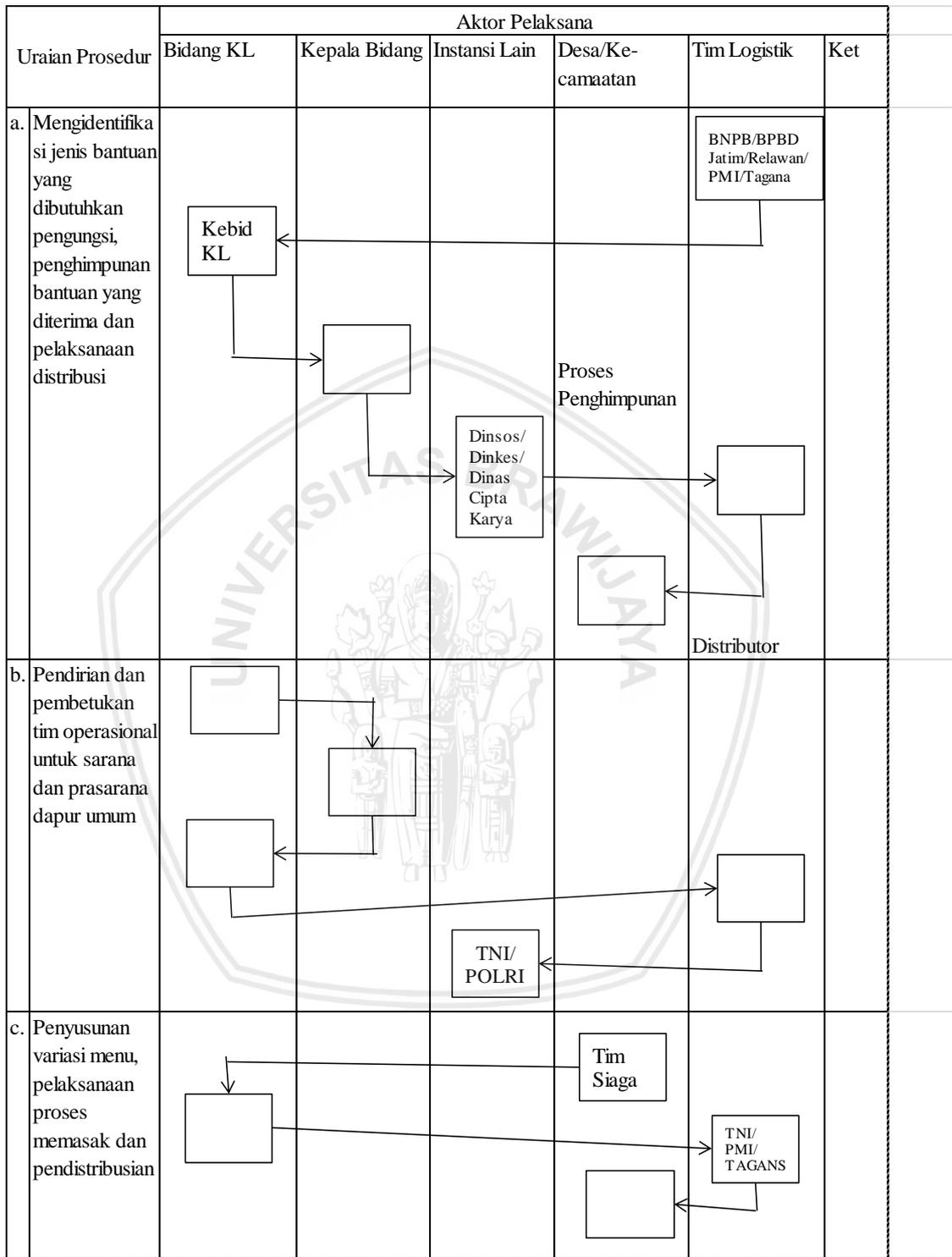
c) Penghimpunan dan Penyaluran Bantuan Logistik

Erupsi Gunung kelud mengakibatkan banyaknya gelombang pengungsian masyarakat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, didirikan posko pengungsian di wilayah Kota Batu, Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Kasembon. Pada kondisi tersebut masyarakat sangat membutuhkan

bantuan berupa pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan harian lainnya. Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan penyaluran bantuan logistik untuk para korban erupsi Gunung Kelud adalah:

- 1) Terpenuhinya semua kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari balita sampai kepada orang tua dan petugas.
- 2) Terlaksananya penerimaan, penyortiran dan pendistribusian logistik dengan baik.





Gambar 28. SOP Penghimpunan dan Pendistribusian Bantuan Logistik dan Dapur Umum
 Sumber: Data Penulis

Kegiatan sektor logistik bertugas untuk mempersiapkan kebutuhan para korban bencana dan petugas pertolongan kedaruratan dalam bencana Erupsi Gunung Kelud. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

Tabel 13. Daftar Kegiatan Pelaksanaan Penghimpunan dan Penyaluran Bantuan Logistik

KEGIATAN	PELAKU	WAKTU
Identifikasi kebutuhan		Saat kejadian
Mengelola bantuan <ul style="list-style-type: none"> - Menerima - Memilah - Menyortir - Menyimpan - Membagi - melaporkan 	<ul style="list-style-type: none"> - TNI, - POLRI, - LINMAS, - POL PP, - KOMUNITAS, - ORMAS - SAR 	Setiap hari
Distribusi konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> - PMI 	Setiap hari
Penyediaan pakan ternak	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Siaga Desa 	Setiap hari
Pengadaan alat dan bahan		Saat kejadian

Sumber: BPBD Kabupaten Malang

Menurut keterangan dari Mbah Darmo selaku Koordinator Jangkar Kelud dan tokoh masyarakat Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon menjelaskan bahwa:

“Pada hari pertama saat bencana kemarin, logistik dari pemerintah kabupaten belum banyak masuk ke pos-pos lapang/pengungsi. Karena apa, bantuan yang masuk dari wilayah kota berhentinya kalau gak di Batu ya di Pujon karna disana ada poskonya. Kalau yang dari barat ya sama berhentinya di wilayah Kediri. Jadi disini (Desa Pondokagung) untuk hari pertama agak terisolir bantuannya tapi untuk hari-hari berikutnya lancar” (Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, pukul 11:05 WIB di Kantor Balai Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon).

Pada sektor logistik ini sempat mengalami sedikit hambatan yaitu untuk wilayah Kasembon mengalami keterlambatan pasokan bantuan

dikarenakan jarak wilayah Kasembon dengan pos induk yang cukup jauh serta medan jalan yang berbatu tidak beraspal sehingga kurang mendukung proses pembagian logistik. Selain itu, pada hari pertama bantuan belum datang karena pemerintah masih melakukan pendataan kebutuhan dasar apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan masyarakat harus segera mendapatkan barang bantuan yang dibutuhkan. Sehingga pada hari pertama pelayanan logistik terkesan lamban.

Namun, disisi lain kontribusi masyarakat dan pihak swasta begitu besar dalam bencana erupsi Gunung Kelud tahun 2014. Banyak bantuan yang diberikan kepada korban erupsi melalui Pemerintah Kabupaten Malang maupun melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bantuan yang datang umumnya tidak hanya berupa bantuan makanan. Namun juga berupa bantuan-bantuan lainnya seperti pakaian, selimut, perlengkapan bayi, obat-obatan, hingga bahan bangunan untuk memperbaiki rumah warga yang tertimpa lontaran material erupsi. Bantuan-bantuan yang datang tersebut dikumpulkan dan didata di pos induk yang ada di Taman Wisata Selorejo, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang.

Kurang dari satu hari, begitu banyak bantuan yang terkumpul dari masyarakat maupun pihak swasta. Bahkan pihak pemerintah kalah *start* dalam memberikan bantuan kepada para korban erupsi Gunung Kelud. Hal tersebut sesuai dengan penuturan dari Bapak Suhartanto, ST selaku Staf Kedaruratan dan Logistik yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah saat bencana erupsi Gunung Kelud, atensi masyarakat Indonesia sangat besar sekali, setiap hari bantuan

datang, mulai dari makanan siap saji (Mc Donald, teh botol, susu formula terbaik, Pampers terbaik, dsb). Bahkan saat masa tanggap darurat selesai, bantuan tersebut masih ada dan dibagikan kepada para pengungsi. Masyarakat sangat cepat dalam merespon terjadinya bencana. Bantuan dari masyarakat sangat cepat berdatangan. Ketika gunung Kelud erupsi pada Kamis malam, bantuan sudah banyak yang berdatangan di Jumat sore. Bantuan dari pemerintah saja baru datang tiga hari kemudian, karena menunggu hasil data dari tim kaji cepat terkait barang apa saja yang dibutuhkan pengungsi” (Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2019, pukul 12:44 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Dengan beragam banyaknya bantuan yang terhimpun dari masyarakat tentunya sangat membantu meringankan beban dari korban bencana erupsi Gunung Kelud. Selain dari masyarakat, bantuan juga berdatangan dari banyak perusahaan-perusahaan besar. Bantuan yang mereka berikan kepada para pengungsi tersebut merupakan salah satu bentuk upaya CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau biasa dikenal dengan tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah PT Gudang Garam Tbk. Bapak Leonard Agus Supardhy, S.Sos selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang mengatakan bahwa:

“Kemarin PT Gudang Garam mengirimkan 6000 bok air mineral dan mie instan ke pos induk Selorejo. Namun bantuan itu mengalami penumpukan karena sudah banyak juga yang mengirimkan air mineral dan makanan siap saji. Padahal dilokasi erupsi membutuhkan barang-barang material untuk memperbaiki atap rumah seperti genting, asbes, reng kayu, dan material lainnya. Sebenarnya baik sih, perusahaan mengirimkan bantuan tersebut tapi setidaknya ada tim khusus dari perusahaan tersebut yang diterjunkan langsung ke lokasi untuk mengkaji bantuan apa saja yang dibutuhkan disini, tidak langsung menerjunkan banyak air mineral karena mungkin mereka menilai bahwa dilokasi bencana itu pasti membutuhkan air bersih dan makanan siap saji” (Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Februari

2019, pukul 10:52 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Barang bantuan logistik yang berdatangan di Pos Induk Selorejo, kemudian di data dan di kelompokkan berdasarkan jenisnya. Hal tersebut untuk mempermudah proses penyaluran bantuan kepada para pengungsi. Berikut ini merupakan sebagian data bantuan logistik yang masuk dan telah dicatat oleh BPBD Kabupaten Malang per tanggal 20 Februari 2014:

Tabel 14. Daftar Barang masuk Posko Induk Selorejo
Jenis Barang : Sembako Campur

No	Item	Jumlah	Tgl. Masuk
1	Mie instant	29 kardus	20 Februari 2014
2	Beras (25kg 5 + 50kg 1)	6 karung	20 Februari 2014
3	Air mineral	19 kardus	20 Februari 2014
4	Susu	2 kardus	20 Februari 2014
5	Sarden	1 kardus	20 Februari 2014
6	Teh gelas	2 kardus	20 Februari 2014
7	Teh celup	1 kardus	20 Februari 2014
8	Kopi	1 kardus	20 Februari 2014
9	Roti	1 kardus	20 Februari 2014
10	Sabun mandi	1 kardus	20 Februari 2014
11	Pasta gigi	1 kardus	20 Februari 2014
12	Obat obatan	1 kardus	20 Februari 2014
13	Shampo	1 kardus	20 Februari 2014
14	Kabel listrik	2 rol	20 Februari 2014
15	Sekop	6 buah	20 Februari 2014
16	Sapu lidi	6 buah	20 Februari 2014
17	Pakaian layak pakai	8 kardus	20 Februari 2014
18	Peralatan mandi	1 kardus	20 Februari 2014
19	Sabun cuci	2 kardus	20 Februari 2014
20	Mie instant	3 kardus	20 Februari 2014
21	Air mineral	2 kardus	20 Februari 2014
22	Logistick	1 kardus	20 Februari 2014

Sumber: BPBD Kabupaten Malang

Gambar dibawah ini menunjukkan staf BPBD Kabupaten Malang dibantu oleh para relawan saat melakukan pendataan barang bantuan yang masuk dan keluar yang disalurkan kepada para pengungsi.



Gambar 29. Pendataan Barang Bantuan Logistik
Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Malang



Gambar 30. Distribusi Bantuan Logistik Menggunakan *Flying fox*
Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Malang



Gambar 31. Distribusi Bantuan Logistik Menggunakan *Flying fox*
Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Malang

Pada kedua gambar diatas menunjukkan bahwa pihak BPBD Kabupaten Malang dibantu oleh para anggota TNI, relawan, dan masyarakat sedang melakukan proses kegiatan distribusi bantuan logistik berupa sembako dan bahan makanan ke Dusun Klangon dan Dusun Sedawon, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang dengan menggunakan media tali *flying fox* dikarenakan fasilitas jembatan penghubung antar dusun terputus akibat banjir lahar erupsi dari Gunung Kelud.

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan bantuan logistik, Pemerintah Kabupaten melalui BPBD Kabupaten Malang dibantu oleh para relawan, TNI/Polri, PMI, Tagana dalam mendirikan dan melakukan kegiatan operasional dapur umum. Tidak hanya itu, masyarakat korban pengungsi pun berbondong-bondong bergotong-royong turut serta memasak menyediakan konsumsi bagi sesama. Berikut ini merupakan

tabel kapasitas dapur umum selama bencana erupsi Gunung Kelud tahun 2014 terjadi:

Tabel 15. Kapasitas Dapur Umum Bencana Erupsi Gunung Kelud 2014

NO	TEMPAT	LOKASI / PELAKU DAPUR UMUM	KAPASITAS PRODUKSI	SATUAN	KET.
1	Kota Batu (2 lokasi)	Gedung Kesenian	2.750	Bungkus	Pengungsi dan Relawan
		Gedung Ganesha			
2	Kecamatan Kasembon (2 lokasi)	SMA PGRI	10.000	Bungkus	Pengungsi
		SMA Negeri I			
3	Kecamatan Pujon (3 lokasi)	PMI	3.500	Bungkus	Pengungsi dan Relawan
		TAGANA			
		SDN Pujonlor			
4	Selorejo (1 lokasi)	TNI	750	Bungkus	Petugas lapangan
Jumlah		8 Dapur Umum	17.000	Bungkus	

Sumber: BPBD Kabupaten Malang



Gambar 32. Kegiatan Operasional Dapur Umum
Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Malang



Gambar 33. Kegiatan Operasional Dapur Umum
Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Malang



Gambar 34. Kegiatan Pengungsi Membungkus Nasi
Sumber: Dokumentasi BPBD Kabupaten Malang

Hasil produksi dapur umum yang berupa nasi bungkus tersebut selanjutnya distribusikan ke titik-titik lokasi pengungsian yang diseluruh wilayah Kota Batu, Kecamatan Ngantang, Kasembon, dan hingga titik terjauh yaitu ke wilayah Kecamatan Karangploso dan Singosari. Nasi bungkus tersebut diberikan kepada para pengungsi, petugas pos-pos, dan kepada para semua relawan yang telah membantu pada saat penanganan darurat erupsi Gunung Kelud.

Menurut keterangan dari Mbah Darmo selaku Koordinator Jangkar Kelud dan tokoh masyarakat Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon menjelaskan bahwa

“Kalau untuk masalah puas pasti semua orang tidak akan merasa puas. Tapi secara prosedur yang dilakukan saya kira sudah berjalan dengan baik, pada saat status naik posko, renkon itu sudah dibentuk, pelaksanaan secara operasional itu sudah dilakukan secara bersama. Jadi semuanya sudah tertata dengan baik karena itu tadi adanya sinergitas dari teman-teman BPBD, masyarakat terdampak, dan teman-teman Jangkar Kelud. Pada waktu itu ya kebetulan saya sendiri yang disertai untuk di Posko kecamatan

situ. Tidak ada pelaksanaan yang berjalan secara sempurna tapi secara umum penanganannya berjalan dengan baik. Buktinya apa kalau dibilang baik? Satu, selama bencana erupsi kemarin tidak ada korban jiwa, yang kedua dari segi masyarakat ini yang penting terjadi evakuasi mandiri, pada waktu itu hnaya ada dua kendaraan evakuasi yang masuk dari kecamatan. Oleh karena itu masyarakat bersama teman-teman jangkar kelud menyiapkan alat evakuasi dan kendaraan secara swadaya dan mandiri” (Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, pukul 11:05 WIB di Kantor Balai Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon).

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Mbah Darmo yang menyatakan bahwa dari ketiga upaya tanggap darurat erupsi Gunung Kelud yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malang berjalan dengan cukup baik meskipun ada hal-hal yang menghambat dilapangan. Namun, berkat adanya kerjasama dan sinergitas para aktor penanggulangan bencana, permasalahan yang ada dilapangan dapat teratasi. Serta adanya evakuasi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak harus menunggu bantuan datang terlebih dahulu. Mereka berupaya melakukan penyelamatan sendiri dengan menggunakan kendaraan dan alat evakuasi yang dikumpulkan secara swadaya.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat terhadap Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pada Saat Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud

a) Faktor pendukung

Faktor pendukung dan faktor penghambat merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi keberhasilan upaya Pemerintah Kabupaten Malang pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud. Selain

dapat saling mempengaruhi, faktor-faktor tersebut dapat menjadi penentu baik buruknya pelaksanaan koordinasi maupun mekanisme upaya tanggap darurat erupsi Gunung Kelud yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malang bersama para anggota TNI/Polri, PMI, relawan, dan masyarakat.

Pelaksanaan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud pada tahun 2014 mendapatkan penghargaan khusus dalam kategori pelayanan penanggulangan bencana erupsi gunung api terbaik yang diberikan oleh BNPB di Jakarta. Karena berhasil membangun kemandirian dalam penanganan darurat yang cepat tanggap, terpadu, dan sigap. Serta tidak adanya korban jiwa dalam kejadian erupsi tersebut. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari adanya faktor pendukung terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Faktor pendukung tersebut yaitu:

1) Kerjasama Antar Aktor

Hal ini sejalan dengan penuturan dari Bapak Suhartanto, ST selaku Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang pada saat proses wawancara, yaitu:

“Ada faktor pendukungnya mbak, yaitu adanya dukungan yang baik dan kerjasama lintas sektor juga. Lalu ada dukungan dari pemerintah tetangga (Pemkot Batu). Jadi kita diapresiasi oleh pemerintah Kota Wisata Batu, BPBD-nya ikut menggalang untuk menyiapkan tempat pengungsian dan mereka turut ngopeni para pengungsi sehari-hari. Istilahnya mereka (BPBD Kota Wisata Batu) bilang seperti ini *wes pak pengungsi seng ndek Batu tak uruse, samean ngopeni seng ndek Ngantang*” (Wawancara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, pukul 12:44 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dukungan dan koordinasi dari berbagai pihak yang terkait sangat membantu keberhasilan dari proses upaya penyelenggaraan penanganan kedaruratan bencana erupsi Gunung Kelud tahun 2014 oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Keberhasilan tersebut tentunya tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Seperti pada pernyataan tersebut, pemerintah tetangga yakni Pemerintah Kota Batu turut berkontribusi dalam penanganan tanggap darurat evakuasi pengungsi. Pihak Pemerintah Kota Batu bersedia menyediakan tempat pengungsian dan mengizinkan pendirian pos dapur umum.

Bapak Leonard Agus Supardhy, S.Sos selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang juga menambahkan bahwa:

“Keberhasilan dalam tanggap darurat erupsi Kelud kemarin, salah satunya dikarenakan adanya pertolongan cepat dari sinergitas dengan instansi lain, seperti dari Kodim 0818, PMI, Polisi, LSM Jangkar Kelud, Tagana, relawan mahasiswa, dan banyak lagi. Para anggota TNI, Polisi, PMI adalah relawan-relawan yang sudah sangat terlatih. Mereka sudah tahu dan cepat tanggap apa saja yang harus masing-masing lakukan pada saat terjun ke lapangan. Kerjasama dan koordinasi dengan merekalah salah satu faktor pendorong suksesnya penanggulangan bencana erupsi ini” (Wawancara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2019, pukul 10:52 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Sinergitas kerja sama dari berbagai pihak yang sudah terlatih menghadapi situasi darurat inilah yang menjadi faktor pendorong yang mempengaruhi keberhasilan upaya pemerintah Kabupaten Malang pada saat tanggap darurat erupsi Gunung Kelud.

2) Dukungan LSM Lokal

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jangkar Kelud berdiri pada tahun 2008. Lembaga ini memiliki fokus perhatian terhadap Gunung Kelud. Mereka berasal dari warga sekitar lereng Gunung Kelud yang kemudian membentuk sebuah organisasi sendiri karena adanya interaksi sesama warga yang memiliki perhatian khusus terhadap segala aktivitas yang menyangkut Gunung Kelud. Hal ini seperti penuturan Bapak Suhartanto, ST selaku Staf Kedaruratan dan Logistik yang mengatakan bahwa:

“Kemarin kita juga dibantu oleh Komunitas Jangkar Kelud. Ketika Gunung Kelud sudah menunjukkan tanda-tanda akan meletus, kita terus berkoordinasi berkomunikasi dengan komunitas Jangkar Kelud tersebut. Karena mereka penduduk asli sana yang sudah paham sekali dengan kondisi sana. Mereka juga memiliki atensi khusus tentang masalah Gunung Kelud dan pendidikan serta keterampilan penanganan kebencanaan mereka lumayan tinggi. Bahkan ketua koordinatornya, Mbah Darmo (nama asli Bapak Sudarmanto) sampai mengambil pendidikan S2 nya di Jogja. Mereka komunitas Jangkar Kelud sudah tanggap dan *merekodoyo* (swadaya mandiri) urusan Gunung Kelud, mulai dari pemasangan rambu-rambu bahaya erupsi, sosialisasi ke masyarakat, dan sudah mempersiapkan transportasi secara mandiri untuk mengevakuasi warga. Jadi tanpa menunggu tim BPBD datang, mereka sudah langsung bergerak” (Wawancara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, pukul 12:44 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

3) Dukungan Masyarakat

Selain kontribusi kerjasama dari pihak LSM dan instansi pemerintah, dalam pelaksanaan tanggap darurat Erupsi Gunung Kelud juga didukung dengan adanya banyak bantuan dari masyarakat seluruh Indonesia. Mereka memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap

sesama. Hal tersebut sesuai dengan keterangan hasil wawancara dengan Bapak Sutanto, ST selaku staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang sebagai berikut:

“Alhamdulillah saat bencana erupsi Gunung Kelud, atensi masyarakat Indonesia sangat besar sekali, setiap hari bantuan datang, mulai dari makanan siap saji (Mc Donald, teh botol, susu formula terbaik, Pampers terbaik, dsb). Bahkan saat masa tanggap darurat selesai, bantuan tersebut masih ada dan dibagikan kepada para pengungsi. Masyarakat sangat cepat dalam merespon terjadinya bencana. Bantuan dari masyarakat sangat cepat berdatangan. Ketika gunung Kelud erupsi pada Kamis malam, bantuan sudah banyak yang berdatangan di Jumat sore. Bantuan dari pemerintah saja baru datang tiga hari kemudian. Istilahnya apa ya, bantuan dari pemerintah kalah start dengan bantuan yang berasal dari masyarakat, karena pihak pemerintah menunggu hasil data dari tim kaji cepat terkait barang apa saja yang dibutuhkan pengungsi.” (Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2019, pukul 12:44 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Dengan demikian ada tiga hal yang menjadi faktor pendorong terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud, yakni pertama, terjalannya sinergitas lintas sektoral antar aktor penanggulangan bencana erupsi Kelud. Kedua, adanya koordinasi dengan komunitas lokal Jangkar Kelud yang berupaya melakukan evakuasi mandiri secara swadaya bergotong-royong tanpa harus menunggu adanya aba-aba bantuan dari BPBD Kabupaten Malang. Sehingga dapat meminimalisasi jatuhnya korban jiwa dan dampak yang ditimbulkan dari bencana erupsi Gunung Kelud. Ketiga, adanya banyak bantuan dan atensi dari masyarakat seluruh Indonesia yang saling tolong menolong dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama.

b) Faktor Penghambat

Disamping ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambat yang mempengaruhi proses pelaksanaan upaya tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud tahun 2014. Adapun faktor penghambat tersebut, yaitu:

1) Faktor Alam

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Leonard Agus Supardhy, S.Sos selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang pada saat proses wawancara, yaitu:

“Ada kendala operasionalnya, tapi bisa dibilang cukup minim. Hanya penempatan pengungsi saja, karena jangkauannya jauh dari titik ke titik. Jarak dari titik terdampak ke titik pengungsi itu jauh. Padahal kita harus bolak-balik melakukan kegiatan evakuasi mengangkut warga. Sehingga butuh akomodasi transport yang cukup banyak. Kemudian kondisi medan jalannya yang berliku sehingga ada resiko tabrakan dengan sesama. Lalu jalannya yang licin karena tertutup abu, dan erupsi Kelud terjadi malam hari sehingga jarak pandang kita tidak sampai 5 meter. Jadi harus ekstra hati-hati apalagi kita membawa para pengungsi yang tidak hanya anak muda namun juga orang tua yang lanjut usia. Dan ada lagi kendalanya, yaitu putusnya jembatan penghubung antar desa di Desa Pandansari membuat penyaluran bantuan agak terhambat. Jadi kita membuat *flying fox* sederhana” (Wawancara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2019, pukul 10:52 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Gunung Kelud meletus pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 22:50 WIB, sehingga proses upaya tanggap darurat dilakukan pada malam itu juga. Dengan kondisi jalan yang dipenuhi abu dari erupsi dan dengan jarak pandang yang tidak lebih dari 5 meter membuat pelaksanaan evakuasi korban menjadi sedikit terhambat. Ditambah dengan jalur medan yang berliku dan kondisi gelap malam membuat

para relawan tanggap darurat harus waspada untuk menghindari terjadinya tabrakan sesama truk pengangkut pengungsi. Terputusnya salah satu jembatan penghubung antar desa di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang membuat akses transportasi untuk kegiatan penyaluran bantuan logistik jadi terhambat. Hal ini disebabkan karena derasnya aliran sungai pada saat itu akibat adanya lahar dingin dari hasil erupsi Gunung Kelud. Faktor penghambat terhadap upaya tanggap darurat ini dapat dikatakan sebagai faktor kondisi alam.

2) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sedangkan menurut keterangan dari Bapak Suhartanto, ST selaku Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, ada beberapa faktor lagi yang menghambat proses tanggap darurat erupsi Gunung Kelud tahun 2014, beliau mengatakan bahwa:

“Ya kembali lagi ke masalah pokok, faktor penghambat kita (BPBD) yang pertama ya masalah keterbatasan dana. Kedua, keterbatasan personil. Kemudian dari pengungsi sendiri, tapi hambatan-hambatan tersebut bisa kita minimalisir dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang kita susun dibawah struktur komando Kodim 0818. Dulu itu ya pada saat erupsi Kelud, personil BPBD keseluruhan total 30 orang. Kita terjun semua dan langsung mencar bagi tugas saat di lapangan, kamu kesana.... kamu kesini... Dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Malang yang ada 33 kecamatan, dengan personil BPBD yang cuma 30 orang itu saja sudah tidak rasional. Kalau sekarang kita sudah nambah tiga orang menjadi 33” (Wawancara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, pukul 10:52 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Dari segi sumber daya manusia yakni kurangnya jumlah personil BPBD Kabupaten Malang juga berpengaruh terhadap kurang

optimalnya penanganan penanggulangan bencana erupsi Gunung Kelud. Sehingga BPBD Kabupaten Malang selalu membutuhkan relawan dari PMI. Karena PMI memiliki relawan yang banyak dan sudah sangat terlatih.

3) Kurangnya Sumber Dana

Bapak Suhartanto, ST selaku Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang pada saat wawancara mengatakan bahwa:

“BPBD diberikan keleluasaan penggunaan dana anggaran untuk operasional penanggulangan bencana melalui dana siap. Dana Siap pakai ini adalah dana khusus yang dialokasikan dari APBD untuk BPBD dalam menangani bencana. Jumlah dana siap pakai ini kurang lebih sekitar 1 Milyar per satu tahun anggaran. OPD lain tidak diberikan dana khusus tersebut mbak, karena OPD lain mendapat dana cadangan BTT (Belanja Tidak Terduga) khusus non program. Saat Kelud kemarin, dana siap pakai ini bisa dibilang belum mencukupi dan *mengcover* kegiatan kita ditempat bencana. Banyak sekali biaya-biaya yang harus kita keluarkan, contohnya melakukan perbaikan atap-atap rumah warga yang roboh dengan belanja material terlebih dahulu.

Dana yang digunakan untuk pelaksanaan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud ini berasal dari dana cadangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malang yang dialokasikan khusus untuk BPBD Kabupaten Malang dalam menangani kejadian bencana alam. Dana ini biasa disebut dengan Dana Siap Pakai. Besarnya dana siap pakai ini sejumlah 1 Milyar rupiah untuk periode 1 tahun. Namun, dalam pelaksanaannya dana siap pakai ini sering mengalami kekurangan karena dalam periode satu tahun bisa terjadi banyak bencana Alam. Pada saat erupsi Gunung Kelud tahun 2014 terjadi, banyak sekali kerusakan dan kerugian yang dialami masyarakat.

Karena wilayah Kabupaten Malang merupakan wilayah paling parah terdampak erupsi daripada wilayah Kediri maupun Blitar. Sehingga dana siap pakai tersebut tidak bisa mengcover semua biaya operasional tanggap darurat erupsi Gunung Kelud, meskipun bantuan logistik banyak yang berdatangan dari masyarakat maupun swasta.

4) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Seperti yang dikutip dari keterangan Bapak Suhartanto, ST selaku Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang pada saat wawancara mengatakan bahwa:

“Dulu saat Kelud meletus, alat, sarana, & prasarana kita kurang. Kita baru-baru ini punya alat berat, kalau dulu saat akan pemulihan jalan karena tertutup abu yang sangat tebal kits tidak bisa apa-apa. Jadi harus menunggu Bina Marga datang. Itupun kita belum didukung dengan *dumtruck* (truck yang bisa naik turun boxnya) sebagai sarana penunjang pengangkutan. Jadi saat bencana, kita mesti tunggu-tungguan sehingga kurang cepat & efektif” (Wawancara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, pukul 12:44 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Berdasarkan keterangan hasil wawancara diatas, menurut Bapak Suhartanto, ST faktor penghambat lain dalam pelaksanaan penanggulangan bencana erupsi Gunung Kelud tahun 2014 adalah kurang tersedianya sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Malang. Sehingga pada saat tanggap darurat erupsi membutuhkan fasilitas transportasi dan alat berat yang dimiliki oleh dinas lain, seperti *dumtruck* milik bina marga, truk pengangkut pengungsi milik Kodim 0818, dan truk evakuasi milik PMI.

5) Kondisi Pengungsi

Faktor penghambat terakhir berasal dari para pengungsi, yakni tidak sedikit pengungsi yang lebih memilih untuk mengungsi ke rumah saudaranya. Namun, hal ini menjadi penghambat kinerja tim kaji cepat BPBD Kabupaten Malang dan para relawan saat melakukan pendataan korban erupsi. Sehingga pihak BPBD bersama tim relawan kesulitan menemukan para pengungsi-pengungsi tersebut, karena mereka tidak ada di pos-pos pengungsian. Kemudian banyak pengungsi yang khawatir tidak mendapat jatah konsumsi dan ingin diprioritaskan. Hal tersebut sesuai dengan keterangan hasil wawancara dengan Bapak Suhartanto, ST selaku Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya faktor penghambat di lapangan itu banyak sekali dari pihak pengungsi. Untuk dibagian evakuasi itu banyak sekali kendala. Karena mereka tidak mau diungsikan kalau tidak dengan hewan ternaknya. Kedua, seksi dapur umum itu juga ada kendalanya. Ketika kita mau memberikan konsumsi ke lokasi-lokasi pengungsian, akomodasi konsumsi kita dicegat atau istilahnya dipalak oleh para pengungsi yang ingin didahulukan atau dengan kata lain minta diprioritaskan dari pengungsi lain. Dengan alasan kita sudah lapar pak, padahal sudah ada jatahnya masing-masing. Yang *nyegat* itu tidak 1 atau 2 orang tapi puluhan orang akhirnya berebut dan ribut. Padahal sudah ada jatahnya per lokasi pengungsian. Lalu ada lagi mbak, yaitu banyak orang yang mengungsi tanpa konfirmasi ke rumah saudaranya. Nah kita kan mendatanya jadi kesulitan. Di pengungsian tidak ada, di rumah tidak ada, apakah orang ini tertimbun di sawah atau dimana. Padahal mereka mengungsi ke rumah saudaranya yang ada di Sidoarjo, Malang, Kediri, dll” (Wawancara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, pukul 12:44 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

C. Analisis Data

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud

Penanggulangan bencana dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. penanggulangan bencana merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk dapat mewujudkan tujuan tertentu melalui usaha bersama. Di Indonesia sistem penanggulangan bencana lebih dikenal dengan nama manajemen bencana. Manajemen bencana didefinisikan sebagai istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk merespons bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana yang merujuk pada manajemen resiko dan konsekuensi bencana. Manajemen bencana meliputi rencana, struktur, serta pengaturan yang dibuat dengan melibatkan usaha dari pemerintah, sukarelawan, dan pihak-pihak swasta dengan cara yang terkoordinasi dan komprehensif untuk merespon seluruh kebutuhan darurat. Oleh karena itu manajemen bencana terdiri dari semua perencanaan, pengorganisasian, dan mobilisasi sumberdaya yang dibutuhkan untuk menangani semua fase bencana.

Siklus manajemen bencana di Indonesia memiliki 4 tahapan yang telah tertuang dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana. Keempat tahapan tersebut adalah mitigasi bencana, kesiapsiagaan (*preparedness*), tanggap darurat (*emergency responses*), dan pemulihan (*recovery*). Tahap mitigasi dan kesiapsiagaan merupakan kegiatan untuk meminimalisir resiko yang ditimbulkan oleh suatu bencana. Tahap ini berada pada fase pra bencana yakni masa sebelum terjadinya bencana. Sedangkan tahap tanggap darurat merupakan fase dimana bencana itu terjadi. Pada tahapan ini meliputi kegiatan perencanaan dan penanganan kedaruratan pada saat terjadi keadaan darurat. Sedangkan tahap pemulihan merupakan awal upaya pembangunan kembali melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurut Nurjanah (2011:43) kegiatan manajemen bencana merupakan kegiatan yang tidak bisa berdiri dan dilaksanakan oleh lintas sektor yang dikoordinasi oleh suatu lembaga kebencanaan. Masing-masing sektor memiliki peran sendiri dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan manajemen bencana adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu bentuk upaya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan manajemen bencana adalah kegiatan tanggap darurat. Tanggap darurat merupakan kegiatan yang dilakukan dengan segera selama bencana terjadi. Tujuan pada tahap ini adalah untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi kerusakan harta benda, dan meningkatkan pemulihan awal dari insiden bencana.

Berdasarkan uraian tersebut, upaya pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud tahun 2014 yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malang dengan dibantu banyak instansi merupakan salah satu bentuk upaya pelayanan Pemerintah Kabupaten Malang kepada masyarakat terdampak bencana erupsi melalui lembaga kebencanaan. Tujuan dari pelaksanaan pelayanan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat di wilayah Kecamatan Ngantang dan Kasembon Kabupaten Malang yang menjadi korban terdampak terparah erupsi. Serta menanggulangi dampak yang ditimbulkan akibat erupsi Gunung Kelud dengan cepat, tanggap, dan responsif.

Menurut Emil J. Sady (dalam Arenawati 2014:9), *Local government is a political subdivision of a nation or state which is constituted by law and have substantial control over local affairs which has governing body elected or otherwise locally selected*” definisi tersebut menjelaskan bahwa pemerintah lokal adalah bagian politis dari sebuah negara, dimana diatur secara hukum dan memiliki kewenangan mengawasi masalah-masalah lokal dimana penguasa pemerintahan dipilih atau diseleksi oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu pemerintah lokal diadakan untuk menyelesaikan masalah-masalah lokal wilayah yang bersangkutan walaupun diatur oleh pemerintah pusat. Di Indonesia, hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan daerah memiliki kebijakannya sendiri untuk memulai dan

melaksanaakan kebijakan daerah serta membawa unit administrasi dan pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat setempat.

Dalam hal manajemen bencana, undang-undang tersebut telah mendukung lahirnya regulasi tentang penanganan bencana, yaitu Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menempatkan pemerintahan daerah dan masyarakat dalam posisi yang memainkan peran penting dalam menangani bencana. Banyaknya perhatian baru terhadap manajemen bencana di tingkat pemerintah daerah disebabkan oleh alasan-alasan berikut ini, yaitu pertama, manajemen bencana diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Kedua, adanya pemahaman yang berkembang bahwa pemerintah daerah memainkan peran yang paling aktif dalam operasi darurat bencana. Ketiga, adanya pergeseran pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dalam hal kegiatan bencana. Keempat, adanya kebutuhan yang berkembang untuk mengadopsi dan mengembangkan rasa lokalitas dalam perencanaan darurat bencana karena pemerintah daerah memegang tanggung jawab yang sangat penting dalam manajemen darurat bencana serta lebih cepat dan lebih efektif menanggapi bencana.

Pemerintah Kabupaten Malang sebagai pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam menyelenggarakan usaha pelayanan publiknya termasuk dalam hal upaya penanganan darurat bencana. Hal ini didasarkan pada 4 alasan seperti diatas, yakni pertama manajemen bencana

diimplementasikan oleh seluruh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing pada saat tanggap darurat erupsi Gunung Kelud tahun 2014. Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang memainkan peran yang paling aktif dalam operasi tanggap darurat bencana erupsi gunung Kelud. Ketiga, dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang merupakan hasil dari adanya pergeseran pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dalam hal kegiatan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan lembaga yang menangani kebencanaan tingkat daerah dibawah Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Sehingga pada saat tanggap darurat erupsi Gunung Kelud, BPBD Kabupaten Malang memiliki peran yang sangat penting dan bertugas sebagai koordinator tanggapdarurat. Keempat, berkembangnya rasa lokalitas dan sifar kegotong-royongan masyarakat dalam mendukung terciptanya upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang agar lebih cepat dan lebih efektif. Hal ini didukung dengan adanya komunitas Jangkar Kelud dalam membantu upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malang. Komunitas Jangkar Kelud ini merupakan lembaga swadaya masyarakat asli penduduk lereng Gunung kelud, sehingga mereka paham dengan situasi dan masalah yang terkait Gunung Kelud. Dengan rasa kepedulian dan kegotong-royongan, komunitas Jangkar Kelud turut serta mngedukasi dan membantu masyarakat agar mereka mampu

mengevakuasi diri mereka sendiri secara mandiri dengan sarana dan prasarana hasil swadaya bersama tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah atau dari BPBD Kabupaten Malang.

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa adanya dua fungsi utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai lembaga yang menangani kebencanaan tingkat pusat, yaitu a) merumuskan dan menerbitkan kebijakan tentang penanganan penanggulangan bencana, serta penanganan populasi yang mengungsi dengan cara yang efektif, dan b) mengoordinasi implementasi kegiatan penanggulangan bencana dengan cara yang terencana, terpadu, dan menyeluruh. Sehingga BNPB menyusun suatu bentuk perencanaan penanganan kedaruratan yang disebut dengan rencana kontijensi. Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Sedangkan rencana kontinjensi menurut BNPB adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu. Rencana kontijensi tersebut menjadi dasar bagi rencana operasi dan tanggap darurat. Penyusunan rencana kontijensi ini bertujuan sebagai pedoman penanganan bencana letusan Gunung Kelud pada saat tanggap darurat bencana yang cepat dan efektif. Serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (*stake holder*) yang mengambil peran dalam penyusunan kontijensi plan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sebagai pelaksana penanggulangan tingkat daerah menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana kontijensi tersebut. Rencana kontijensi merupakan pedoman dasar yang digunakan oleh BPBD Kabupaten Malang dalam menangani suatu keadaan darurat. Termasuk pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan dan melaksanakan tiga prioritas upaya terkait penanganan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud berdasarkan rencana kontijensi yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Malang. Tiga prioritas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada saat tanggap darurat erupsi Gunung Kelud tersebut yaitu:

a) Penanganan Tanggap Darurat Sektor Posko Pengendali

Pada upaya penanganan tanggap darurat sektor posko pengendali ini dilakukan dengan mendirikan pos pusat koordinasi pelaksana penanggulangan bencana erupsi Gunung Kelud di Kabupaten Malang dan sistem posko ini dilakukan dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa. Sektor posko pengendali melakukan tindakan berdasarkan standar operasional prosedur tetap penanganan kedaruratan erupsi gunung api. Pada SOP tetap erupsi gunung api tertulis bahwa:

- a. Pembentukan pos pengendali sebagai fungsi manajemen dan koordinasi penanganan erupsi.

Pada saat erupsi Gunung Kelud 2014, hal pertama yang dilakukan adalah pembentukan pos pengendali utama yang berpusat di wilayah

Resort Taman Wisata Selorejo, Desa Pandansari Kecamatan Ngantang. Posko utama ini merupakan pusat koordinasi para aktor penanggulangan bencana erupsi yang terkait, yakni Kepala BPBD Kabupaten Malang, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Dandim dari Kodim 0818 Kapanjen, Kepala PMI Kabupaten Malang, Koordinator LSM Jangkar Kelud, dan anggota relawan. Kegiatan pada pos pengendali meliputi pemantauan status Gunung Kelud dan sosialisasi *warning* bahaya kepada masyarakat.

- b. Melakukan koordinasi pembentukan struktur sistem komando tanggap darurat dan penyusunan persiapan evakuasi penyelamatan korban.

Setelah dibentuk posko utama, BPBD Kabupaten Malang melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk melakukan pendataan titik evakuasi pengungsi, harta benda, serta membuat jalur evakuasi untuk desa-desa yang ada di wilayah KRB III Kecamatan Ngantang dan Kasembon. Kegiatan ini disebut sebagai upaya pendataan cepat/*Rapid Assesment* terhadap dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung Kelud.

Serta melakukan pembentukan struktur sistem komando tanggap darurat erupsi Gunung Kelud yang dikoordinatori oleh BPBD Kabuptaen Malang dan dikomando oleh Dandim 0818 Kapanjen. Struktur tersebut bertujuan agar masing-masing aktor penanggulangan bencana erupsi Gunung Kelud bekerja secara optimal dan sesuai dengan pembagian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing. Selain

itu, pembentukan struktur ini juga bertujuan agar terbentuk jaringan komunikasi lintas sektoral yang efektif. Sehingga tidak terjadi *overlapping* tugas saat proses kegiatan tanggap darurat berlangsung.

c. Melakukan evaluasi harian

Rapat evaluasi dilakukan setiap hari selama masa tanggap darurat erupsi Gunung Kelud berlangsung. Rapat koordinasi ini dilakukan setiap sore hari dengan dipimpin oleh *incident commander* (dandim 0818) untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan pada pagi hari hingga siang hari dan menyusun rencana baru untuk penanganan hari berikutnya. Serta pada rapat ini juga membahas tentang data hasil pengkajian cepat, pencairan dana tanggap darurat APBD, dan melakukan koordinasi kembali dengan semua sektor yang terlibat dalam pelaksanaan tanggap darurat.

b) Pelaksanaan Sektor Evakuasi Korban

Upaya tanggap darurat berkaitan dengan upaya penyelamatan korban terdampak, yaitu pelaksanaan sektor evakuasi korban. Pada pelaksanaan sektor evakuasi korban dilakukan sesuai dengan SOP tetap erupsi gunung api milik BPBD Kabupaten Malang, yaitu

a. Menyiapkan alat dan koordinasi pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan korban

Menurut keterangan hasil wawancara dari Bapak Suhartanto, ST selaku staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, para anggota relawan LSM Jangkar Kelud bersama masyarakat berupaya

untuk mengumpulkan alat dan kendaraan transportasi secara swadaya, terutama alat yang digunakan untuk mengevakuasi para kelompok rentan, seperti para lanjut usia, ibu hamil, dan yang sedang sakit.

- b. Penyiapan titik-titik pengungsian dengan mendirikan tenda pengungsi dan pelaksanaan proses evakuasi dan penyelamatan korban

Tenda pengungsian didirikan sesuai dengan titik-titik hasil rapat koordinasi yang dilakukan bersama-sama. Pendirian tenda tersebut dibagi sesuai dengan pengelompokkan jenis kelamin, umur, dan tingkat kesehatan. Bapak Leonard Agus Supardhy, S.Sos selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang menjelaskan bahwa pengelompokkan tersebut dilakukan untuk mempermudah tim kaji cepat dalam melakukan pendataan pengungsi, identifikasi kebutuhan dasar pengungsi, serta memudahkan penghitungan jatah bantuan logistik serta konsumsi setiap hari. Menurut data hasil dari BPBD Kabupaten Malang, titik pos pengungsi tersebar di wilayah Kecamatan Ngantang, Kasembon, Kecamatan Pujon, Kota Wisata Batu, Kecamatan Karangploso, hingga Kecamatan Singosari.

Kemudian melakukan proses evakuasi penyelamatan korban untuk dipindahkan ke pos-pos bayangan atau pos pengungsian yang telah ditentukan dan dipetakan . Menurut keterangan dari Bapak Suhartanto, ST selaku staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, upaya evakuasi penyelamatan korban pengungsi diutamakan kelompok rentan, ibu hamil, dan balita. Upaya evakuasi korban ini

dilakukan oleh seluruh jajaran instansi Pemerintah Kabupaten Malang yang berada dibawah *incident commander* Dandim dari Kodim 0818 Kepanjen dan dikoordinasi oleh BPBD Kabupaten Malang, dibantu oleh TNI/Polri, PMI, LSM Jangkar Kelud, Tagana, Tim SAR, beserta para relawan.

c. Melakukan pendataan dan inventarisasi korban.

Pada tahap ini pengungsi yang sudah diangkut oleh truk-truk evakuasi, kemudian ditempatkan pada tenda-tenda yang telah tersedia sesuai dengan pengelompokkan masing-masing. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Leonard Agus Supardhy, S.Sos selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang menjelaskan bahwa setelah para pengungsi dibawa ke masing-masing pos pengungsian, mereka didata oleh tim kaji yang ada di pos-pos bayangan. Didata sesuai dengan tempat asal, kelompok usia, dan jenis kelamin, serta tingkat kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah proses evakuasi dan proses pendataan kebutuhan para pengungsi.

c) Penghimpunan dan Penyaluran Bantuan Logistik

Selanjutnya upaya ketiga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui BPBD Kabupaten Malang adalah penghimpunan dan penyaluran bantuan logistik. Upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malang bersama para anggota tim relawan pada

sektor penghimpunan dan penyaluran bantuan logistik dilakukan berdasarkan SOP erupsi gunung api, yaitu:

- a. Mengidentifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan pengungsi, penghimpunan bantuan yang diterima dan pelaksanaan distribusi

Tim logistik yang ada dilapangan melakukan pendataan jenis kebutuhan dasar apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Tim ini terdiri dari tim kaji cepat BPBD, PMI, Tagana, serta dibantu oleh para tim siaga desa. Selain bertugas melakukan pendataan kebutuhan dasar pengungsi, tim logistik ini juga bertugas dalam melakukan penghimpunan, pengelompokkan, dan pelaporan distribusi logistik setiap hari. Menurut keterangan dari Bapak Leonard Agus Supardhy, S.Sos selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang, bantuan dari masyarakat maupun dari pihak swasta sangat banyak sekali dan terus berdatangan di Pos Utama Selorejo. Bahkan saat masa tanggap darurat berakhir, bantuan logistik tersebut masih ada dan dibagi-bagikan kepada para pengungsi yang akan kembali pulang kerumah masing-masing.

Namun, ada beberapa jenis bantuan yang jumlahnya sangat banyak, yakni air mineral dan mie instan. Hal ini dikarenakan dari masing-masing donatur tidak melakukan assesment terlebih dahulu ke lokasi untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan pengungsi setelah masa tanggap darurat ini berakhir. Sehingga para donatur mengirimkan barang bantuan sesuai ekspektasi mereka tanpa melihat

kondisi lapangan. Bapak Leonard Agus Supardhy S.Sos menambahkan bahwa seharusnya perlu ada tim asesment dari pihak donatur untuk mengkaji barang apa saja yang dibutuhkan oleh pengungsi, karena mereka juga perlu bantuan berupa material-material bangunan untuk memperbaiki rumah-rumah mereka.

b. Pendirian dan pemetukan tim operasional untuk sarana dan prasarana dapur umum

Menurut Bapak Suhartanto, ST selaku staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, pendirian dapur umum ini dilakukan di wilayah Kecamatan Pujon dan di Kota Batu karena pihak pemerintah Kota Batu turut berkontribusi menyediakan tempat untuk pendirian pos pengungsian dan pendirian dapur umum yang berlokasi di Gedung Kesenian Junrejo. Lokasi dapur umum ini berjarak cukup jauh dari Kecamatan Ngantang maupun Kesembon karena di wilayah Ngantang dan Kasembon merupakan daerah terdampak bencana yang cukup parah sehingga hanya digunakan sebagai tempat pengungsian.

c. Penyusunan variasi menu, pelaksanaan proses memasak dan pendistribusian

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan variasi menu makanan, melaksanakan proses memasak dan mengemas makanan, dan melakukan kegiatan pendistribusian ke lokasi pengungsi. Terdapat tim pelaksana operasional dapur umum yang terdiri dari para anggota TNI, tim siaga desa, dan dibantu oleh para pengungsi sendiri.

Kemudian makanan tersebut didistribusikan ke titik pengungsian di wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang. Namun, lokasi dapur umum yang berada di wilayah Batu dan Pujon ini membuat distribusi konsumsi ke wilayah Kecamatan Ngantang dan Kasembon mengalami sedikit kendala. Menurut Bapak Suhartanto, ST selaku Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang mengatakan bahwa ada kejadian dimana pengungsi turun kejalan dan melakukan penghadangan terhadap truk pengangkut makanan dan logistik yang menuju ke wilayah Kecamatan Kasembon. Mereka minta didahulukan dan khawatir tidak mendapatkan jatah makan. Sehingga terjadi sedikit keributan akibat berebut makanan dan konsumsi yang seharusnya tiba tepat waktu serta sesuai data banyaknya jumlah pengungsi yang ada di Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon mengalami keterlambatan dan kekurangan stok konsumsi. Namun, kendala tersebut berhasil dievaluasi dan ditangani dengan bantuan pihak TNI dan Polri untuk melakukan kegiatan pengamanan dan pengawalan truk distribusi bantuan logistik yang akan menuju wilayah Kecamatan Ngantang dan Kasembon.

2. Faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud

a) Faktor pendukung

Faktor pendukung merupakan salah satu penentu keberhasilan dari pelaksanaan upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malang pada saat tanggap darurat erupsi Gunung Kelud. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan tanggap darurat tersebut, yaitu:

1) Kerjasama Antar Aktor

Pihak BPBD Kabupaten Malang yang diwakili oleh Bapak Suhartanto, ST menyatakan bahwa hal yang menjadi sebuah faktor pendukung pada proses pelaksanaan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud tahun 2014 kemarin adalah adanya dukungan dan koordinasi dari berbagai instansi pemerintah maupun non pemerintah yang sangat membantu saat proses penanganan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud 2014 kemarin. Selain itu, pemerintah tetangga yakni Pemerintah Kota Batu turut berkontribusi dalam penanganan tanggap darurat evakuasi pengungsi. Pihak Pemerintah Kota Batu bersedia menyediakan tempat pengungsian dan mengizinkan pendirian pos dapur umum. Hal tersebut sangat membantu kinerja BPBD Kabupaten Malang dalam melaksanakan proses evakuasi pengungsi.

Pada wawancara yang dilakukan dengan Bapak Leonard Agus Supardhy, S.Sos selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang mengenai faktor yang menjadi pendukung terhadap upaya tanggap darurat erupsi Gunung Kelud tahun 2014 adalah adanya sinergitas kerjasama dengan instansi lain, seperti dari Kodim 0818, PMI, Polisi, LSM Jangkar Kelud, Tagana, dan relawan mahasiswa. Para relawan tersebut, seperti anggota TNI, Polisi, PMI Kabupaten Malang adalah relawan-relawan yang sudah sangat terlatih. Mereka sering menangani keadaan darurat bencana alam, bahkan PMI Kabupaten Malang adalah salah satu relawan yang sering bekerjasama dengan BPBD jika ada bencana alam di wilayah Kabupaten Malang. Karena para relawan PMI ini jumlahnya cukup banyak dan sering melakukan latihan penanganan kedaruratan bencana. Oleh karena itu, keberhasilan dalam pelaksanaan upaya tanggap darurat erupsi Gunung Kelud tentunya tidak hanya dilakukan oleh BPBD saja. Melainkan berkat adanya kerjasama dan koordinasi bersama untuk melakukan penanggulangan bencana secara cepat, responsif, dan terpadu. Masing-masing aktor yang terlibat bekerja secara efektif sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.

2) Dukungan LSM Lokal

Disamping itu, menurut Bapak Suhartanto, ST didukung dengan adanya bantuan dari komunitas Jangkar Kelud yang terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Malang mulai dari Gunung

Kelud mengeluarkan tanda-tanda diluar aktivitas normal hingga pada saat Gunung Kelud erupsi. Komunitas Jangkar Kelud merupakan perkumpulan dari penduduk lokal asli sekitar wilayah Gunung Kelud yang memiliki perhatian khusus terhadap segala permasalahan yang menyangkut Gunung Kelud. Sehingga mereka sudah tahu dan sudah paham situasi dan medan Gunung Kelud.

Dengan adanya kerjasama bantuan dari komunitas Jangkar Kelud ini, sangat membantu tugas BPBD Kabupaten Malang pada saat sebelum kelud meletus dan pada saat penanganan tanggap darurat. Komunitas Jangkar Kelud melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat sesama warga sekitar Gunung Kelud bahwa mereka harus tetap waspada dengan tanda-tanda yang dikeluarkan oleh Gunung Kelud. Kemudian, komunitas ini juga berupaya membantu peran BPBD Kabupaten Malang pada saat melakukan evakuasi korban pengungsi. Komunitas ini mengajak masyarakat untuk mengumpulkan sarana dan prasarana transportasi secara swadaya sebagai upaya tanggap darurat evakuasi mandiri diri mereka sendiri sebelum bantuan dari BPBD Kabupaten Malang tiba. Jadi mereka berusaha menangani bencana erupsi Gunung Kelud ini secara mandiri tanpa harus menunggu lama bantuan dari pemerintah.

3) Dukungan Masyarakat

Kurang dari satu hari, begitu banyak bantuan yang terkumpul dari masyarakat maupun. Menurut penuturan dari Bapak Suhartanto, ST

selaku Staf Kedaruratan dan Logistik yang mengatakan bahwa pihak pemerintah kalah start dalam memberikan bantuan kepada para korban erupsi Gunung Kelud. Masyarakat sangat cepat dalam merespon terjadinya bencana. Bantuan dari masyarakat sangat cepat berdatangan. Ketika gunung Kelud erupsi pada Kamis malam, bantuan sudah banyak yang berdatangan di Jumat sore. Bahkan saat masa tanggap darurat selesai, bantuan tersebut masih ada dan dibagikan kepada para pengungsi.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kontribusi masyarakat dan pihak swasta begitu besar dalam bencana erupsi Gunung Kelud tahun 2014. Banyak bantuan yang diberikan kepada korban erupsi melalui Pemerintah Kabupaten Malang maupun melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bantuan yang datang umumnya tidak hanya berupa bantuan makanan. Namun juga berupa bantuan-bantuan lainnya seperti pakaian, selimut, perlengkapan bayi, obat-obatan, hingga bahan bangunan untuk memperbaiki rumah warga yang tertimpa lontaran material erupsi. Bantuan-bantuan yang datang tersebut dikumpulkan dan didata di pos induk yang ada di Taman Wisata Selorejo, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang.

b) Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang menjadi penentu baik dan buruknya suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Pada saat proses mencapai tujuan akan menemukan hal-hal yang menjadi hambatan dan

memiliki pengaruh. Faktor hambatan ini dimaksudkan untuk menganalisa hal yang memiliki pengaruh terhadap upaya BPBD Kabupaten Malang pada saat melakukan kegiatan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud. Sehingga dapat diketahui secara jelas hal-hal apa saja yang bisa menghambat upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malang. Faktor penghambat tersebut, yaitu sebagai berikut:

1) **Faktor Alam**

Pada hasil wawancara dengan Bapak Leonard Agus Supardhy, S.Sos selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang, beliau merasakan bahwa hambatan pada saat tanggap darurat erupsi Gunung Kelud kemarin cukup minim. Hal yang menjadi faktor penghambatnya adalah sebagian besar berasal dari faktor alamiah. Seperti kondisi jalan licin dilapangan yang penuh dengan abu vulkanik Gunung Kelud, lalu jarak pandang yang tidak cukup jauh sehingga mempersulit para tim evakuasi untuk melihat kondisi jalan saat menyতির. Ditambah lagi dengan medan yang berliku dan dalam kondisi gelap malam membuat kegiatan evakuasi menjadi lebih ekstra hati-hati agar tidak terjadi tabrakan sesama truk pengangkut pengungsi.

Terputusnya salah satu jembatan penghubung antar desa di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang juga membuat akses transportasi untuk kegiatan penyaluran bantuan logistik jadi terhambat. Hal ini disebabkan karena derasnya aliran sungai pada saat itu akibat adanya

aliran lahar dingin dari puncak Gunung Kelud. Akibatnya BPBD Kabupaten harus menyiapkan tali dan peralatan seadanya sebagai alat penghubung untuk proses kegiatan penyaluran barang bantuan. Putusnya jembatan tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi dan mampu mempengaruhi jalannya kegiatan penanganan kedaruratan disektor penyaluran barang bantuan logistik untuk para pengungsi.

2) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat kedua adalah dari segi sumber daya manusia yakni kurangnya jumlah personil BPBD Kabupaten Malang. Pada saat proses kegiatan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud tahun 2014 jumlah personil BPBD Kabupaten Malang hanya berjumlah 30 orang. Menurut Bapak Suhartanto, ST selaku Staf Kedaruratan dan Logistik hal tersebut dirasa berpengaruh terhadap pelaksanaan upaya tanggap darurat erupsi Gunung Kelud kemarin. Jumlah anggota BPBD yang terjun ke area bencana kurang sebanding dengan besarnya skala bencana erupsi Gunung Kelud. Sehingga kinerja BPBD Kabupaten Malang dirasa kurang optimal. Serta BPBD Kabupaten Malang selalu membutuhkan banyak relawan, salah satunya relawan dari PMI yang sudah lama saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan BPBD. Karena PMI memiliki jumlah relawan yang banyak, tangguh dan sangat terlatih menghadapi keadaan darurat bencana.

3) Kurangnya Sumber Dana

Menurut penuturan dari Bapak Suhartanto, ST selaku Staf Kedaruratan dan Logistik yang juga terjun langsung ke lokasi bencana erupsi Gunung Kelud 2014 menyatakan bahwa ada banyak hambatan yang dirasakan. Faktor penghambat ketiga adalah dari sumber dana. Dalam hal ini anggaran dana siap pakai yang dialokasikan khusus dari APBD Kabupaten Malang sebesar 1 Milyar rupiah untuk periode satu tahun kerja. Dana tersebut kurang mencukupi dan tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan pada saat tanggap darurat erupsi Gunung Kelud. Karena dana siap pakai tersebut juga dibagi dan digunakan untuk menangani kegiatan tanggap darurat bencana lain di periode kerja yang sama.

4) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Faktor penghambat keempat menurut Bapak Suhartanto, ST adalah kurang tersedianya sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Malang. Pada saat bencana erupsi Gunung Kelud terjadi di tahun 2014, BPBD Kabupaten Malang belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap. Sehingga BPBD Kabupaten Malang membutuhkan fasilitas transportasi dan alat berat yang dimiliki oleh dinas lain, seperti *beigo* dan *dumtruck* milik Bina Marga, truk pengangkut pengungsi milik Kodim 0818, dan truk evakuasi milik PMI.

5) Kondisi Pengungsi

Faktor penghambat kelima sekaligus terakhir adalah berasal dari para pengungsi. Menurut keterangan dari Bapak Suhartanto, ST yang menyatakan bahwa BPBD Kabupaten Malang bersama dengan para relawan yang bertugas melakukan pendataan pengungsi sempat mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan tidak sedikit pengungsi yang lebih memilih untuk mengungsi ke rumah saudaranya. Sehingga pihak BPBD bersama tim relawan kesulitan menemukan para pengungsi-pengungsi tersebut, karena mereka tidak ada di pos-pos pengungsian. Kemudian banyak pengungsi yang khawatir tidak mendapat jatah makan dan merasa ingin diprioritaskan. Mereka berusaha untuk memberhentikan truk-truk pengangkut makanan yang seharusnya mendistribusikan pasokan makanan dari dapur umum ke pos pengungsian di tempat lain, namun terpaksa berhenti karena dicegat oleh para pengungsi yang turun ke jalan untuk meminta jatah makannya lebih duluan. Padahal semua pengungsi pasti mendapat jatah makannya masing-masing karena sudah ada datanya masing-masing

Dari keterangan hasil pembahasan wawancara yang telah dilakukan mengenai faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya tanggap darurat erupsi Gunung Kelud ini menunjukkan bahwa sebuah faktor sangat mempengaruhi jalannya suatu proses pelaksanaan penanggulangan bencana. Pengaruh pendukung terlaksananya upaya tersebut bisa berasal

dari jalinan sinergitas lintas sektor yang baik, adanya koordinasi yang terus menerus dengan LSM Jangkar Kelud yang merupakan masyarakat lokal sekitar Gunung Kelud, dan adanya banyak perhatian dan kepedulian dari masyarakat seluruh Indonesia yang turut berkontribusi mendukung kinerja BPBD Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan bantuan logistik kepada para pengungsi.

Disamping ada faktor pendukung, ada juga hal-hal yang menjadi faktor penghambat upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malang, yaitu mulai dari faktor alam saat terjadi erupsi, kurangnya sumber daya manusia BPBD Kabupaten Malang, kurangnya dukungan sumber dana khusus penanganan bencana, kurang tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Malang, serta beberapa hal dari para pengungsi sendiri yang merupakan sasaran tanggap darurat bencana erupsi. Faktor pendukung dan penghambat tersebut membawa pengaruh terhadap baik atau tidaknya pelaksanaan upaya tanggap darurat erupsi Gunung Kelud ini. Serta dengan adanya faktor pendukung dan penghambat tersebut juga dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing aktor yang terlibat pada saat proses tanggap darurat erupsi Gunung Kelud tahun 2014.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kejadian erupsi Gunung Kelud tahun 2014 berhasil merusak bangunan-bangunan yang ada di dua wilayah kecamatan Kabupaten Malang, yakni Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Kasembon. Sebab hanya berada di jarak radius 8 km dari Kawah Gunung Kelud dan menjadi titik terparah terdampak bencana bagi wilayah Kabupaten Malang. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang melakukan upaya penanganan erupsi kelud secara cepat, responsif, dan terpadu dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat (pengungsi) yang terdampak. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 3 fokus upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang selaku lembaga kebencanaan tingkat daerah.

Bentuk upaya yang pertama yaitu penanganan tanggap darurat sektor posko pengendali. Ada beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan, mulai dari pembentukan pos pengendali sebagai pusat koordinasi penanganan erupsi yang berada di wilayah Resort Taman Wisata Selorejo, Desa Pandansari Kecamatan Ngantang, pembentukan struktur sistem komando tanggap darurat erupsi Gunung Kelud yang dikoordinatori oleh BPBD Kabuptaen Malang dan dikomando oleh Dandim 0818 Kepanjen. Struktur ini menunjang terwujudnya jaring komunikasi lintas sektoral yang efektif dan tidak terjadi *overlapping* tugas saat proses kegiatan tanggap

darurat berlangsung. Serta tahap selanjutnya melakukan rapat evaluasi dilakukan setiap sore hari selama masa tanggap darurat erupsi Gunung Kelud berlangsung untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan pada pagi hari hingga siang hari dan menyusun rencana baru untuk penanganan hari berikutnya.

Upaya yang kedua adalah pelaksanaan sektor evakuasi korban. Upaya tersebut memiliki tujuan untuk menyelamatkan korban secepat mungkin dan meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Kegiatan yang dilakukan oleh BPBD yaitu menyiapkan alat dan koordinasi pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan korban yang dibantu oleh anggota relawan LSM Jangkar Kelud bersama masyarakat, menyiapkan titik-titik pengungsian dengan mendirikan tenda pengungsi, melaksanakan proses evakuasi penyelamatan korban, dan melakukan pendataan dan inventarisasi korban sesuai dengan pengelompokkan jenis kelamin, umur, dan tingkat kesehatan. Pihak BPBD Kabupaten Malang bersama tim relawan sempat mengalami kesulitan mendata dan menemukan para korban karena tidak sedikit dari mereka yang lebih memilih untuk mengungsi ke rumah saudaranya.

Upaya yang ketiga adalah penghimpunan dan penyaluran bantuan logistik. Kegiatan yang dilakukan oleh BPBD bersama tim relawan pada penanganan ini meliputi pendataan jenis bantuan yang dibutuhkan pengungsi, penghimpunan bantuan yang diterima dan pelaksanaan distribusi. Kemudian pendirian sarana dan prasarana dapur umum di

wilayah Kecamatan Pujon dan di Kota Batu. Serta melakukan pendistribusian konsumsi dan bantuan kebutuhan dasar pengungsi. Pada sektor logistik ini memiliki sedikit masalah yakni menumpuknya bantuan berupa air mineral dan mie instan. karena dari masing-masing donatur tidak melakukan assesment terlebih dahulu ke lokasi untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan pengungsi setelah masa tanggap darurat ini berakhir. Lokasi dapur umum yang berada di wilayah Batu dan Pujon ini pun membuat distribusi konsumsi ke wilayah Kecamatan Ngantang dan Kasembon membutuhkan waktu dan mengalami keterlambatan karena ada kejadian dimana pengungsi turun kejalan dan melakukan penghadangan oleh para pengungsi terhadap truk logistik yang menuju ke wilayah Kecamatan Kasembon. Mereka minta didahulukan dan khawatir tidak mendapatkan jatah makan sehingga terjadi sedikit keributan.

Faktor pendukung dan faktor penghambat merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi keberhasilan upaya Pemerintah Kabupaten Malang pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud. Ada tiga faktor pendukung terhadap upaya tanggap darurat erupsi Gunung Kelud, yaitu pertama adanya dukungan sinergitas dari berbagai instansi pemerintahan Kabupaten Malang serta adanya dukungan dari pemerintah tetangga (Pemerintah Kota Batu). Faktor pendukung kedua adalah dengan adanya LSM Jangkar Kelud yang memiliki fokus perhatian terhadap Gunung Kelud yang turut membantu pelaksanaan upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malang. faktor pendukung yang

ketiga adalah dukungan masyarakat yang sangat besar dengan terkumpulnya banyak bantuan di posko utama Selorejo yang diberikan oleh masyarakat maupun pihak swasta.

Disamping ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambat yang mempengaruhi proses pelaksanaan upaya tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud tahun 2014. Faktor penghambat pertama terhadap upaya tanggap darurat adalah dikarenakan oleh faktor kondisi alam. Seperti, kondisi jalan yang licin karena tertutup abu vulkanik, jarak pandang mata yang tidak lebih dari 5 meter, serta kondisi medan yang berliku dan gelap. Sehingga beresiko terjadinya tabrakan sesama relawan. Faktor kedua, dikarenakan kurang mencukupinya dana siap pakai khusus bencana sehingga tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan pada saat tanggap darurat erupsi Gunung Kelud. Faktor penghambat ketiga adalah dari segi sumber daya manusia yakni kurangnya jumlah personil BPBD Kabupaten Malang. Faktor keempat adalah kurangnya sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana milik BPBD sehingga harus menunggu bantuan dari dinas lain. Faktor penghambat terakhir berasal dari para pengungsi. Tidak sedikit korban yang lebih memilih untuk mengungsi ke rumah saudaranya. Sehingga pihak BPBD bersama tim relawan kesulitan mendata dan menemukan para korban tersebut. Kemudian banyak pengungsi yang khawatir tidak mendapat jatah makan dan merasa ingin diprioritaskan. Mereka berusaha untuk memberhentikan truk-truk

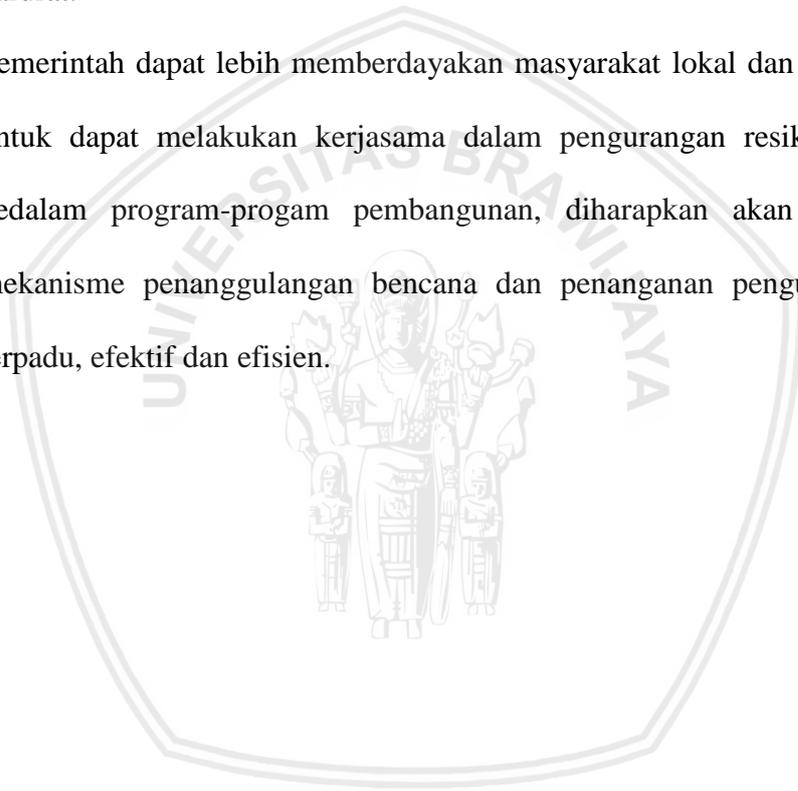
pengangkut makanan yang seharusnya mendistribusikan pasokan makanan dari dapur umum ke pos pengungsian di tempat lain

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Malang sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan upaya pelayanan terhadap masyarakat terutama penyelenggaraan penanggulangan bencana, ini tidak bisa berjalan tunggal. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu ada keterlibatan dan jalin kerjasama yang baik dari para aktor penanggulangan bencana baik dari pemerintahan, non-pemerintahan, dan masyarakat agar dapat tercipta kerjasama penanggulangan yang efektif serta efisien.
2. Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu aktor, melainkan adanya kerjasama dari berbagai pihak termasuk LSM dan relawan non pemerintahan yang turut berkontribusi. Oleh karena itu perlu disusun rencana kerjasama dengan organisasi-organisasi yang menjadi relawan tetap BPBD. Serta dapat melakukan peningkatan kerjasama dikedua belah pihak dengan menyelenggarakan pelatihan tanggap darurat gabungan agar tercipta koordinasi dan kerjasama yang terpadu pada saat terjadi bencana.
3. Diperlukannya penambahan anggota personil BPBD Kabupaten Malang untuk menunjang kinerja tanggap darurat bencana erupsi gunung api maupun bencana lainnya dalam skala besar. Karena erupsi gunung api merupakan bencana lainnya tidak bisa diperkirakan seberapa besar skala dampaknya. Sehingga dibutuhkan banyak personil saat penanganan bencana di lapangan.

4. Sumber dana dapat berpengaruh terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk bencana yang memiliki dampak dalam skala besar diperlukan dana yang cukup besar pula. Sehingga perlu ada dana cadangan khusus diluar dana cadangan yang bisa diakses oleh instansi lain yang sewaktu-waktu dalam keadaan genting bisa digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan penanggulangan bencana.
5. Penanggulangan bencana pada fase tanggap darurat merupakan kegiatan yang dilakukan secara mendadak saat terjadi bencana dan perlu penanganan yang sangat kompleks. Oleh karena dalam pelaksanaannya diperlukan satu pedoman operasional penanganan tanggap darurat baik untuk bencana erupsi maupun untuk jenis bencana-bencana lainnya. Pedoman tersebut dapat berupa SOP penanganan tanggap darurat berbagai jenis bencana dan mengatur siapa saja aktor yang terlibat beserta rincian tugas masing-masing sehingga nantinya tercipta jaring komunikasi dan koordinasi yang jelas saat pelaksanaan upaya tanggap darurat bencana.
6. Terkait sistem informasi, BPBD Kabupaten Malang harus selalu teliti dan giat untuk mengupdate berbagai jenis kebutuhan yang dibutuhkan korban kepada masyarakat luas agar membantu keberlangsungan penghimpunan dan pengelolaan bantuan. BPBD Kabupaten Malang juga harus transparansi mengenai setiap informasi bantuan melalui penggunaan informasi teknologi sebagai pelaporan untuk masyarakat baik donatur maupun korban.

7. Perlunya peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Malang sebagai penunjang pelaksanaan penanggulangan bencana sehingga pada saat terjadi bencana tidak menunggu bantuan peralatan datang dari instansi lain. Karena saling tunggu menunggu bantuan dirasa kurang efektif disaat keadaan sedang darurat.
8. Pemerintah dapat lebih memberdayakan masyarakat lokal dan LSM lokal untuk dapat melakukan kerjasama dalam pengurangan resiko bencana kedalam program-program pembangunan, diharapkan akan terbangun mekanisme penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terpadu, efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

- Arenawati. 2014. *Adminstrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2019. “*Bencana Menurut Jenisnya Di Indonesia Tahun 2013 S/D 2019*”, diakses dari <http://www.bnpb.cloud/dibi/tabel1> pada tanggal 7 Januari 2019.
- Bakornas. 2007. *Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (Berisi keterangan yang jelas untuk Sebelum • Saat • Sesudah Bencana)*. Edisi II. Bali: Yayasan IDEP 2007. www.idepfoundation.org/pbbm.
- Hapsari, Tika. 2018. “*100 Desa di Kabupaten Malang Rawan Bencana*” diakses dari <http://www.jawapos.com/jpg-today/05/02/2018/100-desa-di-kabupaten-malang-rawan-bencana?amp=1> pada tanggal 10 Januari 2019.
- Kadarsetia, Eka dkk. *Jurnal Geologi Indonesia*. Vol. 1 No.4 Tahun 2006
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles M.B., A.M. Huberman, and Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook 3rd edition*. California: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Resdakarya.
- Norman K Denzin dan Yvonna Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publication: Diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus amsul Fata, Abi, John Rinaldi. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Nurjanah, dkk. 2011. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta
- Prabowo, Hayu Yudha. 2014. “*Lebih Dari 2.500 Rumah Rusak di Kabupaten Malang Akibat Letusan Kelud*”, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2014/02/18/0456100/Lebih.Dari.2.500.Rumah.Rusak.di.Kabupaten.n.Malang.Akibat.Letusan.Kelud> pada tanggal 20 Januari 2019.
- Purnomo, Hadi dan Ronny Sugiantoro. 2010. *Manajemen Bencana: Respons dan Tindakan Terhadap Bencana*. Yogyakarta: MedPress.
- Purwanto, Iwan. 2008. *Manajemen Strategi*. Bandung: YRama Widya.
- Rizki, Dwi. 2018. “*Sepanjang 2018 Terjadi 1.999 Bencana, 3.548 Orang Meninggal Dunia dan Hilang*”, diakses dari <http://wartakota.tribunnews>



.com/amp/2018/10/26/sepanjang-2018-terjadi-1999-bencana-3548-orang-meninggal-dunia-dan-hilang-pada-tanggal-7-Januari-2019.

- Salusu. 2004. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Simatupang, Robinson. 1989. *Bencana Alam dan Masalahnya*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bencana Alam Indonesia.
- Sudibyakto. 2011. *Manajemen Bencana di Indonesia Ke Mana?*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta. Cetakan ke-9.
- Suyami, Taryati, dan Sumarno. 2015. *Kajian Kebencanaan dalam Naskah: Panjeblugipun Redi Kelut*. Yogyakarta : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).
- Tangkilisan, Hessel N.S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Ulum, M. Chazienul. 2014. *Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Zaini, Mochamad. 1998. *Panduan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran*. Jakarta: Abdi Tandur.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Vidiarina, Henny Dwi. 2010. *Perencanaan Kontinjensi: Tinjauan tentang beberapa Pedoman Perencanaan dan Rencana Kontinjensi*. Baseline – Study, Dokumen Kerja No. 26, Oktober 2010. Kerjasama Indonesia-Jerman untuk Sistem Peringatan Dini Tsunami (GITEWS) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal GTZ-International Services diakses dari https://www.gitews.org/tsunami-kit/id/E4/sumber_lainnya/Perencanaan-Kontinjensi.pdf pada tanggal 25 Juni 2019
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.

LAMPIRAN



Surat Pra Penelitian

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA****FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 5149 /UN.10.3/P6/2016

Lampiran : -

Perihal : Pra Riset

Kepada : Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
Jalan Trunojoyo Kav.8 Kepanjen

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan Pra Riset / Survey bagi mahasiswa:

Nama : Suci Mufitasari
Alamat : Jl. Simpang Candi Panggung No.40A Kota Malang
NIM : 125030100111152
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah dalam Rangka Tanggap Darurat Bencana Wilayah Kabupaten Malang
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
Jalan Trunojoyo Kav.8 Kepanjen
Lamanya : 14 (empat belas) hari / 4 April 2016 - 18 April 2016
Peserta : 1 (Satu) Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Malang, 30 Maret 2016

a.n. Dekan
Ketua Prodi Administrasi PublikDr. Lely Indah Mardanti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Surat Pra Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/ *164* /35.07.205/2016

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fak. Ilmu dan Budaya UB Malang Nomor : 5149/UN10.3/PG/2016
 Tanggal 30 Maret 2016 Perihal : Pra Riset

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan kegiatan **Pra Riset** oleh :

- Nama / Instansi : Suci Mufitasari/ Mhs. FIA UB Malang
- Alamat : Jl. MT, Haryono 163 Malang
- Thema/Judul/Survey/Research : Stratrgi Pemerintah dalam rangka Tanggap Darurat
 Bencana Wilayah Kab. Malang
- Daerah/tempat kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Malang
- Lamanya : 4 - 18 April 2016
- Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 05 April 2016
 An. **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**
 Kepala Badan Kepegawaian, HAM dan Wasbang
 dan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kasubid Wawasan Kebangsaan



KUSWANTORO

Penata

NIP. 19680125 199203 1 004

Tembusan :
 Yth.

1. Sdr. Dekan FIA UB Malang
2. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Malang
3. Sdr. Mhs/Ybs
4. Arsip



Surat Penelitian



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 1713 /UN10.F03.11/PN/2019

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
Jl. K.H. Agus Salim No.7 Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Suci Mufitasari

Alamat : Jl. Simpang Candi Panggung No.40A Kota Malang

NIM : 125030100111152

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam Rangka Tanggap Darurat
Bencana Erupsi Gunung Kelud (Studi pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Malang)Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
Jalan Trunojoyo Kav.8 Kepanjen Kabupaten Malang

Waktu : 3 (tiga) bulan (7 Februari 2019 – 7 Mei 2019)

Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 4 Februari 2019

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Drs. Andy Feita Wijaya, MDA, Ph.D

NIP. 19670217 199103 1 000





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
Email: bakesbangpol@malangkab.go.id – Webside: <http://www.malangkab.go.id>
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/ 438 /35.07.207/2018

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Nomor:
1713/UN10.F03.11/PN/2019 Tanggal: 4 Februari 2019 Perihal: Ijin Riset

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan Ijin Riset oleh;

Nama / Instansi : Suci Mufitasari
Alamat : Jl. MT.Haryono 163,Malang
Thema/Judul/Survey/Research : Strategi Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Rangka
Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud (Studi
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malang)
Daerah/tempat kegiatan : Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Malang
Lamanya : 7 Februari - 7 Mei 2019
Pengikut
Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati
Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 07 Februari 2019

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG



GATOT YUDHA SETIAWAN,AP.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19740326 199311 1 001

Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Malang;
3. Mhs/Ybs;
4. Arsip



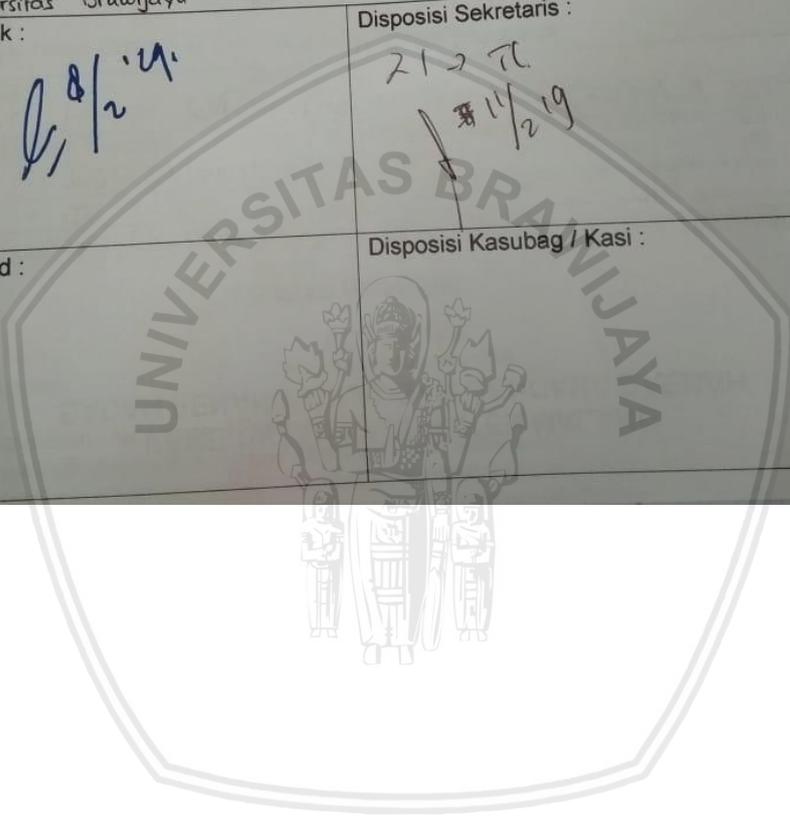
Surat Disposisi



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Turmojoyo Kepanjen
KEPANJEN

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Diterima tanggal : 7-2-2019
Tanggal Surat : 7-2-2019	Nomor Agenda : 192
Nomor Surat : 072/438/35.07.207/2018	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal: Ijin Riset atas nama Suci Mufitasari dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	
Disposisi Kalak : - kee 8/2.19	Disposisi Sekretaris : 212 TL 11/2.19
Disposisi Kabid :	Disposisi Kasubag / Kasi :



Pedoman Wawancara

Daftar Pedoman Wawancara Riset/ Penelitian

Judul Penelitian : Strategi Pemerintah Kabupaten Malang dalam Rangka Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud

Nama : Suci Mufitasari

NIM : 125030100111152

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Struktur, Tugas, Wewenang, Fungsi, dan Bidang-Bidang BPBD Kabupaten Malang

1. Bagaimana bentuk struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang ?
2. Ada berapa jumlah bidang di BPBD Kabupaten Malang ?. Mohon jelaskan tupoksi dari masing-masing bidang tersebut !
3. Apakah ada standarisasi tertentu dalam perekrutan pegawai BPBD ? Misalnya, sesuai dengan keahlian, sesuai dengan jurusan pendidikan, dll.
4. Dalam UU No. 24 Tahun 2007, BPBD terdiri dari 2 unsur yaitu pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana. Bidang-bidang mana sajakah yang termasuk ke dalam kedua unsur tersebut ?
5. Apakah ada peraturan lain yang mengatur tentang penanggulangan bencana untuk wilayah kabupaten Malang sendiri ?
6. Apakah ada penetapan standarisasi tertentu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Malang ?. Jika ada, mohon penjelasannya
7. Bagaimana rencana strategis dan rencana kerja BPBD Kabupaten Malang tahun 2018-2019 ?
8. Bagaimana prosedur kerja dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Malang tahun 2018-2019 ?
9. Apakah semua dana operasional dan non operasional penanggulangan bencana dari APBD Kab. Malang ? atau apakah ada bantuan dari pihak lain ?

Status Gunung api

1. Berapa kali Gunung Kelud erupsi/meletus ?

2. Apakah tahun 2014 menjadi erupsi yang terbesar dan menjadi bencana yang terbesar di wilayah kabupaten Malang ?
3. Bagaimana cara menentukan level status erupsi gunung api ? misalnya, pada saat tahun 2014, bagaimana status Gunung Kelud mulai dari pra erupsi hingga saat erupsi ? *PMBE*
4. Apakah ada kriteria tertentu saat menetapkan level status Gunung Kelud ?

Daerah terdampak bencana erupsi Gunung Kelud

1. Desa dan Kecamatan manasajakah yang ada di kabupaten Malang yang terkena dampak dari erupsi Gunung Kelud ?
2. Wilayah Desa dan Kecamatan manakah yang ada di Kabupaten Malang yang paling parah dampaknya ?
3. Kediri, Blitar, dan Malang, diantara ketiga wilayah tersebut manakah yang paling banyak terdampak ?

Pembagian kriteria daerah terdampak erupsi gunung api (Gunung Kelud)

1. Bagaimakah cara menentukan pembagian daerah terdampak erupsi gunung api (Gunung Kelud) ? misalnya Ring 1, Ring 2, Ring 3 *PK - peta rawan bencana erupsi*
2. Apakah ada kriteria dan faktor-faktor tertentu untuk mengelompokkan daerah terdampak tersebut ? hanya berdasarkan jarak atau yang lainnya ?

Regulasi Tanggap Darurat bencana erupsi gunung api (Gunung Kelud)

1. Apakah ada regulasi atau kebijakan yang mengatur/menjadi dasar saat tanggap darurat erupsi Gunung api (Gunung Kelud) ? misal, UU, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Kepala BNPB atau BPBD, dan sebagainya *<KL> Perbup*
2. Adakah regulasi atau kebijakan rencana operasional khusus tanggap darurat erupsi gunung api (Gunung Kelud) ? *PK*
3. Bagaimanakah rencana strategis (renstra) BPBD Kabupaten Malang atau bidang kedaruratan yang menangani bencana erupsi Gunung Kelud ? *PK*

Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud

1. Apasajakah yang menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan gunung Kelud tersebut kedalam status tanggap darurat ? *PMBE*

2. Apasajakah yang menjadi tujuan BPBD Kabupaten Malang pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud ? apakah ada visi misi tertentu pada bidang kedaruratan dan logistik ?
3. Bidang manasajakah yang berwenang dan bertugas penuh dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud ?
4. Apakah ada tahapan-tahapan tertentu pada saat tanggap darurat erupsi Gunung Kelud ?
5. Apasajakah fasilitas, sarana dan prasarana yang digunakan pada saat tanggap darurat erupsi Gunung Kelud ? <KL>
6. Apakah ada tenggang waktu/jangka waktu tertentu dalam penetapan status tanggap darurat pada saat erupsi Gunung Kelud terjadi ? Jika ada, berapa jangka waktu pada saat tanggap darurat erupsi Gunung Kelud 2014 ?
7. Bagaimana strategi yang diambil oleh BPBD Kabupaten Malang pada saat tanggap darurat erupsi gunung kelud ? misalnya, terhadap para korban, pengungsi, maupun fasilitas sarana-prasarana yang terdampak erupsi
8. Bagaimana mekanisme atau prosedur kerja dari BPBD Kabupaten Malang pada saat tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud terjadi ? apakah ada struktur kerja tim atau pembagian kerja saat dilapangan ?
9. Apakah strategi penanganan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud pada tahun 2014 memiliki perbedaan dengan penanganan tanggap darurat pada saat erupsi Gunung Kelud ditahun-tahun sebelumnya ? ^{Sektor PB}
(*data riwayat penanganan erupsi Gunung Kelud pada tahun lalu hingga 2014) → 2011
10. Apakah ada kerjasama/sinergitas/koordinasi antara BPBD Kabupaten Malang dengan instansi pemerintah, LSM/organisasi, ataupun masyarakat dalam melaksanakan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud dilapangan ?
11. Apakah BPBD Kabupaten Malang bekerjasama dengan pemerintah Blitar maupun Kediri ?
12. Bagaimana tata koordinasi sistem informasi dan komunikasi BPBD Kabupaten Malang pada saat terjadinya erupsi Gunung Kelud ?
13. Bagaimanakah dengan dukungan dana untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud ? misal, asal sumber dana, alokasi, dan prioritas dana untuk apa DSR .
14. Apasaja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud ? (mulai dari sebelum dilapangan hingga dilapangan)

Sekretariat

Mau
BPBD kab ?
Kediri

BPBD Kediri tahun

Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Leonard Agus Supardhy, S.Sos selaku Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Malang



Wawancara dengan Bapak Suhartanto, ST selaku Staf Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Malang



Wawancara dengan Bapak Sudarmanto (Mbah Darmo) selaku Koordinator LSM Jangkar Kelud Kabupaten Malang



Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang